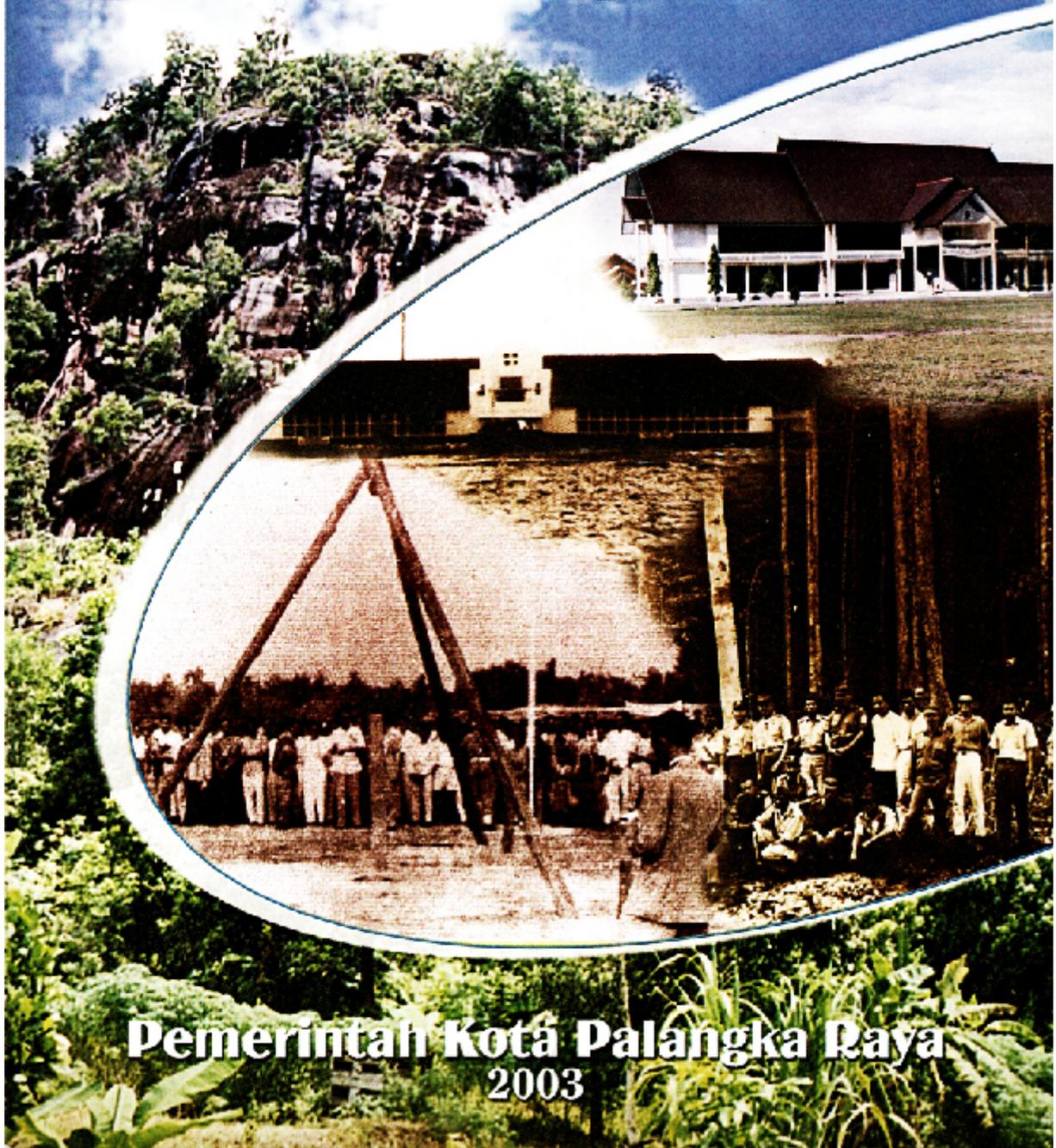


Sejarah Kota Palangka Raya



Pemerintah Kota Palangka Raya
2003

**SEJARAH
KOTA PALANGKA RAYA**

**TIM PENULIS BUKU SEJARAH
KOTA PALANGKA RAYA**

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

2003

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SEJARAH KOTA PALANGKA RAYA

EDISI PERTAMA CETAKAN PERTAMA
TAHUN 2003

Indeks

ISBN 979-97978-0-2

© PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

up. BAPPEDA Kota Palangka Raya

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

Telp. (0536) 31540, 31542 Fax (0536) 31539, 31521

E-mail : Bappeda_palangkaraya@yahoo.com

Website : <http://www.daponet.com>

Penasehat
TT. SUAN

Editor/penyunting
arief rahman hakim

Setting-layout-ilustrasi
arief-hendra-irwan

Pengumpul data
sernus, belly, tina, nemi, wiwin, cuneng.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulisan Buku Sejarah Kota Palangka Raya ini dapat diselesaikan. Gagasan untuk menulis buku ini sebenarnya sudah sangat lama. Pada saat Bapak Drs. Lukas Tingkes menjabat sebagai Walikota Palangka Raya, beliau telah memberikan persetujuan kepada kami (pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Palangka Raya). Namun gagasan tersebut belum dapat direalisasikan.

Pada saat kami menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, kami merasa terpanggil kembali untuk mewujudkan gagasan lama tersebut. Keinginan tersebut semakin kuat dan mendapat respon yang cukup baik dari para pemuka masyarakat pada saat berlangsungnya peringatan “ Pemancangan Tiang Pertama “ pada tanggal 17 Juli 2002 yang lalu.

Gagasan dan dukungan tersebut kemudian di tindaklanjuti melalui kerja sama dengan Bapak T.T. Suan. Bapak T.T. Suan bersedia untuk menuliskan draft pertama Buku Sejarah tersebut berdasarkan data-data dan dokumen yang beliau miliki. Draft pertama dari Bapak T.T. Suan akhirnya selesai pada awal Bulan Nopember 2002 yang lalu, yang selanjutnya dilaksanakan seminar pada

tanggal 27 Nopember 2002 untuk memperoleh masukan baru dari para pelaku/saksi sejarah lainnya.

Di luar dugaan, sambutan para pelaku/saksi sejarah tersebut sangat luar biasa. Dengan antusias, para pelaku/saksi sejarah tersebut memberikan tambahan data-data dan informasi yang baru untuk melengkapi draft yang telah disusun oleh Bapak T.T. Suan. Salah satu kesimpulan penting dari seminar tersebut adalah penyempurnaan dari draft tersebut perlu dilakukan oleh satu tim yang di pimpin oleh pejabat dari Pemerintah Kota Palangka Raya. Dengan demikian, beralihlah tugas penyusunan Buku Sejarah Kota Palangka Raya kepada kami.

Meskipun pada dasarnya hanya meneruskan pekerjaan Bapak T.T. Suan namun ternyata tugas tersebut kami rasakan cukup berat. Hal ini tidak lepas dari harapan para pelaku/saksi sejarah kepada kami agar buku tersebut cukup berbobot dari segi ilmiah tetapi tetap merupakan bacaan yang enak untuk dinikmati siapa saja. Kami tidak membatasi pekerjaan kami pada pekerjaan editorial semata, melainkan juga melakukan perombakan susunan bab, menambahkan data-data baru, menyelipkan berbagai foto dokumentasi dan melakukan editing buku secara keseluruhan.

Hal yang paling mendasar yang harus kami putuskan pertama kali adalah “gaya“ tulisan yang harus kami pilih, yaitu gaya ilmiah atau gaya populer. Gaya ilmiah akan membuat buku ini sangat “kredibel” dan memberikan informasi yang cukup lengkap secara ilmiah, namun bahasanya relatif kaku dan pembaca akan terganggu dengan berbagai catatan kaki sebagai sumber rujukan. Sebaliknya gaya populer akan lebih enak untuk dibaca tetapi bagi pembaca yang ingin menggali lebih jauh informasi yang disajikan dalam buku ini tidak dapat terpenuhi keinginannya. Jalan tengah yang kami ambil adalah mempertahankan keluwesan penulisan populer, namun menyertakan catatan akhir (*end-note*) sehingga bagi pembaca yang perlu informasi lebih banyak dapat menelusuri sumber dokumen yang dirujuk.

Sistematika buku ini kami susun dalam tujuh bab, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bab satu menguraikan tentang Sejarah Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah. Informasi ini sangat penting karena menurut kenyataan yang ada. Sejarah Kota Palangka Raya tidak dapat dipisahkan bahkan menjadi bagian dari Sejarah Propinsi Kalimantan Tengah.

Bab ini memaparkan dinamika aspirasi rakyat Kalimantan Tengah untuk mempunyai daerah otonom yang mandiri sejak jaman dahulu yang bermuara dengan pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tanggal 23 Mei 1957. Kemudian disusul dengan uraian tentang proses penentuan ibukota propinsi yang baru lahir tersebut, dengan menunjuk Kampung Pahandut sebagai ibukota.

2. Bab dua menguraikan tentang Kampung Pahandut sebagai cikal bakal Kota Palangka Raya, mencakup tata pemerintahan ketika Pahandut ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, asal usul Kampung Pahandut itu sendiri dan perubahan nama dari Pahandut menjadi Palangka Raya.

3. Bab tiga dan Bab empat menguraikan proses pembangunan Kota Palangka Raya secara fisik maupun administrasi sehingga menjadi satu daerah otonom yang mandiri. Tahap awal pembangunan Kota Palangka Raya menyimpan cerita tersendiri, di mana semua elemen masyarakat pada waktu itu (PNS, pelajar, tentara dan masyarakat biasa) bergotong royong, bahu membahu membangun pondasi awal pembangunan fisik Kota Palangka Raya.

Proses pembangunan Kota Palangka Raya dimulai dengan pemancangan tiang pertama oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Pembangunan itu sendiri tidak hanya melibatkan tenaga fisik semata-mata, melainkan melibatkan emosi dan semangat perjuangan yang dimiliki masyarakat Kalimantan Tengah.

Setelah Kota Palangka Raya siap secara fisik, maka disusul proses pengurusan kelengkapan administrasinya sehingga mejadi satu Kotapraja yang otonom.

4. Bab lima berisi kronik yang merekam kejadian-kejadian penting yang berkenaan dengan penunjukan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah secara kronologis.
5. Bab enam dan tujuh semula merupakan satu bab yang menguraikan figur/profil sembilan orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Walikota Palangka Raya. Namun karena pertimbangan jumlah halaman yang terlalu panjang sehingga tidak seimbang dengan bab-bab lain, maka bab ini dipecah menjadi dua. Bab enam menguraikan figur/profil para walikota periode 1965-1975 pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1965 dan Bab tujuh menguraikan profil/figur walikota periode 1975 sampai sekarang, pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974. Kedudukan Bapak Salundik Gohong, Walikota pada era transformasi dari UU 5/1974 dan UU 22/1999 sementara dimasukkan dalam bab tujuh. Uraian singkat ini berupa biodata dan riwayat karir dari pejabat yang bersangkutan sampai menjadi Walikota Palangka Raya, serta sejauh mungkin kami upayakan untuk merekam hal-hal yang paling berkesan selama pejabat tersebut menjabat sebagai Walikota Palangka Raya.
6. Lampiran-lampiran berisi empat buah pidato yang kami anggap penting. Dua pidato pertama adalah Pidato Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah (Bapak RTA Milono) menyambut pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengumuman nama Kota Palangka Raya. Pidato ini kami nilai penting karena mengandung makna kelahiran Propinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya sebagai “milik seluruh rakyat indonesia” Pidato ketiga adalah Amanat Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah (Bapak Tjilik Riwut) pada peringatan Hari Palangka Raya ke 6 Tanggal 17 Juli 1963

di Palangka Raya. Pidato ini kami anggap penting karena mencetuskan visi awal pembangunan Kota Palangka Raya yaitu sebagai “kota modal” dan “kota model“. Visi tersebut kemudian dilengkapi oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo dengan “kota modern”, sehingga terkenal dengan sebutan kota “3 M” yaitu modal, model dan modern.

Pidato terakhir adalah Pidato Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo pada saat peresmian Kotapraja Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 1965. Pidato tersebut memberikan gambaran kondisi sosial politik nasional pada waktu itu dan arti penting Kota Palangka Raya ditinjau perspektik nasional. Palangka Raya dianggap sebagai salah satu tonggak kemenangan (baca keberhasilan) pemerintah pada waktu itu terhadap kritik kaum oposisi. Dengan menelaah pidato ini, kita akan memahami dengan baik satu peristiwa yang diuraikan pada Bab VI yang dalam buku ini disebut “Gugatan W. Sandy “.

Sesuai dengan pengertian kota “sejarah“ yang berasal dari “sajaratun “ yang berarti pohon, penulisan sejarah Kota Palangka Raya ini kami harapkan juga akan terus tumbuh seperti tumbuhnya pohon yang subur. Setiap hari fakta dan informasi baru akan ditemukan, tafsiran dan analisa atas fakta yang sudah diketahui juga selalu berkembang sehingga di masa yang akan datang akan ada buku oleh penulis lain yang membahas sejarah Kota Palangka Raya dari perspektif yang berbeda. Kami sungguh-sungguh sangat mengharapkan hal itu. Buku-buku tersebut akan melengkapi buku yang sudah disusun ini dalam memberikan gambaran terhadap generasi sekarang dan yang akan datang tentang mengapa dan bagaimana kota ini dibangun.

Dengan selesainya penulisan buku ini kami merasa berhutang budi atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Walikota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya atas dukungan yang diberikan kepada

kami dalam penulisan buku ini. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak T.T. Suan yang telah mempersiapkan draft awal buku ini serta tidak pernah bosan dalam memberikan informasi-informasi baru sehingga buku ini nampak seperti sekarang. Penghargaan yang sama kami sampaikan kepada para pelaku/saksi sejarah yang telah melihat dan merasakan kerasnya perjuangan membangun Kota Palangka Raya dan telah membagi pengalaman tersebut bersama kami. Kepada para mantan Walikota dan ahli waris para mantan Walikota yang telah memberikan informasi yang sangat berharga juga kami ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Sekretaris DPRD Propinsi Kalimantan Tengah kami juga menghaturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menggunakan Musium Tjilik Riwut bagi penulisan buku ini.

Ibarat pepatah “tiada gading yang tak retak“ kami sepenuhnya menyadari bahwa buku ini sangat banyak kekurangannya. Memang demikianlah sifat manusia, karena itu dengan segala kekurangannya tersebut buku ini kami persembahkan kepada pembaca dan seluruh masyarakat Kota Palangka Raya.

Sekian dan terima kasih.

Palangka Raya, 19 Juli 2003

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**Drs. KAETER LAMEY
Pembina Tingkat I
NIP. 530 004 409**



WALIKOTA PALANGKA RAYA

SAMBUTAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa akhirnya proses penyusunan buku sejarah Kota Palangka Raya dapat diselesaikan dengan baik. Saya yakin bahwa penyusunan buku ini telah dilakukan melalui studi dan penelitian arsip yang cukup melelahkan mengingat sistem kearsipan kita masih belum tertata dengan baik serta menemui berbagai saksi dan pelaku sejarah. Dengan demikian, buku ini juga akan menghasilkan fakta-fakta yang benar.

Sejarah suatu masyarakat pada hakekatnya merupakan catatan kolektif atas berbagai jawaban yang diberikan oleh setiap generasi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Pembentukan Kota Palangka Raya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah juga merupakan jawaban oleh generasi masyarakat Dayak Besar (ketika itu) tentang berbagai masalah yang menyangkut eksistensi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jawaban tersebut berakhir pada pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah dan jawaban atas persoalan dimana ibukota propinsi yang akan dibentuk itulah yang akhirnya melahirkan Kota Palangka Raya ini.

Generasi sekarang hanya akan melihat sejarah sebagai suatu catatan peristiwa. Namun bagi para pelakunya, sejarah selalu melahirkan romantisme sendiri, kenangan yang tak terlupakan karena selalu penuh dengan cerita ceria atau duka yang sarat dengan perjuangan, tetesan keringat dan air mata. Dinamika ini seringkali akan hilang jika sejarah hanya dilihat dari kondisi makro atau nasional saja. Karena dinamika yang khas itulah maka sejarah lokal perlu diberikan tempat tersendiri.

Buku yang sedang kita baca sekarang ini kita harapkan mampu mengisi celah-celah yang kosong dalam buku sejarah dewasa ini. Buku ini akan bercerita tentang perjuangan suku Dayak dalam menegakkan eksistensinya di bumi pertiwi. Dari Buku Sejarah Kota Palangka Raya ini, generasi sekarang dan generasi yang akan datang akan dapat mengetahui bagaimana perjuangan itu dilakukan dengan mengorbankan biaya, tenaga dan air mata, mulai dari saat pemancangan tiang pertama sampai sekarang ini.

Dalam kurun waktu 38 tahun dan 9 orang walikota telah banyak kemajuan yang dicapai oleh Kota Palangka Raya. Prasarana umum semakin bertambah, fasilitas kota semakin lengkap dan utilitas kota juga semakin baik. Saya tidak menunjukkan hal itu melalui data statistik, tapi saya kutip tulisan pena seorang penyair, Alm. H.A. BADAR SULAIMAN USIN, yang merekam perjalanan Kota Palangka Raya.

Kota Palangka Raya pada tahun 1968 dilukiskan :

.....
Satu-satunya hotel “Bulevue”
Tambah satu pondokan “Islam”
Pasar ada dua “Kameloh” dan “Palangka Sari”
Ada juga lapangan Olahraga “Sanaman Mantikei”
Bioskop belum ada disini.
Untungnya ada studio RRI
.....

(HA.Badar Sulaiman Usin, *Palangka Raya 1968*)

Delapan tahun kemudian (tahun 1976), Kota Palangka Raya digambarkan :

.....
Yang dahulu itu hanya berupa hutan “tumbuh” dan “garunggang” dan belukar “masisin”

Ketika masih tumbuh subur sebagai daerah angker seribu satu macam cerita
Tapi sekarang sudah terbina menjadi kota indah dengan jalan-jalan raya serta
gedung-gedung bertingkat

.....
Cuma harapan masa depan tetap berdegup di setiap dada warga kota
Itulah Palangka Raya kota muda usia menyatakannya kehadirannya dalam kawasan
nusantara

.....
(HA.Badar Sulaiman Usin, *Palangka Raya 1976*)

Seperti bait terakhir puisi yang saya kutip tadi, kita bersyukur tetapi belum puas dengan segala kemajuan yang dicapai. Kita masih menginginkan Kota Palangka Raya yang lebih baik dari sekarang. Sebagaimana yang tercantum dalam Visi Kota Palangka Raya, kota ini dapat menjadi pusat pelayanan publik, mempunyai pemukiman yang nyaman dan tertata, memiliki pemerintahan yang bersih, sumberdaya manusia yang andal dan dunia usaha serta pariwisata yang berkembang dengan baik dan sehat. Namun di atas segalanya, ciri khas Palangka Raya dengan budaya daerah yang dimilikinya tidak hilang.

Generasi tua, para pendiri Propinsi Kalimantan Tengah dan peletak pondasi awal pembangunan Kota Palangka Raya, telah menunaikan tugasnya dengan baik, untuk seterusnya generasi mendatang yang akan melanjutkan untuk mengisi lembaran-lembaran sejarah baru. Untuk itu mereka perlu diberikan bekal dan bekal terbaik yang harus mereka bawa adalah identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat lokal di Kalimantan Tengah ini.

Disinilah nilai paling penting dari buku. Buku ini diharapkan dapat mewariskan semangat yang dimiliki dan telah ditunjukkan oleh putra-putra terbaik Kalimantan Tengah pada waktu itu kepada generasi sekarang dan yang

akan datang. Mewariskan identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat lokal Kalimantan untuk ditunjukkan pada dunia.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Gubernur Tjilik Riwut pada Peringatan Pemancangan Tiang Pertama pembangunan Kota Palangka Raya pada tanggal 17 Juli 1963, bahwa “.... Sejak tertancapnya tiang pertaman termasuklah Palangka Raya dalam peta Indonesia, dalam peta dunia internasional” Pada bagian lain, beliau menambahkan “Palangka Raya, kota jasa, kota pewujud bakti,..... kota penguji kekuatan jiwa. Memang, hanya bagi mereka yang memiliki kekuatan jiwa, keuletan semangat, dapat hiodup di Kota Palangka Raya. Mereka yang cinta karya, mencapai kesenangan bekerja di Palangka Raya. Mereka akan menemukan lapangan karya yang luas sekali, akan menemukan lapangan bakti yang mulia sekali”

Jika generasi pendahulu berhasil mewariskan sebuah buku sejarah yang baik bagi generasi mendatang maka generasi itu akan dikenang bukan saja sebagai generasi pembuat sejarah tetapi juga dikenal sebagai generasi yang mewariskan pengetahuan tentang sejarah sekaligus semangat sejarah kepada para pewarisnya.

Marilah kita kembangkan sumberdaya manusia yang memiliki *Moral* yang baik, *Motivasi* yang tinggi dan *Mental* yang kuat sehingga dapat menjadi *Model* atau saya sebut *4-M*. Demikian sambutan saya akhirnya dengan falsafah rumah betang dan semangat ISEN MULANG, maju terus, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, mari Kota CANTIK Palangka Raya ini kita bangun, kita bina dan kita jaga.

Palangka Raya, 19 Juli 2003

WALIKOTA PALANGKA RAYA

SALUNDIK GOHONG

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Sambutan Walikota Palangka Raya		vii
Daftar Isi		xi
Daftar Foto/Gambar		xiii
BAB I	SEJARAH PEMBENTUKAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	
	1. Aspirasi Masyarakat Sejak Masa Silam	1
	2. Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah	2
	3. Pencarian Ibukota untuk Propinsi Baru	8
BAB II	CIKAL BAKAL KOTA PALANGKA RAYA	15
	1. Tata Pemerintahan pada Abad 18 dan 19	15
	2. Asal Usul Kampung Pahandut	18
	3. Ngabe Anum Soekah	21
	4. Pahandut menjadi Palangka Raya	23
BAB III	PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA DI TENGAH RIMBA BELANTARA	29
	1. Membangun dari Tiada menjadi Ada	29
	2. Perencanaan Awal	30
	3. Pemancangan Tiang Pertama	33
	4. Buah dari Perjuangan	37
BAB IV	PALANGKA RAYA MENJADI KOTAPRAJA OTONOM	45
	1. Pembentukan Kotapraja Administratif	45
	2. Peresmian	48

	3. Palangka Raya, Kota 3-M	52
	4. Pembentukan Dinas-Dinas	55
BAB V	KRONIK KOTA PALANGKA RAYA (1957-1965)	59
BAB VI	WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 1965- 1975	71
	1. JANTI SACONK	71
	2. M. AGOES IBRAHIM	75
	3. W. SANDY	78
	4. CIN MADNOCH	87
BAB VII	WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 1975- SEKARANG	91
	5. Letkol. KADIJOTO	91
	6. Drs. LUKAS TINGKES	94
	7. Drs. DN. SINGARACA	99
	8. Drs. NAHSON TAWAY	104
	9. Kol. Inf. SALUNDIK GOHONG	108
LAMPIRAN		117

BAB I

PEMBENTUKAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Aspirasi Rakyat Sejak Masa Silam

Keinginan masyarakat Dayak untuk mempunyai daerah otonom tersendiri sudah muncul sejak lama, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Sejalan dengan tingkat perjuangan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia yang sangat bergelora menjelang abad ke-20 (mendekati Perang Dunia II) dan secara nasional ditandai dengan tuntutan “ Indonesia Berparlemen ”. Suku Dayak Kalimantan Tengah melalui organisasi *Pakat Dayak* (PD) mengeluarkan resolusi mendukung tuntutan Gabungan Partai-partai Politik Indonesia (GAPKI) demi terlaksanannya Indonesia Berparlemen itu.¹

Resolusi itu disampaikan langsung kepada anggota *Volksraad*/Tim Komisi Visman pimpinan R.A.A. Soejoeno ketika datang di Banjarmasin pada akhir tahun 1940. Resolusi *Pakat Dayak* yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar PD, *Mahir Mahar*, didampingi oleh Sekretaris PB-PD, *E.S. Honduran*, juga berisi tuntutan terbentuknya Daerah Otonom bagi Tanah Dayak. Namun tidak ada tanggapan konkrit atas resolusi tersebut. Hanya diberikan janji akan dibentuk *Kantoor Adviseur Voor Da Jakse Zaken* di Banjarmasin yang dikatakan sebagai langkah pertama untuk persiapan menuju terbentuknya suatu propinsi otonom Dayak di Kalimantan. Namun janji tersebut tidak terlaksana sampai Pemerintah Hindia Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Bala Tentara Dai Nippon (tanggal 8 Maret 1942).²

Pada masa kemerdekaan yakni sesudah pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konperensi Meja Bundar (KMB), pada tanggal 14 Agustus 1950 Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Propinsi

(Propinsi Administratif), satu diantaranya adalah Propinsi Kalimantan. Propinsi Kalimantan meliputi 3 Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Keresidenan Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.

Eks Daerah Otonom Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 Kabupaten yaitu : (1) Kabupaten Kapuas, (2) Kabupaten Barito dan (3) Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam keresidenan Kalimantan Selatan.

Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 Kabupaten : Kapuas, Barito dan Kotawaringin, agar 3 kabupaten tersebut dibentuk menjadi Propinsi Otonom dengan nama *Propinsi Kalimantan Tengah*. Tuntutan yang demikian terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintah Pusat. melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan.³

2. Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah

Tuntutan pembentukan propinsi otonom Kalimantan Tengah yang meliputi 3 kabupaten itu menjadi semakin kuat dan jelas karena keinginan rakyat yang sangat kuat. Pada awal tahun 1954, para warga asal 3-kabupaten itu membentuk Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai Ketua Umum dan J.M. Nahan sebagai Sekretaris Umum. Langkah ini kemudian diikuti dengan pembentukan PPHRKT daerah pada setiap Kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya PPHRKT menjadi pusat penyaluran aspirasi partai politik, organisasi masa dan berbagai golongan yang menghendaki pembentukan Propinsi otonom Kalimantan Tengah.

Pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 1954, ketika Mendagri *Prof Dr Mr Huzairin* menerima delegasi/pengurus PPHRKT di Gubernuran Banjarmasin, tuntutan serupa disampaikan oleh J.M. Nahan selaku jurubicara. Kurang lebih dua bulan kemudian, Panitia Penyalur Hasyat Rakyat Kalimantan Tengah di Sampit pada tanggal 3 Agustus 1954 mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang *Dasar Tuntutan Kalimantan Dibagi 4 Propinsi*.

Setelah mengemukakan uraian betapa mendesaknya tuntutan tentang pembentukan Propinsi Otonom Kalimantan Tengah itu, secara tegas dikemukakan :

“..... maka tuntutan kami rakyat dari daerah pedalaman Kalimantan Tengah hendak mendirikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah patut, adalah tuntutan yang nyata, malahan adil, bukan saja dalam perbandingan dengan pembahagian Propinsi-propinsi yang lain, tetapi pun menunjukkan kepada umum, terutama kepada suatu golongan yang terbelakang didalam segala soal sebagai akibat dari segala penindasan, pemerasan dimasa yang lampau, bahwa kini nasib mereka diperhatikan. Malahan diusahakan mencari segala jalan yang amat pendek untuk masa yang amat singkat memperbaiki nasib mereka dan meninggikan derajat mereka”.

Pernyataan PPHRKT Sampit itu ditanda-tangani oleh Ketua, wakil Ketua dan Penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob.⁴

Pada tingkat Parlemen (DPR-RI Sementara), anggota parlemen asal Kalimantan sesuai harapan dan permintaan Tjilik Riwut (pada waktu itu menjabat Bupati Kotawaringin di Sampit) dan setelah mendapat banyak bahan antara lain dari PPHRKT, dengan gigih memperjuangkan pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah karena pada saat yang sama sedang berlangsung pembahasan RUU Pembentukan 3 Propinsi di Kalimantan oleh Parlemen.

Bahkan satu tahun sebelum itu, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang melangsungkan Kongres di *Bahu Palawa* (masuk dalam wilayah Kecamatan Kahayan Tengah, sedikit di atas Bukit Rawi) pada tanggal 15-22 Juli 1953 mengeluarkan Mosi Nomor 1/Kong/1953 yang disampaikan kepada

Pemerintah pusat casuquo Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan, yang intinya mendesak agar tiga Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin, disatukan dalam status Propinsi, yakni Propinsi Kalimantan Tengah. Kongres itu dipimpin oleh *Damang Sahari Andung* (salah seorang tokoh Dayak dari daerah Tangkahan).⁵

Ternyata aspirasi Rakyat Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Parlemen. Ini diketahui saat berlangsungnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan 3 propinsi di Kalimantan. Alasan yang dikemukakan atas penolakan tersebut diantaranya adalah; potensi ekonomi wilayah di tiga kabupaten yang diusulkan untuk dijadikan Propinsi Kalimantan Tengah itu masih belum mampu untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai daerah otonom; Keadaan keuangan negara saat itu belum mengizinkan untuk membentuk propinsi baru; Dan masih kekurangan sumber daya manusia di daerah itu terutama yang trampil dan terdidik untuk tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Itulah yang dapat diketahui dari pandangan umum para Anggota Parlemen yang mungkin disebabkan oleh kurang-pengetahuan akan kondisi di 3 (tiga) kabupaten itu atau mungkin karena a priori, menjadi tidak senang dengan pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah.

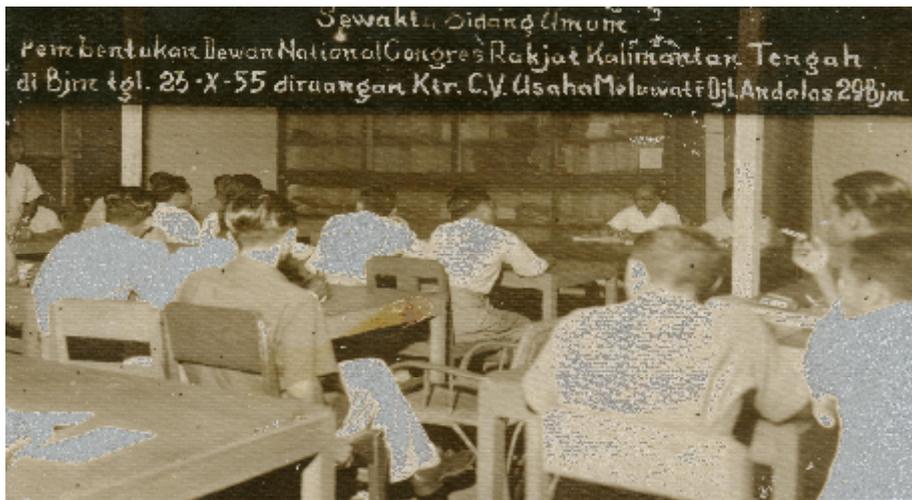
Dan ketika Parlemen (Parlemen/DPR-RI hasil Pemilu 1955) bersidang di Jakarta yang akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 1957, maka Kalimantan dibagi menjadi 3-propinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan UU Nomor 25 Tahun 1956 tersebut hanya menyatakan, bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi propinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun, sebelumnya akan dibentuk terlebih dahulu daerah Keresidenan sebagai persiapan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur itu, Rakyat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Aspirasi rakyat Kalimantan Tengah yang tidak memperoleh perhatian dari Pemerintah Pusat akhirnya berlarut-larut tanpa ada kepastian. Akhirnya timbulah pergolakan dan tindakan kekerasan yang menjurus pada perlawanan fisik berupa gerakan bersenjata yang menimbulkan gangguan keamanan. Gerakan perlawanan yang paling kuat adalah Gerakan Mandau Telawang Pantjasila Sakti (GMTPS) yang dipimpin oleh Christian Simbar.⁶

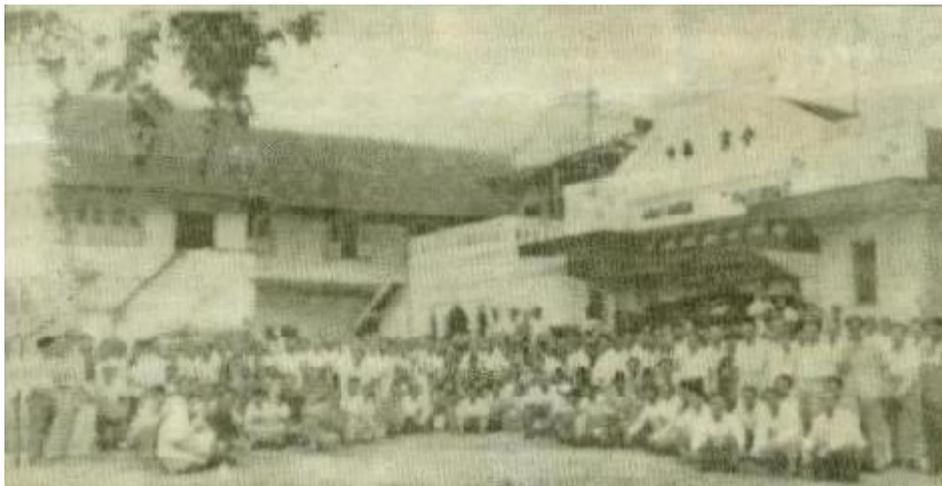
Sementara itu disamping gerakan bersenjata, perjuangan secara politis juga ditempuh oleh tokoh pejuang saat itu dari berbagai golongan masyarakat dari berbagai aliran yang hidup di dalam masyarakat untuk mencapai status propinsi sendiri. Puncaknya adalah pelaksanaan *Kongres Rakyat Kalimantan Tengah* yang dilangsungkan di Banjarmasin dari 2 s.d. 5 Desember 1956. Konggres tersebut dipimpin oleh Ketua Presidium *M. Mahar* dan tokoh masyarakat Kalimantan Tengah lainnya serta dihadiri oleh 600 orang utusan yang mewakili segenap Rakyat dari seluruh Kalimantan Tengah.

Kongres berhasil melahirkan resolusi yang dikeluarkan pada 5 Desember 1956. Diktum resolusi itu adalah :

“ Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan pengertian sebelum terlaksananya *Pemilihan Umum* untuk Dewan Perwakilan Rakyat, *Kalimantan Tengah* sudah dijadikan suatu *Propinsi Otonom*. “



Gambar 1.1. Salah satu persiapan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah
(Sumber : arsip keluarga G. Obus)



Gambar 1.2. Gedung Tiong Hwa Siang Hwee di Banjarmasin, tempat pelaksanaan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Nampak para peserta Kongres sedang berfoto bersama di depan gedung.

(Sumber : arsip Drs. Kaeter Lamey)

Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres terutama tentang resolusi mendesak segera terbentuknya Propinsi Otonom Kalimantan Tengah, dibentuk *Dewan Rakyat Kalimantan Tengah*. Dan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah mengirim utusannya menghadap Gubernur Kalimantan *Raden Tumenggung Aria (RTA) Milono*, selanjutnya utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah bersama-sama Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono menghadap Pemerintah Pusat untuk menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Bersama Gubernur, Dewan Rakyat Kalimantan Tengah memberikan penjelasan-penjelasan guna memperoleh pengertian dan persesuaian pendapat dengan pihak Pemerintah Pusat *casuquo* (terutama untuk mendapat perhatian dari) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Perlu disampaikan disini, bahwa UU Nomor 25 Tahun 1956 belum berlaku, sehingga pada waktu hanya ada satu gubernur untuk seluruh Kalimantan yaitu R.T.A. Milono.

Akhirnya setelah melakukan pertemuan ditemukan persamaan pengertian dan pendapat dari kedua belah pihak. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut dilakukan *Perdamaian Madara* di Barito Selatan antara Pemerintah yang diwakili oleh Ketua Dewan Rakyat Kalimantan Tengah M. Mahar dan Lettu *Wilson Ukur* dengan Pemimpin Gerakan Mandau Telawang Pantjasila Sakti (GMTPS) Christian Simbar.

Pada tanggal 10 Desember 1956, Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan/Gubernur Kalimantan RTA. Milono menyampaikan pengumuman tentang terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah meliputi daerah-daerah Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin. Dengan demikian maka tuntutan Rakyat Kalimantan Tengah dianggap telah tercapai.

Dalam pada itu sebagai tindak lanjut atas adanya saling pengertian dan persesuaian pendapat antara utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Pusat, maka pada tanggal 28 Desember 1956, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor U.P.34/41/24 yang antara lain menyatakan

terbentuknya *Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah* yang berkedudukan langsung dibawah Kementerian Dalam Negeri. Kantor persiapan tersebut untuk sementara ditempatkan di Banjarmasin serta ditunjuk 21 orang personil sebagai pelaksana dan sementara berkantor di kantor Gubernur Kalimantan.

Gubernur R.T.A. Milono ditunjuk sebagai *Gubernur Pembentuk* Propinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut urusan Pemerintah Pusat bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri sedang urusan Daerah Otonom bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan. Selanjutnya *Tjilik Riwut*, (pada waktu itu menjabat sebagai Residen pada Kementerian Dalam Negeri) dan *G. Obus*, Bupati Kepala Daerah Kapuas, ditugaskan membantu Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin, sekaligus Bupati G. Obus diangkat sebagai Kepala Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah. Drs F.A.D. Patianom ditunjuk sebagai Sekretaris Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah. Residen Tjilik Riwut dan Bupati G. Obus membantu Gubernur R.T.A. Milono agar pembentukan Propinsi Otonom Kalimantan Tengah dapat terlaksana dalam waktu secepatnya. Nama Bupati G. Obus diabadikan sebagai nama salah satu jalan di sekitar Bundaran Kecil (dengan nama G. Obos), setelah melalui penelitian pustaka dapat dipastikan bahwa ejaan yang benar untuk nama beliau adalah *G. Obus*.

3. Mencari Ibukota untuk Propinsi Baru⁷

Gubernur RTA. Milono selaku Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah beserta para pembantunya serta tokoh-tokoh Masyarakat/Rakyat Kalimantan Tengah pada umumnya mempunyai keinginan untuk selekas mungkin berada ditengah-tengah Rakyat Kalimantan Tengah sendiri. Namun demikian, ibukota propinsi yang baru dibentuk itu belum ditetapkan. Akan tetapi setelah

terbentuknya kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin itu, maka “ramailah suara-suara”, tuntutan-tuntutan serta pernyataan dari parpol/ormas yang berasal dari Daerah masing-masing menurut gaya dan iramanya sendiri-sendiri pula, meminta agar Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan didaerah masing-masing.

Dari daerah Barito minta agar Muara Teweh atau Buntok menjadi ibukota, Daerah Kahayan dan Kapuas menghendaki Kuala Kapuas atau Pulang Pisau sebagai Ibukota. Masyarakat dari daerah Katingan, Mentaya dan Seruyan menghendaki kota Sampit menjadi Ibukota. Demikian pula daerah Pangkalan Bun tidak ketinggalan memberikan saran/tuntutan agar Pangkalan Bun yang menjadi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono selanjutnya mengambil suatu kebijaksanaan membentuk Panitia untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang pantas/wajar untuk dijadikan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Panitia yang dibentuk pada tanggal 23 Januari 1957 terdiri dari :

- a. *Mahir Mahar*, Ketua Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b. *Tjilik Riwut*, Residen pada Kementerian dalam Negeri diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Anggota.
- c. *G. Obus*, Bupati Kepala Daerah diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Anggota.
- d. *E. Kamis*, Pensiunan Korps Pamong Praja/kiai (Wedana) dan Pimpinan PT Sampit Dayak di Sampit, sebagai Anggota.
- e. *C. Mihing*, Pegawai/Pejabat pada Jawatan Penerangan Propinsi Kalimantan di Banjarmasin sebagai Sekretaris merangkap Anggota,
dan sebagai Penasihat ahli adalah :

- a. *R. Moenasier*, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Persiapan Propinsi Kalimantan Tengah.
- b. *Ir. D.A.W. van Der Pijl*, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Persiapan Propinsi Kalimantan Tengah/Kepala Bagian Gedung-gedung.

Sesudah Panitia mengadakan rapat-rapat serta menghubungi tokoh-tokoh Kalimantan Tengah, serta para pejabat baik Militer maupun Sipil tingkat Kalimantan di Banjarmasin antara lain Kolonel *Koesno Utomo* (pada waktu itu adalah Panglima Tentara dan Teritorium VI/Tanjungpura), diperoleh kesimpulan sementara : “*Sekitar desa Pahandut, dikampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah*”.

Alasan yang menjadi dasar pemilihan tempat tersebut menjadi calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut :

- (1) Karena ada perbedaan pendapat tentang calon-calon ibukota misalnya ada yang mengusulkan : Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Buntok Muara Teweh, Sampit dan Pangkalan Bun maka dipandang perlu dicari suatu kebijakan untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut.
- (2) Panitia berpendapat pula karena alasan penutupan (1) diatas perlu sekali mencari jalan keluar yaitu mencari daerah baru yang dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Kalimantan Tengah dan pejabat-pejabat Pemerintah Tingkat Kalimantan.
- (3) Panitia pun berpendapat, alangkah baiknya jika calon ibukota berada ditengah-tengah masyarakat seluruhnya untuk memudahkan melaksanakan pimpinan dan koordinasi pada masa-masa yang akan datang dan memiliki satu kota baru yang dibangun ditengah-tengah hutan rimba dengan kekuatan bangsa sendiri dialam merdeka.
- (4) Dan lain-lain alasan dipandang dari sudut politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan psikologis.

Jika diperhatikan alasan-alasan tersebut sangat lekat dengan suasana kekeluargaan yang berkembang pada waktu itu. Secara kebetulan atau tidak, alasan seperti ini yang digunakan oleh Rakyat Australia dalam memilih ibukota. Pada saat Rakyat Australia harus memilih ibukota negara, maka terjadi “perebutan” antara Kota Sidney dan Kota Melbourne (dua kota terbesar di Australia). Namun akhirnya ditetapkan Canberra, daerah baru yang terletak diantara kedua kota tersebut.

Pada akhir bulan Januari 1957, Panitia yang dipimpin oleh Ketuanya M Mahar berangkat menuju daerah calon ibukota untuk mengadakan penelitian, observasi, pengamatan serta pembicaraan-pembicaraan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hasil dari peninjauan/penelitian lapangan atas calon ibukota tersebut dilaporkan kepada Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya dilaporkan juga kepada Pemerintah Pusat. Akhirnya disetujui sepenuhnya bahwa daerah tersebut menjadi calon Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Ini berarti, lokasi disekitar Desa Pahandut antara Kampung Bukit Jekan dan Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Akhirnya dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1284 tertanggal 23 Mei 1957 dibentuklah Propinsi Kalimantan Tengah. Secara Lengkap UUDrt pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah adalah : *Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur*. Pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut. Selanjutnya tanggal 23 Mei diperingati sebagai *Hari Jadi Propinsi Kalimantan Tengah*.

Tentang kelahiran Propinsi Kalimantan Tengah ini, Gubernur RTA. Milono mengatakan : “Kelahiran Propinsi Kalimantan Tengah merupakan propinsi yang

ke-17, dilahirkan oleh Kabinet Karya, Kabinet Republik Indonesia yang ketujuhbelas”.⁸ Banyak saksi sejarah dan masyarakat di Propinsi Kalimantan Tengah menganggap angka 17 sebagai angka yang cukup penting karena berbagai peristiwa penting yang terjadi seringkali berkaitan dengan angka 17. Secara ringkas dapat dilihat pada kotak 1 yang disusun oleh TT. Suan.

Kotak 1 : Kehadiran Angka 17 di tengah Masyarakat Kalimantan Tengah

I. PEMBENTUKAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Mengamati sekitar terbentuknya Propinsi Otonom Kalimantan Tengah dan Pembangunan Kota Palangka Raya, nampak hal yang cukup menarik, yakni “*kehadiran angka 17*”

1. Propinsi Kalimantan Tengah sewaktu dibentuk merupakan *Propinsi yang ke-17*, lahir dari Kabinet Karya, Kabinet RI yang ke-17.
2. Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut, pada waktu itu, jika dihitung mulai dari Muara Sungai Kahayan ke hulu adalah *desa/kampung yang ke-17*; Dan Pahandut sebagai ibukota Kecamatan Kahayan Tengah merupakan wilayah Kabupaten Kapuas yang beribukota di Kuala Kapuas. Jika dihitung dari Kota Kuala Kapuas melalui Anjir Kalaman adalah *desa/kampung yang ke-17*. Pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya dilaksanaka Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957.
3. Lebih kurang setahun setelah dibentuknya Propinsi Kalimantan Tengah, pada Bulan Oktober 1958 dilangsungkan Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan anggota DPRD I dan DPRD II, maka terpilihlah 17 orang anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah yang pertama kali.
4. Kota Palangka Raya, ibukota Propinsi Kalimantan Tengah diresmikan menjadi Kotapraja otonom pada tanggal 17 Juni 1965.

II. KO-INSIDENSI

Kehadiran angka 17 mungkin hanya secara kebetulan (*toe valig*) atau ko-insidensi belaka tanpa arti dan makna. Namun kehadiran angka 17 itu adalah kenyataan dalam perjalanan waktu lintasan sejarah warga Bumi Tambun Bungai, baik pada masa silam maupun sesudah lahirnya Propinsi Kalimantan Tengah. Pada masa silam, kehadiran angka 17 terlihat sebagai berikut :

1. Perdamaian Tumbang Anoi (dalam notulen Belanda dinamakan “Pertemuan Tumbang Anoi), yang kemudian disebut “Rapat Damai Tumbang Anoi” berlangsung pada bulan Mei-Juli 1894. Rapat sesungguhnya telah selesai pada tanggal 17 Juli 1894 dan menghasilkan beberapa keputusan penting. Namun untuk menghormati kedatangan beberapa Kepala Suku/Kepala Adat yang masih akan hadir, upacara penutupan dilakukan pada tanggal 24 Juli 1894.
2. Pada masa pendudukan militer Jepang, di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 1943 diresmikan berdirinya BAKEDA (Badan Kesenian Dayak) yang kegiatannya antara lain berupa pertunjukan (pagelaran) kesenian berupa tari-tarian dan lagu.

Kotak 1 : Lanjutan

3. Pertempuran antara pasukan (reguler) TNI/MN 1001 melawan pasukan gabungan kerajaan Belanda yang terdiri dari *Koninklijk Landmacht* (terdiri dari Belanda semata) dan *KNIL/Koninklijk Nederland Indische Leger* (pasukan yang pemimpinnya orang Belanda dan anggotanya campuran) terjadi pada tanggal 17 September 1946 di Tumbang Manjul (sekarang Kabupaten Seruyan).
4. Sebelumnya di Tumbang Samba (sekarang wilayah Kabupaten Katingan) terjadi pertempuran antara lasykar TKR (Tentara Keamanan Rakyat) lokal melawan pasukan KNIL/NICA Belanda pada tanggal 17 Januari 1946. Dari pihak TKR Lokal gugur Haji Ikap.
5. Di Istana Kepresidenan (Gedung Agung) Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1946 dilaksanakan upacara Adat Sumpah Setia Suku Dayak dipimpin oleh Tjilik Riwut dan kawan-kawan mewakili 142 suku Dayak pedalaman Kalimantan. Upacara itu dihadiri dan disaksikan oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden M. Hatta, para Menteri Republik Indonesia, Panglima Besar APRI Jendral Soedirman, para Kepala Staf Angkatan, Kepala Polisi Negara RI serta para pejabat tinggi sipil dan militer.
6. Sepuluh bulan kemudian, dilakukan penerjunan pertama Pasukan Payung AURI di sekitar Desa Sambi Kotawaringin (sekarang masuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat) pada tanggal 17 Oktober 1947 dalam rangka menegakkan kedaulatan Pemerintah RI di Kalimantan. Komandan Pasukan Payung tersebut adalah Mayor Tjilik Riwut, yang juga merupakan Komandan Pasukan MN-1001 TNI pada Markas Besar Tentara (MBT) Mobiel Brigade TNI di Yogyakarta.

Sumber : T.T. Suan

Dengan diterbitkannya UUDrt Nomor 10 Tahun 1957 pada tanggal 23 Mei 1957, maka berakhir lah tugas R.T.A. Milono selaku *Gubernur Pembentuk* Propinsi Kalimantan Tengah dan berakhir pula keberadaan *Kantor Persiapan Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah* yang terletak di Jalan Taman Sari Nomor 1 Banjarmasin. R.T.A. Milono selanjutnya tetap menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah. Jabatan tersebut berlangsung sampai saat serah terima jabatan dengan Tjilik Riwut pada tanggal 30 juni 1958. Residen Tjilik Riwut ditunjuk selaku Pejabat Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah, sementara R.T.A. Milono terpilih oleh DPRD Jatim sebagai Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur.

CATATAN KAKI :

¹ Anonim. 1997. *Panca Windu Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Palangka Raya. Hal. 27. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang menyusun Buku Sejarah Kalimantan Tengah dimana materi ini juga tertuang di dalamnya.

² Anonim. 1982. *Sejarah Kabupaten Kapuas*. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas. Kuala Kapuas. Hal. 29.

³ Tjilik Riwut. 1958. *Kalimantan Memanggil*. Endang. Jakarta. Hal. 100-120

⁴ Anonim. 1997. *Op. cit.* hal. 30-32

⁵ Anonim. 1997. *Op.Cit.* hal. 33

⁶ Anonim. 1997. *Op.Cit.* hal. 34-35. Khusus mengenai peranan GMTPS dalam sejarah Propinsi Kalimantan Tengah, seorang pelaku sejarah Bapak Tjoembi Laman membuat sebuah naskah singkat. Lihat Tjoembi Laman. 2001. *Sejarah Singkat Perjuangan Rakyat dalam Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah* Palangka Raya. Maanuskrp tidak diterbitkan.

⁷ . Bagian ini dirujuk dari Mahir Mahar, G. Obus dan Tjilik Riwut. 1970. *Sejarah Singkat Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah dan Perletakan Batu Pertama Kota Palangka Raya*. Manuskrip. Tidak diterbitkan.

⁸ Pidato Radio Gubernur RTA. Milono berkenaan dengan terwujudnya Propinsi Otonom Kalimantan Tengah dikutip dalam lampiran 1 buku ini.

BAB II

CIKAL BAKAL KOTA PALANGKA RAYA

1. Tata Pemerintahan Abad 18 dan 19

Tercatat dalam Buku Sejarah Propinsi Kalimantan Selatan¹ bahwa Sultan Banjarmasin Sultan Tahmidullah II pada tahun 1787 menyerahkan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan kepada VOC (*Verenigde Oost Indische Company*) yang ditandai dengan Akte Penyerahan (*Acte van afstand*) tertanggal *Kayutangi, 17-8-1787*. Akte penyerahan tersebut ditandatangani oleh Sultan Tahmidullah di depan Residen Walbeck. Hal ini terjadi setelah Sultan Tahmidullah berhasil menguasai tahta kerajaan dengan bantuan VOC dan selanjutnya Kerajaan Banjarmasin menjadi daerah taklukan VOC.

Berdasarkan akte penyerahan tersebut, Sultan Tahmidullah juga menyerahkan status wilayah kekuasaannya termasuk Daerah-Daerah Dayak (*Dajaksche provintien*) ke bawah kekuasaan VOC. Setelah VOC dinyatakan bangkrut dan bubar, selanjutnya penguasaan daerah bekas taklukan VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda melalui Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia (sekarang Jakarta). Dengan demikian, daerah Dayak juga berada di bawah kekuasaan Gubernur Jendral Hindia Belanda.

Pada tanggal 1 Januari 1817, ditandatangani *Kontrak Persetujuan Karang Intan I* oleh Sultan Sulaiman di depan Residen Aernout van Boekholtz dari Pemerintah Hindia Belanda. Enam tahun kemudian, yakni tanggal 13 September 1823, dilakukan alterasi dan ampliasi (perubahan, peralihan, penambahan, perluasan dan penyempurnaan) yang dikenal dengan nama *Kontrak Persetujuan Karang Intan II*. Kontrak tersebut juga ditandatangani oleh Sultan Sulaiman di depan Residen Mr. Tobias.

Berdasarkan Kontrak persetujuan kedua ini, Sultan melepaskan secara penuh hak-haknya atas seluruh kawasan di Kalimantan yang dianggap sebagai wilayah Kerajaan Banjarmasin itu, termasuk yang disebut Belanda sebagai Daerah-Daerah Dayak (*Dajaksche provintien*). Pihak Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan pemetaan di kawasan *Dajaksche provintien*. Sungai Kahayan dalam pemerintahan Belanda disebut *Groote Dajak Rivier* sedang Sungai Kapuas disebut *Kleinee Dajak Rivier*

Sebelum adanya Akte Penyerahan Kayutangi tersebut, wilayah *Dajaksche provintien* yang kini dikenal sebagai wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, tidak langsung dikuasai VOC. Ketika Perang Banjar (1859-1865) usai dengan Belanda sebagai pemenangnya, suku Dayak masih melanjutkan pertempuran melawan Belanda yang dikenal dengan nama *Perang Barito* (1865-1905). Tetapi akibat akte penyerahan serta Kontrak Perjanjian Karang Intan I dan II, tertancaplah kekuasaan penjajah Belanda di Kalimantan.

Namun penguasaan wilayah yang sangat luas itu tidak berlangsung mulus. Belanda mengalami kekurangan tenaga dalam mengelola pemerintahan meskipun telah dilakukan pembagian wilayah. Belanda kemudian membatasi kekuasaan langsungnya pada tingkat *Onderafdeling* saja, sedangkan untuk pemerintahan *distrik* dan *Onderdistrik*, Belanda menggunakan para petinggi suku Dayak. Beberapa Tamanggung dan Damang diangkat menduduki jabatan Kepala *distrik* dan Kepala *Onderdistrik*.

Sejak tahun 1823, kawasan yang disebut wilayah Dayak (*Dajaksche provintien*) dimasukkan dalam wilayah yang disebut *Kapoeas-Moeroeng gebied*, yang merupakan bagian dari *Afdeling* Marabahan yang berkedudukan di Marabahan dan dikepalai oleh seorang residen. *Afdeling* Marabahan membawahi beberapa *Onderafdeling*, salah satu diantaranya adalah *Onderafdeling* Koeala Kapoeas yang dipimpin seorang *Controleur*. Salah satu *distrik* dilingkup *Onderafdeling* Koeala Kapoeas adalah *Distrik Pangkoh* yang berkedudukan di Pangkoh. Wilayah distrik

Pangkoh meliputi seluruh aliran Sungai Kahayan, dan pada tahun 1872 dipimpin oleh *Tamanggong Rambang* sebagai kepala distrik.

Memasuki abad 20 (tahun 1913), kawasan Kapoeas-Moeroeng gebied dibentuk menjadi 2 *afdeling* yaitu (1) *afdeling Dajaklanden* (Tanah Dayak) berkedudukan di Banjarmasin, dan (2) *afdeling Dusunlanden* (Tanah Dusun) berkedudukan di Muara Teweh. Distrik Pangkoh yang sebelumnya membawahi seluruh aliran Sungai Kahayan dihapuskan dan dibentuk 2 *onderafdeling*, yaitu (1) *onderafdeling Boven Dajak* berkedudukan di Kuala Kurun, dan (2) *onderafdeling Beneden Dajak* berkedudukan di Kuala Kapuas. Desa/kampung Pahandut terletak dalam *onderafdeling Beneden Dajak*. Kedua *onderafdeling* termasuk dalam lingkup *afdeling Dajaklanden*.

Setelah proklamasi (1946), *afdeling* Kapuas-Barito beserta seluruh *onderafdeling*-nya dihapus. Bekas wilayah *onderafdeling Beneden Dajak* dipecah menjadi 2 distrik, yaitu : (1) Distrik Kapuas dan (2) Distrik Kahayan. Distrik Kahayan itu sendiri terbagi menjadi 2 onderdistrik, yaitu (1) Onderdistrik Kahayan Hilir dengan ibukota Pulang Pisau, dan (2) Onderdistrik Kahayan Tengah dengan ibukota Pahandut. Kepala Onderdistrik Kahayan Tengah yang pertama adalah *G.T. Binti*.

Sesudah pemulihan kedaulatan dan Propinsi Kalimantan Tengah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sebutan distrik diganti menjadi *kawedanan*, sedangkan onderdistrik diganti menjadi *kecamatan*. Onderdistrik Kahayan Tengah berganti menjadi Kecamatan Kahayan Tengah dengan ibukota Pahandut. Setelah Pahandut ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Kahayan Tengah dipindahkan ke Bukit Rawi.

2. Asal-usul Kampung Pahandut

Kampung Pahandut² merupakan salah satu kampung tertua di daerah aliran sungai Kahayan bagian hilir, seperti halnya kampung Maluku, Pulang Pisau, Buntoi, Penda Alai dan Gohong. Konon dikisahkan bahwa karena keadaan tanah lahan bertani dan berkebun di *Lewu Rawi* (kemudian di kenal dengan nama lewu Bukit Rawi) tidak cocok, tersebutlah pasangan suami-isteri *Bayuh* dan *Kambang* memutuskan untuk mencari kawasan lain. Mereka kemudian *milir* (mendayung perahu ke arah hilir) menyusuri Sungai Kahayan yang akhirnya menemukan tempat yang cocok, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Khabar tentang tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian serta perbaikan kehidupan kedua suami istri tersebut terdengar oleh warga masyarakat *lewu Rawi* yang lain sehingga banyak sanak keluarga yang berasal dari kampung tersebut bahkan bahkan warga dari kampung/desa lain mengikuti jejak Bayuh dan Kambang pindah ke daerah baru itu.

Akhirnya tempat tersebut berubah menjadi kawasan berusaha “*metik*” hasil hutan (bahasa Dayak Ngaju : *eka satiar*, sekaligus membuka lahan untuk bertani, yang disebut *eka malan*) kemudian berkembang menjadi tempat berusaha bertani dan berkebun lalu menjadi tempat permukiman. Dalam bahasa Dayak Ngaju hal yang demikian dinamakan *Eka Badukuh*, para warga menyebutnya Dukuh *ain Bayuh*, singkatnya permukiman itu disebut *Dukuh Bayuh*.

Demikian Dukuh Bayuh (*dukuh, Badukuh* tidak sama dengan pengertian *Dukuh* dalam masyarakat Jawa, yang berarti lebih merupakan anak-desa atau desa cabang) semakin lama semakin berkembang maju, karena ternyata daerah itu dan sekitarnya memiliki sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya antara lain lokasi pemungutan hasil hutan seperti damar, getah *jelutung* (pantung), getah *hankang, katiau*, dan rotan serta perairan sungai yang kaya dengan berbagai jenis ikan terutama dikawasan Dataran Aliran Sungai (DAS) Sebangau.

Dalam pada itu Dataran *pematang* (tanah tinggi) terbentang dari sungai Kahayan menuju sungai Rungan disebut *tangking* terkenal dengan nama Bukit Jekan (*Jekan* baca seperti *jejer*) dengan tanah berbukit di Tangkiling pada kawasan tepi Barat sungai Kahayan, sedangkan di bagian Timur, terdapat danau besar yang dinamakan *Danau Tundai* dengan jumlah dan jenis ikan yang melimpah. Pada kawasan hulu dan hilir dari Dukuh Bayuh tersebut juga terdapat puluhan danau kecil yang banyak ikannya. Semuanya merupakan sumber mata pencaharian dan kehidupan warga Dukuh Bayuh sekaligus menjadi daya tarik bagi pendatang dari daerah lain untuk ikut berusaha di dukuh itu. Maka berubahlah Dukuh Bayuh yang semula hanya tempat berusaha : bertani dan berkebun menjelma menjadi *lewu* (desa), dan Bayuh tetap sebagai *Pambakal* (Kepala Desa). Dukuh Bayuh yang berkembang maju tersebut telah menjadi *Kampung* (Desa) dengan kehidupan warga makmur dan sejahtera.

Sementara itu diceritakan bahwa terdapat seorang tokoh yang disegani oleh seluruh warga masyarakat Dukuh Bayuh karena mempunyai kelebihan yang sangat menonjol. Sang tokoh dianggap memiliki “kesaktian” dan “ilmu” serta oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai “orang pintar” Masyarakat Dukuh Bayuh bahkan masyarakat dari daerah lain sering minta pertolongan pada sang tokoh tentang berbagai hal. Sang Tokoh tersebut mempunyai anak-sulung laki-laki yang bernama *Handut*; dan sesuai adat orang Ngaju yang menganut ujaran *teknonomi*, yakni sepasang suami istri yang sudah berumah tangga dan sudah mempunyai anak, biasa disapa (dipanggil) secara akrab memakai nama anak sulung. Maka tokoh Desa Bayuh yang “berilmu” itu sangat akrab disapa *Bapa Handut*.

Ketika usianya sudah lanjut, *Bapa Handut* sering sakit-sakitan, dan ketika keadaan sakitnya sudah parah nampaknya sulit menghembuskan nafas terakhir. Warga Desa Bayuh merasa cemas dan prihatin atas penderitaan sang tokoh yang mereka hormati. Akhirnya kehendak Tuhan pun terjadi dan wafatlah *Bapa Handut*

diiringi kesedihan dan isak tangis seluruh warga. Tokoh yang dihormati dan disegani telah tiada.

Guna mengenang dan menghormati sang tokoh yang sangat berpengaruh tersebut, semua warga masyarakat setuju Desa Bayuh diubah namanya menjadi Desa *PAHANDUT* (yang berasal dari kata *Bapa Handut* – panggilan akrab Sang Tokoh). Siapa nama asli Sang Tokoh itu, ternyata orang keturunan “asli” desa Pahandut tidak dapat memberi jawaban.

Dalam arsip Pemerintah Hindia Belanda nama Desa Pahandut tercatat dalam laporan *Zacharias Hartman*, seorang pejabat Pemerintah Hindia Belanda yang melakukan perjalanan menyusuri Sungai Kahayan dan Sungai Kapuas pada Bulan Oktober 1823. Dalam laporan perjalanannya, Orang Belanda pertama yang langsung menginjakkan kaki pada DAS Kahayan dan Kapuas tersebut menyebutkan Desa Pahandut sebagai salah satu desa yang dikunjungi.

Keberadaan Kampung Pahandut juga dilaporkan oleh para misionaris (para pengabar Injil) dari Jerman. Pada tahun 1859, Kampung Pahandut tercantum dalam peta yang dibuat para misionaris tersebut, dan Kampung Pahandut merupakan salah satu pangkalan (*stasi*) dari kegiatan penyebaran agama Kristen di sepanjang Sungai Kahayan. Laporan selanjutnya dari para misionaris menyebutkan bahwa pada tahun 1896, *Misionar* G.A. Alt bertugas di Stasi Pahandut, dan telah terbentuk jemaah Kristen dengan berdirinya bangunan gereja di Kampung itu. Letak bangunan gereja tersebut diperkirakan berada di Jalan Kalimantan sekarang. Pada tahun 1974, bangunan gereja yang terletak di tengah jalan tersebut, dibongkar untuk keperluan pembangunan dan pengaspalan jalan.

Dari notulen rapat Tumbang Anoi (tahun 1894) disebutkan bahwa di kampung Pahandut telah berdiri sebanyak 8 (delapan) buah rumah panjang (*betang* – rumah adat suku Dayak). Jika satu rumah betang berisi 5 (lima keluarga), maka paling sedikit Kampung Pahandut pada waktu itu telah dihuni oleh 40 keluarga. Ini berarti, kampung itu sudah cukup ramai.

3. Ngabe Anum Soekah

Ikhwal pasangan suami-istri Bayuh-Kambang, mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama *Jaga* sedang adiknya bernama *Soekah*. Bayuh sampai hari tuanya tetap dipercayakan sebagai Kepala Desa Pahandut dan di usia senjanya, Bayuh mengharapkan salah satu dari kedua putranya untuk menggantikannya sebagai kepala kampung.

Jaga sebagai anak tertua (sulung) tidak dapat menolak. Sebenarnya Jaga mengharapkan adiknya, Soekah, yang menggantikan kedudukan/jabatan ayah mereka, namun karena Soekah menolak dengan alasan, dia masih mau merantau (mengembara alias berkelana), akhirnya Jaga diangkat menjadi Kepala Kampung Pahandut (*Pambakal*).

Dalam pengembaraannya itulah, pemuda Soekah sampai di Puruk Cahu. Ketika itu *Tamanggung Wangkang* sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda yang dikenal dengan *Perang Wangkang*, sekitar tahun 1870. Pemuda Soekah pun membantu dan maju ke medan laga, bertempur melawan serdadu Belanda.

Sekembali Soekah dari pengembaraannya dan berkumpul kembali dengan keluarganya di Pahandut, Soekah terpilih menjadi *Pambakal*/Kepala Kampung Pahandut menggantikan kakaknya, Jaga. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Pahandut, atas jasa-jasanya dalam memimpin dan membina Desa Pahandut, sehingga seluruh warganya dapat menikmati kehidupan makmur dan sejahtera, Pemerintah Hindia Belanda memberi gelar *NGABE ANUM* kepada Soekah. Dengan demikian, *Pambakal* Desa Pahandut adalah *Ngabe Anum Soekah*. Namun sebutan yang lebih terkenal dalam masyarakatnya adalah sebutan akrab tetapi mengandung rasa hormat yaitu *Ngabe Soekah*. Berdasarkan informasi H. Basrin Inin, pada masa kepemimpinan Ngabe Soekah, Kampung Pahandut menjadi kampung yang paling ramai dikunjungi pendatang dan tercipta perdamaian, keamanan dan kenyamanan

dari penduduknya yang berasal dari berbagai suku, ras dan agama.³ *Sandung* Ngabe Soekah terletak di pertigaan Jalan Darmosugondo dan Jalan Dr. Murjani (di depan terminal sementara). Sebelumnya telah didirikan sandung oleh Bayuh pada tahun 1783, kemudian dipugar menjadi lebih besar oleh Ngabe Soekah pada tahun 1848. Pada waktu itu, lokasi sandung Ngabe Soekah ini dinamakan dengan *Bukit Ngalangkang*. Di kemudian hari banyak peristiwa mengambil tempat di Bukit Ngalangkang ini misalnya pengumuman nama Kota Palangka Raya dan peresmian Kotapraja Palangka Raya sebagai daerah otonom.⁴

Pada masa kepemimpinan Ngabe Soekah, salah seorang cucunya yang bernama *Herman Syawal Toendjan* (HS. Toendjan) diangkat menjadi Damang. Sesudah Ngabe Soekah berusia lanjut, ditunjuk cucunya yang lain yang bernama *Willem Dean* sebagai kepala kampung selama 2 tahun, selanjutnya sekitar tahun 1940 diangkat *Abd Inin* (anak ketiga dari Ngabe Soekah) sebagai kepala kampung yang baru. Abd Inin (kepala kampung) dan HS. Toendjan (Damang), berkenalan dengan Tjilik Riwut dalam perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertemuan kembali ketiga sahabat tersebut terjadi lagi sekitar tahun 1957, ketika Tjilik Riwut beserta 7 orang tokoh yang ditugaskan untuk mencari ibukota Propinsi Kalimantan Tengah berkunjung ke Kampung Pahandut.⁵



Gambar 2.1.

Sandung Ngabe Soekah di Bukit Ngalakang. Ngabe Soekah adalah Pemuka Masyarakat Pahandut Yang Banyak Jasanya Dalam Memajukan Kehidupan Masyarakat.

4. Pahandut menjadi Palangka Raya

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Panitia yang bertugas untuk merumuskan dan mencari daerah atau tempat yang pantas/wajar untuk dijadikan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, yang telah mendapat dukungan serta perhatian dari Para pejabat teras Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan serta Pemuka-Pemuka Masyarakat Kalimantan Tengah, telah menjatuhkan pilihan dan menetapkan PAHANDUT sebagai Calon Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah.⁶

Pemuka-Pemuka dan Tokoh-tokoh Masyarakat Pahandut setelah mengetahui bahwa Pahandut, desa mereka, akan dijadikan sebagai calon Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah menyambut dengan sangat antusias. Namun mereka juga menyadari bahwa untuk pembangunan fisik dari Ibukota Propinsi diperlukan modal yang tidak kecil dan dengan spontan mereka menyerahkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, hak-hak atas tanah-tanah perwatanan milik mereka, untuk dipergunakan dalam Pembangunan Ibukota.

Sambutan masyarakat yang sangat antusias tersebut diwujudkan dan dituangkan dalam suatu PERNYATAAN pada tanggal 30 Januari 1957, yang menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pernyataan para *tetuha* dan pemuka masyarakat Pahandut dikutip pada kotak 2 berikut.

Kotak 2 : Pernyataan Masyarakat Pahandut kepada Tim Pencari Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah

PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, ialah para Tetuha dan Pemuka Rakyat di Pahandut (Kecamatan Kahayan Tengah) setelah mengetahui dan mendengar, bahwa pihak Pemerintah ada mempunyai hasrat untuk menjadikan Pahandut sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah, maka dengan ini kami menyatakan kegembiraan dan terima kasih yang tidak terhingga terhadap hasrat Pemerintah tersebut.

Menurut pengetahuan kami, memang Pahandut adalah satu-satunya daerah yang cocok sekali untuk dibangun menjadi Ibu Kota, baik dilihat dari segi pembangunan, maupun dari segi perhubungan antar Daerah di Wilayah Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu, kami mengharap supaya hasrat Pemerintah yang hendak menjadikan Pahandut sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah, diteruskan hingga menjadi kenyataan.

Kami para Tetuha dan para Pemuka Rakyat Pahandut akan membantu sepenuhnya dan menegaskan pula di sini, bahwa tanah-tanah yang diperlukan untuk pembangunan Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah sepanjang kebutuhannya, kami bersedia untuk memberikannya dengan senang hati, dan tidak akan meminta pembayaran apa-apa, kalau seandainya ada sebagian kecil yang sudah menjadi milik Rakyat,

Pahandut, 30 Januari 1957

Tanda Tangan Kami,

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Abd. Inin | d.t.t. <u>Abd. Inin</u> |
| 2. St. Rasad | d.t.t. <u>St. Rasad</u> |
| 3. H. Tundjan | d.t.t. <u>H. Tundjan</u> |
| 4. Buntit Sukah | d.t.t. <u>Buntit Sukah</u> |
| 5. Dinan Gani | d.t.t. <u>Dinan Gani</u> |
| 6. J. Rasan | d.t.t. <u>J. Rasan</u> |
| 7. Tueng Kaling | d.t.t. <u>Tueng Kaling</u> |

Pernyataan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yth. Gubernur/Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Yth. Acting Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Inspeksi Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan.
4. Badan Pekerja Dewan Rakyat Kalimantan Tengah.

Dikutip dari : Tjilik Riwut (1958) *Kalimantan Memanggil*. Endang. Jakarta.
Catatan : Singkatan dari nama Damang H.S. Tundjan dalam buku tersebut memang hanya H. Tundjan (tanpa huruf S), namun dipastikan bahwa yang dimaksud adalah Damang Herman Syawal Tundjan (H.S. Tundjan).

Dalam kenyataan sesungguhnya setelah pembangunan Kota Palangka Raya di mulai, tidak hanya masyarakat di Kampung Pahandut saja yang merelakan tanahnya untuk digunakan bagi pembangunan fisik Kota Palangka Raya. Masyarakat dari kampung Jekan juga ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan tanahnya untuk pembangunan Kota Palangka Raya.⁷ Sampai tahun 1957, Kampung Pahandut memiliki 7 (tujuh) dukuh yaitu Kereng, Petuk Ketimpun, Hampapak, Tumbang Rungan, Jekan, Marang dan Tahai. Di Kampung Pahandut tinggal 14 keluarga besar dan di Dukuh Jekan tinggal 6 keluarga besar. Jumlah penduduk Kampung Pahandut ketika itu kira-kira 500-600 jiwa.⁸

Nama Pahandut setelah ditetapkan menjadi ibukota Propinsi Kalimantan Tengah masih harus dicari, nama tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembangunan kota tersebut. Namun untuk sementara dinyatakan bahwa ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut.⁹ Guna mencari nama ibukota propinsi tersebut, Gubernur RTA. Milono menugaskan Panitia yang sama dengan Panitia yang mencari dan merumuskan calon Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah untuk mencari nama bagi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Panitia terus bekerja keras untuk mencari nama bagi ibukota itu. Mereka mengumpulkan berbagai pendapat dari bermacam-macam kalangan antara lain pendapat/pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah seperti Damang H.S. Tundjan, Damang Saililah dan Tjilik Riwut termasuk saran dan pandangan dari Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah RTA. Milono.

Akhirnya, nama ibukota itu berhasil disepakati dan disetujui sepenuhnya oleh Gubernur RTA. Milono dan kepastian tentang nama itu akan diumumkan sendiri oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah.

Demikianlah kurang lebih 4 bulan kemudian, dengan didahului upacara adat dari suku dayak yang bertempat dilapangan *Bukit Ngalangkang*, Pahandut

pada tanggal 18 Mei 1957 diumumkan nama ibukota propinsi Kalimantan Tengah. Gubernur RTA. Milono dalam pidatonya antara lain mengemukakan cita-cita beliau bahwa untuk memberi nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah harus disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih adalah ***PALANGKA RAYA***.



Gambar 2.2.

Gubernur Milono ketika mengumumkan nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, dari Pahandut menjadi *Palangka Raya*

(Sumber : arsip
Drs. K. Lamey)

Menurut kepercayaan leluhur suku Dayak, nenek moyang suku Dayak diturunkan dengan memakai wahana *Palangka Bulau*. Palangka berarti tempat yang suci, *Bulau* berarti emas atau logam mulia, sedangkan *Raya* berarti besar. Dengan demikian, *Palangka Raya* berarti tempat suci dan mulia yang besar. Gubernur berpesan “sesuaikanlah nama ini dengan cita-cita dilahirkannya Kalimantan Tengah”, lalu diingatkan oleh Gubernur Milono seraya mengungkapkan : “.... Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Paskah agar tetap memelihara kesucian dan kemuliaan ” Demikianlah akhirnya Kota Palangka Raya menjadi ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.¹⁰

Sebagian besar masyarakat masih percaya bahwa nama Palangka Raya diberikan oleh Presiden Soekarno pada waktu pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya.¹¹ Namun berdasarkan bukti-bukti yang kuat, nama itu disepakati oleh para pemimpin Kalimantan Tengah baik yang duduk di

pemerintahan maupun di tengah masyarakat, serta diumumkan oleh Gubernur RTA. Milono 2 (dua) bulan sebelum Presiden Soekarno datang ke Palangka Raya. Berita tentang pemberian nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah itu sendiri telah di muat di Surat Kabar Harian (SKH) Bintang Timur Jakarta pada tanggal 22 Mei 1957.¹²

CATATAN KAKI :

¹ Bagian ini dimabil dari Anonim (1978). *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta; Gusti Mayur H. (1979). *Perang Banjar*. CV. Rapi. Banjarmasin dan Anonim (2002) *Sejarah Kalimantan Tengah*. Draft-3. Naskah belum diterbitkan.

² Didasarkan pada informasi/cerita lisan yang disusun TT. Suan. Naskah tidak diterbitkan.

³ Catatan Bapak H. Basrin Inin yang diberikan pada saat seminar “Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan Kota Palangka Raya” di BAPPEDA Kota Palangka Raya pada tanggal 27 Nopember 2002.

⁴ Anonim (2002). *Hasil Pendataan Potensi Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2002*. BAPPEDA Kota Palangka Raya. Hal. 58-59.

⁵ Catatan Bapak H. Basrin Inin. *Op. cit.*

⁶ Anonim. (1997). *Panca Windu Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Hal. 33-40. Semua bahan pada sub bab ini diirujuk dari buku ini kecuali yang diberi catatan khusus.

⁷ Informasi ini disampaikan oleh H. Bustomi Idris atas informasi dari Hj. Doris Susilowaty pada saat Seminar Buku Sejarah Pemebeentukan Kota Palangka Raya pada tanggal 27 Nopember 2002.

⁸ Endy (2003) *Time Line Story* (Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Pahandut). Manuskrip tidak diterbitkan.

⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957.

¹⁰ Tjilik Riwut (1958) *Kalimantan Memanggil*. Endang. Jakarta. Hal. 132-133. Kutipan lengkap pidato tersebut dapat dibaca pada lampiran 2 buku ini.

¹¹ Misalnya dapat dilihat dari tulisan tangan WA. Gara tertanggal 17 Juli 2001. Dokumen diterima dari koleksi Drs. Kaeter Lamey.

¹² Anonim. 1957. *Upatjara Perdamaian Simbar dengan sumpah "Tatakrotan"* SKH. Bintang Timur. Tanggal 22 Mei 1957.

BAB III
PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA DI TENGAH RIMBA
BELANTARA

1. Membangun Dari Tiada Menjadi Ada

Propinsi Otonom Kalimantan Tengah sewaktu dibentuk adalah Propinsi yang ke-17 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahap awal perguliran roda pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan daerah menghadapi keadaan yang serba kekurangan dan serba keterbatasan baik prasarana, sarana, tenaga maupun dana/biaya.

Salah satu keterbatasan tersebut adalah belum “siapnya” ibukota propinsi sebagai tempat berpijaknya pemerintahan daerah. Sementara dilain pihak, tuntutan untuk dapat mengurus dan mengatur urusan rumah tangga daerah secara mandiri sangat kuat, baik tuntutan dari para penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari seluruh masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah. Berberda dengan propinsi tetangganya, yakni Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang telah mempunyai ibukota propinsi yang mapan dengan fasilitas dan berbagai kemudahan yang memadai.

Di samping itu, Propinsi Kalimantan Tengah juga tidak menerima pembagian warisan inventaris/barang milik Propinsi Kalimantan sebagai Propinsi induknya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, menjalankan kegiatan roda pemerintahan dan memberi pelayanan kepada masyarakat, baik dalam arti kiasan maupun dalam kenyataan yang sesungguhnya sering dinyatakan oleh Tjilik Riwut dengan ungkapan “*memulai dari yang tiada supaya menjadi ada*”.¹ Ungkapan lain yang juga sering digunakan adalah “*Ciptakan dari yang tiada menjadi ada*”.²

Kesulitan lain adalah wilayah yang sangat luas dimana luas Propinsi Kalimantan Tengah lebih besar dari pulau Jawa dan Madura. Di samping itu kondisi alam Kalimantan Tengah yang masih merupakan rimba belantara yang penuh hutan lebat, sungai dan rawa-rawa yang luas sementara penduduknya sangat sedikit/jarang (pada saat terbentuk sebagai Propinsi, penduduk Kalimantan Tengah kurang dari 400.000 jiwa),³ dengan sarana perhubungan (transportasi) dan telekomunikasi yang sangat terbatas.

Dikemudian hari, Bapak Pelopor Pembangunan Kota Palangka Raya dan Bapak Pembangunan Kalimantan Tengah *Tjilik Riwut* sering memberikan ilustrasi guna membajakan tekad seraya mengatakan : “*berlayar dengan biduk yang ada, berdayung dengan kayuh yang ada, namun harus dapat tiba ditepi pantai dengan selamat*”. Dengan bahasa lain dikatakan oleh beliau, “*tak ada rotan, kijilpun berguna*”, atau dalam bahasa Dayak Ngaju berbunyi : “*jaton uei, bajakah mahin baguna*”.⁴

Kota Palangka Raya dibangun dan didirikan ditengah rimba belantara, di dataran pematang (*tangking*) Bukit Jekan; dengan menggunakan tenaga bangsa Indonesia sendiri di alam merdeka. Kota terbangun Palangka Raya merupakan karya bangsa. Karya luhur sejati di tangan putra negeri.⁵

2. Perencanaan Awal

Semenjak diterbitkannya UU Darurat No. 10 Tahun 1957 yang kemudian disyahkan dengan UU Nomor 21 Tahun 1958, yang menyatakan berdirinya Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya, maka Pemerintah Daerah dengan dipelopori *Ir. P.M. Noor*, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (mantan Gubernur Kalimantan yang pertama) membuat perencanaan awal pembangunan kota Palangka Raya meliputi luas 10 × 10 km. Pada areal seluas itu direncanakan pembangunan gedung-gedung, toko-toko, rumah-rumah yang

dibutuhkan untuk umum, perumahan pegawai, sekolah-sekolah, poliklinik, rumah sakit, sentral listrik dan lain-lain. Biaya yang disediakan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 25 juta.⁶

Rencana awal pembangunan Kota Palangka Raya seperti terlihat pada gambar 3.1. Cerita yang berkembang di kalangan pemerintahan dan masyarakat, rencana awal tersebut di buat oleh Ir. DAW. Van Der Pijl atas masukan-masukan yang diberikan Tjilik Riwut. Pembuatan rencana tersebut dilakukan diatas kapal yang membawa mereka berdua dari Banjarmasin ke Palangka Raya. Perjalanan Banjarmasin-Palangka Raya kedua pejabat tersebut dilakukan beberapa kali antara Bulan Januari 1957 sampai Bulan Juli 1957, dalam beberapa kesempatan R. Moenasir ikut dalam “survey” tersebut. Ini berarti, rencana tersebut disusun dengan cukup matang serta mempertimbangkan berbagai aspek gemorfologi calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Menurut informasi WA. Gara, rencana Kota Palangka Raya dibuat oleh seorang keturunan Tionghoa, Ir. The (tidak jelas nama lengkapnya).⁷ Sementara Tjilik Riwut (1963) sendiri menyatakan “pembangunan Palangka Raya adalah perpaduan rencana nasional, dari otak nasional, dari Presiden-nya dan Menteri-menterinya serta pemikir-pemikir lainnya” namun juga dinyatakan “dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan juga dari kami”⁸ Rencana bangunan-bangunan penting, rumah gubernuran, kompleks perkampungan pelajar, penentuan blok-blok terpenting disetujui oleh Presiden, sedang pelaksanaan selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum, gambarnya dibuat oleh Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah, namun tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui Residen Tjilik Riwut.⁹



Gambar 3. 1

Rencana Awal Pembangunan Kota Palangka Raya Konsep ini sering disebut dengan konsep sarang laba-laba (*spider concept*).

(Sumber : Museum Tjilik Riwut)

Berdasarkan informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan rencana pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang mungkin saja dilakukan oleh Ir. The, seorang pegawai dari Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah. Ir. Van der Pijl membantu Residen Tjilik Riwut dalam merumuskan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Ir. P.M. Noor). Dalam hal ini, Presiden Soekarno sendiri juga ikut terlibat dalam memikirkan rencana pembangunan Kota Palangka Raya. Namun demikian berdasarkan susunan tata ruang yang mirip dengan kota-kota di Eropa, pengaruh Ir. Van der Pijl dalam rancangan tersebut sangat besar. Apalagi Ir. Van der Pijl adalah perancang seluruh bangunan kantor-kantor pemerintah yang akan dibangun.

Rencana awal pembangunan Kota Palangka Raya mengacu pada konsep sarang laba-laba (*spider concept*) seperti kota-kota tua di Eropa. Namun dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh Endy, tidak seluruh konsep tersebut dapat direalisasikan, khususnya jaring-jaring melingkar yang berpusat pada bundaran besar.¹⁰

Dalam rencana pembangunan Kota Palangka Raya telah dimuat rencana untuk membuka jaringan perhubungan jalan darat (jalan raya) Palangka Raya – Pulang Pisau/Mintin; Palangka Raya – Tangkiling – Kasongan – Sampit –

Pangkalan Bun – Sukamara; Palangka Raya – Kuala Kurun – Tewah – Muara Teweh – Puruk Cahu – Ampah dan lain-lain.

Sesudah rencana pembangunan disetujui, segera dilakukan langkah-langkah persiapan berupa inventarisasi segala peralatan yang diperlukan. Di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum, semua dinas/instansi terkait melakukan persiapan yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Peresmian dimulainya pelaksanaan pembangunan kota Palangka Raya, direncanakan akan dilakukan oleh Presiden Soekarno sewaktu berkunjung ke Kalimantan



Gambar 3.2.

Peta Perbandingan Rencana Tahun 1957 (garis samar-samar) dan Peta Tahun 2002 (garis tegas). Tampak bahwa jaring laba-laba yang mengelilingi Bundaran Besar tidak berhasil direalisasikan

(Sumber : Endy, 2003)

3. Pemancangan Tiang Pertama

Dalam rangka peresmian nama Ibukota dan peresmian dimulainya pembangunan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kerja ke Kalimantan. Kunjungan tersebut berlangsung dari tanggal 14 s/d 20 Juli 1957. Presiden disertai 6 orang menteri Kabinet Karya, sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Pusat, Anggota

Parlemen, wartawan surat kabar dan wartawan Kantor Berita dari dalam dan luar negeri serta 2 orang duta besar.

Para Menteri Kabinet Karya yang mendampingi Presiden adalah: Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ir. P.M. Noor, Menteri Dalam Negeri Sanoesi Hardjadinata, Menteri Penerangan Sudibjo, Menteri Negara Urusan Transmigrasi Dr. F.L. Tobing, Menteri Negara Pengerahan Tenaga Rakyat A.M. Hanafi dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prof. Dr. M. Prijono ; Dua orang Duta Besar masing-masing, Hugh Cumming Jr. Duta Besar Amerika Serikat dan D.A. Zukov Duta Besar Uni Sovyet. Diantara wartawan luar negeri yang meliput adalah W.L. Olthmans dari Harian “Vrij Nederland” (Belanda) dan Wartawan Kantor Berita RRC “Hsin Hwa” Di samping itu juga ikut bergabung dalam rombongan Presiden Republik Indonesia, Raja Kasunanan Surakarta yakni Sri Soenan Pakoebowono XII.

Demikianlah, maka pada hari Rabu tanggal 17 Juli 1957 pukul 10.00 waktu setempat (Kalimantan masuk waktu Jawa) Presiden yang telah berada di lokasi upacara disambut dengan gegap gempita oleh ribuan massa dari Kampung Pahandut dan sekitarnya. Menurut penuturan WA. Gara, yang pada waktu itu bertindak sebagai petugas pembawa acara, jumlah massa yang menyambut kedatangan Presiden tidak kurang dari 12.000 orang, karena Presiden sendiri telah “meminta” agar dihadirkan massa paling sedikit 10.000 orang.¹¹

Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono menyampaikan pidato pengantar menyambut kedatangan Presiden beserta Rombongan sekaligus melaporkan secara resmi nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ialah PALANGKA RAYA. Kemudian Presiden Soekarno didampingi Gubernur Milono dan Residen Tjilik Riwut, melakukan potong rotan (*manetek uei*) yakni tali penahan “kepala babi” (*hamer*) dengan *Mandau* pusaka Dayak menandai dipancangnya tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya, Ibukota Propinsi

Kalimantan Tengah. Tiang Kayu Ulin (*tabalien*) pun tertancap ke dalam tanah yang disambut dengan tempik sorak LAHAP oleh Rakyat khalayak peserta upacara.



Gambar 3.2.
Suasana Pemancangan Tiang Pertama Pembangunan
Kota Palangka Raya Tanggal 17 Juli 1957

Keterangan foto searah jarum jam : Kepala Babi (Hamer) Menumbuk Tiang Kayu Ulin; Presiden Soekarno Melambaikan Tangan Kepada Peserta Upacara; Presiden Soekarno Menimbunkan Tanah Ke Tiang Kayu Ulin Dengan Kakinya.

(Sumber : Arsip Drs. Kaeter Lamey)

Satu kejadian yang perlu dicatat pula, bahwa sebelum Presiden memotong rotan, yakni H.S. Tundjan, Damang Kepala Adat Kampung Pahandut sekaligus salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah menyampaikan pernyataan kepada Presiden Soekarno. Inti pernyataan tersebut adalah dukungan sepenuhnya masyarakat Pahandut terhadap pembangunan Kota Palangka Raya.

Kotak 3 : Pernyataan H.S. Tundjan pada waktu Presiden RI memutuskan pita di
Pintu Gerbang di Palangka Raya

Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan ;

Kami atas nama Rakyat Pahandut, dengan ini meyakini kepada P.J.M. Presiden, bahwa sebagai tanda kegembiraan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, berhubung dengan Keputusan Pemerintah Pusat yang telah menunjuk Pahadut menjadi Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah, telah semufakat dengan tulus ikhlas, menyerahkan sebidang tanah yang diperlukan untuk Pembangunan Ibu Kota Propinsi.

Segala hak milik atas tanah tersebut, dengan beberapa fihak yang berkepentingan, telah diadakan penyelesaian dengan jalan yang sebaik-baiknya.

Kami menyerahkan mandau ini kepada P.J.M. Presiden, adalah sebagai tanda pembukaan dari permulaan sejarah Pembangunan Ibu Kota Palangka Raya, dan sebagai tanda ketulus-ikhlasan hati kami.

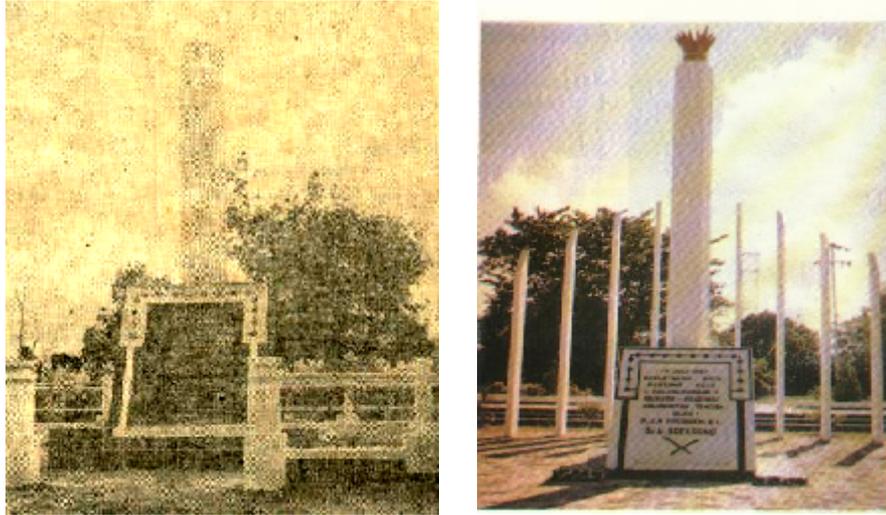
Pahandut, 17 Juli 1957
A.N. RAKYAT PAHANDUT,
d.t.t.
H. TUNDJAN

Sumber : Tjilik Riwut. 1958. *Kalimantan Memanggil*. Endang. Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Soekarno berkenan menyampaikan amanat sekaligus memberi “komando” yang intinya adalah : (1) Pembangunan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah dan (2) Membuka hutan rimba menyelesaikan revolusi.¹² Upacara pemancangan tiang pertama pembangunan Kota Palangka Raya di saksikan oleh Masyarakat Kalimantan Tengah, para pejabat Sipil dan Militer tingkat Kalimantan dan Kalimantan Selatan/Tengah.

Pada lokasi pemancangan tiang pertama tersebut pada tahun 1958 dibangun sebuah tugu peringatan. Tugu itu kemudian dipugar dengan ditambahkan api

dipuncak obor tersebut pada tahun 1964. Api ini menggambarkan semangat yang tak kunjung padam (api nan tak kunjung padam) yang diambil dari *obor pahewan* yang digunakan suku dayak untuk membakar ladang dan mengambil madu. Ketika Gubernur Kalimantan Tengah di jabat oleh Gatot Amrih, SH. ditambahkan 17 tiang sebagai simbol bambu runcing, senjata yang dipergunakan melawan kolonial Belanda.



Gambar 3.3. Tugu peringatan peresmian dimulainya pembangunan Kota Palangka Raya pada tanggal 17 Juli 1957. Sebelah kiri adalah tugu yang didirikan pada tahun 1958 dan sebelah kanan adalah tugu sekarang. Perhatikan perbedaan kedua tugu pada nyala api obor dipuncak tugu.

(Sumber : Arsip TT. Suan)

4. Buah Dari Sebuah Kerja Keras

Semenjak pemancangan tiang pertama tersebut, maka dimulailah gemuruh bunyi derap langkah para pekerja dan alat-alat berat melaksanakan pembangunan Kota Palangka Raya. Kapal-kapal angkutan dan ponton-ponton yang datang dan

pergi dari/ke Banjarmasin tak putus-putusnya mengangkut alat-alat bangunan baik berupa kayu, batu kali, batu kerikil, semen, kapur, cat, beton-ijser, paku dan segala bahan untuk keperluan pembangunan. Alat-alat besar seperti buldozer, ekskavator dan crain “sibuk” melakukan penggusuran, pengambilan dan perataan tanah serta merobohkan pohon-pohon baik yang masih tegak berdiri maupun yang sudah tumbang melintang.

Pembangunan kota Palangka Raya sama-sekali tidak boleh macet/mandeg, tidak boleh tertunda, dana/biaya harus selalu tersedia, dan penggunaannya harus secara ketat diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan kebocoran anggaran. Pelaksanaan pembangunan kota Palangka Raya langsung dibawah komando Presiden. Pengelolaan pembangunan pembangunan tersebut dituangkan dalam dokumen “Pembangunan Khusus Palangka Raya” (PCPR). Pelaksanan teknis dilapangan dituangkan dalam proyek juga dikenal “Proyek Khusus Palangka Raya” disingkat PCPR. Pelaksana PCPR adalah Gubernur Kalimantan Tengah Tjilik Riwut, yang bertanggung-jawab langsung kepada Persiden. Masyarakat sekarang mengenal komplek PCPR yang terletak di Jalan Diponegoro yang merupakan komplek para pegawai yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.

Satu peristiwa penting lain yang patut dicatat adalah lahirnya “PIAGAM PALANGKA RAYA”. Pada akhir Bulan Nopember 1958, dilakukan Konperensi Dinas Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Pertama yang kemudian dikenal dengan Musyawarah Pembangunan Kalimantan Tengah. Musyawarah tersebut merupakan “persiapan terakhir” bagi persiapan pembangunan Kota Palangka Raya untuk selanjutnya direalisasikan secara kongkrit di lapangan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Musyawarah akhirnya menghasilkan Piagam Palangka Raya yang berisi kebulatan tekad seluruh unsur masyarakat, tokoh militer, sipil dan perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah untuk membangun Kota Palangka Raya.

Piagam tersebut dibacakan di depan Perdana Menteri Ir H. Djuanda yang beserta beberapa Menteri dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara/Pejabat Pemerintah Pusat dan Kepala Staf Angkatan Udara R.I. Laksamana R.S. Suryadarma datang ke Palangka Raya untuk menutup konperensi itu.

Kotak 4 : Piagam Palangka Raya

PIAGAM PALANGKA RAYA	
<p>Kami peserta Konperensi Dinas Pembangunan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah, yang diadakan oleh Penguasa Perang Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya mulai tanggal 25 sampai dengan 30 Nopember 1958 terdiri seluruh unsur dalam masyarakat, tokoh Militer, Sipil dan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah, dengan tekad disertai pertanggung jawab penuh, sesuai dengan hasrat Daerah dan Masyarakat yang dicetuskan melalui saluran musyawarah dalam Konperensi ini dikuatkan dengan keyakinan, bahwa Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Mulia menyertai pekerjaan/perjuangan kami, memberi dasar-dasar keyakinan hidup (<i>Conception of life</i>) bagi rakyat di daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Negara Republik Indonesia umumnya, dalam hal ini meng-ikrarkan bersama :</p> <p>“ Bersatu tekad, tidak terpisah-pisah, konsekwen serta setia kepada keputusan Konperensi dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan dalam segala lapangan pembangunan moriel dan materiel demi kemajuan dan mengangkat derajat hidup yang layak bagi lapisan Rakyat dalam Daerah Kalimantan Tengah khususnya dan Indonesia umumnya”.</p>	
<p>PALANGKA RAYA, 30 NOPEMBER 1958 Atas nama seluruh peserta K o n p e r e n s i <u>Pemimpin Konperensi :</u></p>	
1. Komandan KODAM Kal. Tengah	2. Pd. Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Tengah
Dtt. Let. kol. DARMOSUGONDO	Dtt. TJILIK RIWUT
3. Kepala Polisi Komisariat Kalimantan Tengah	
Dtt. R. GAMPANG PRAWIROSASTRO	

Sumber : Musium Tjilik Riwut. Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Tengah

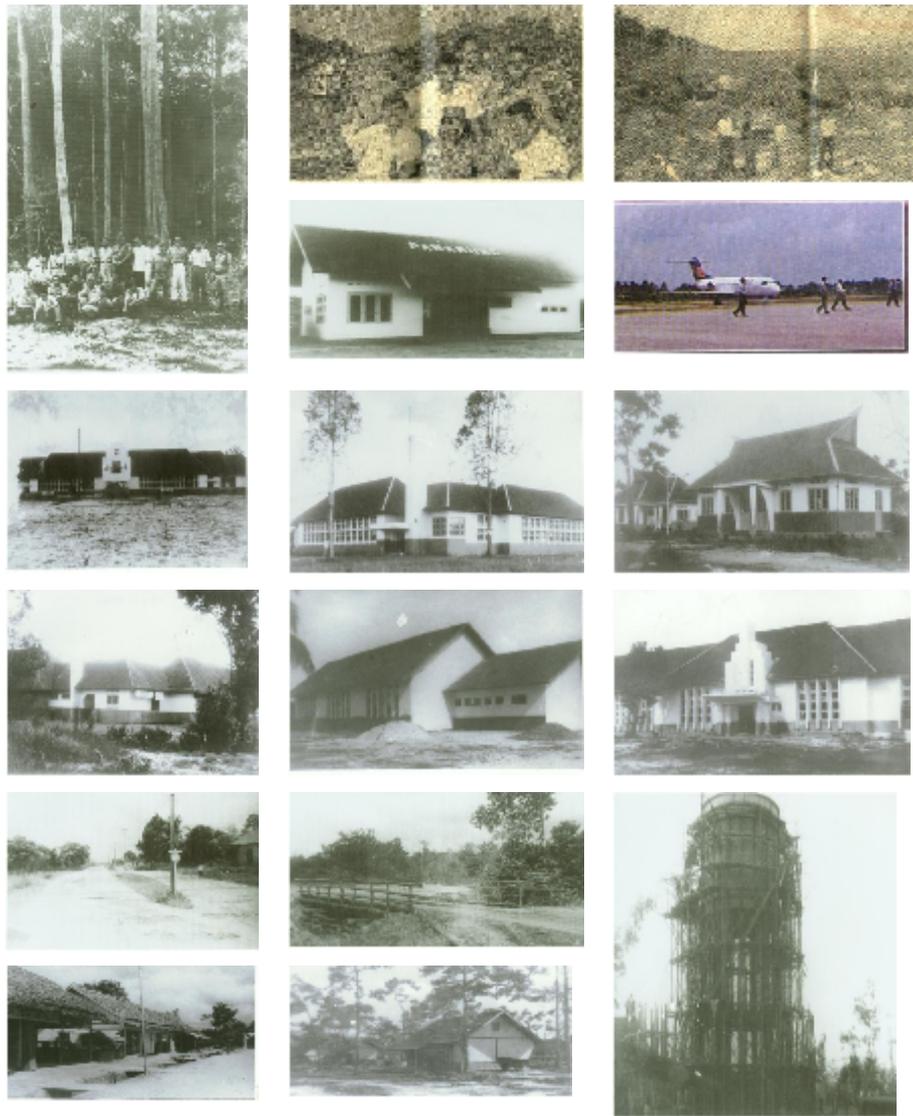
Dalam kiprah pembangunan kota Palangka Raya pada tahun-tahun awal dimulai demikian berat. Seluruh komponen masyarakat ikut berperan, diantaranya adalah para Veteran Pejuang Kemerdekaan turut aktif dan berperan dalam kegiatan

pembangunan, diantara pimpinan/pengurus Veteran Pejuang Kemerdekaan turut aktif memelopori pembangunan kota Palangka Raya, seperti Pieter K. Sawong, Amberi Lihi, Sukimin Moestowiradji, Ibung Bangas, E.A. Toewak dan lain-lain.¹³

Disamping para veteran, para pelajar, tentara dan pegawai negeri sipil juga ikut bekerja sama dengan komponen lain dalam membangun Kota Palangka Raya. Nyalun Menteng yang pada saat itu masih pelajar mengatakan bahwa para pelajar juga ikut bekerja bakti menebas areal yang akan dijadikan lapangan terbang.¹⁴

Demikianlah semua komponen yang ada bergotong royong bersatu padu bahu membahu untuk mempercepat pembangunan Kota Palangka Raya, sehingga hasilnya pun segera dapat terlihat dengan berdirinya berbagai sarana dan fasilitas umum seperti lapangan terbang Panarung (sekarang bandara Tjilik Riwut), jaringan jalan dan jembatan, pembangunan gedung-gedung sekolah diantaranya pembangunan SMA Negeri I Palangka Raya, gedung-gedung pemerintah, fasilitas air minum dan lain-lain. Pembangunan yang semula direncanakan selama 3 (tiga) tahun ternyata dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 (dua) tahun saja. Ini berarti satu tahun lebih cepat dari rencana semula.

Berbagai kendala yang sangat berat mampu dihadapi dengan sangat tabah oleh para pelopor dan perintis pembangunan Kota Palangka Raya dengan semangat dan tekad serta pengorbanan tenaga, biaya dan airmata. Dan sebagai hasil kerja keras selama 2 tahun itu dapatlah terwujud “wajah” Kota Palangka Raya.



Gambar 3.5. Berbagai fasilitas umum dan sarana perkantoran yang telah dibangun dengan kerja keras seluruh warga

Keterangan foto dari atas. Wajah-wajah para pejuang dengan latar belakang hutan lebat (2 gambar). Baris pertama dan kedua : Calon lokasi Bandara Panarung, Bandara Panarung yang telah dibangun dan Bandara Panarung setelah diubah menjadi Bandara Tjilik Riwut tahun 2003. Baris ketiga :Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang sekarang digunakan sebagai Kantor DPRD Kalimantan Tengah. Kantor Jawatan PU dan Tenaga. Kantor Pengerahan Tenaga Rakyat (PETRA). Baris ketiga: Prasarana pendidikan, SD Negeri 1 (sekarang SD Langkai 1), SMP I Palangka Raya, SMA I Palangka Raya (sekarang SMU I). Baris keempat. Jalan Antang Badjala Bulau (sekarang Jalan A. Yani), Jematan Dr. Murdjani (diujung Jl. Dr. Murdjani), Menara PDAM tahun 1961. Baris keenam. Pasar Palangka Sari (sekarang Pasar Besar) satu dari dua pasar di Kota Palangka Raya. Salah satu lokasi Perumahan Pegawai yang terletak di Jalan Kartini (antara Jl. H. Ikap dan Jl. Iskandar. Perhatikan bahwa sekeliling rumah tersebut masih hutan.

(Sumber : Musium Tjilik Riwut)

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 52/12/2206 tanggal 22 Desember 1959, menetapkan untuk memindahkan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung mulai tanggal 20 Desember 1959. Dengan demikian pada 1 Januari 1960 Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah secara resmi melaksanakan tugas di daerah hukumnya sendiri. Hal ini berarti cita-cita Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk berada diantara rakyatnya sendiri telah dapat dicapai.

CATATAN KAKI :

¹ Tjilik Riwut. 1963. "*Amanat Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah pada Peringatan Hari Palangka Raya ke-VI tanggal 17 Juli 1963*" Palangka Raya. Hal. 7

² Nyalun Menteng, dinyatakan saat Seminar Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan Kota Palangka Raya tanggal 27 Nopember 2002.

³ Tjilik Riwut. 1962. "*Memperkenalkan Kalimantan Tengah dan Pembangunan Ibukota Palangka Raya*" Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Palangka Raya.

⁴ Tjilik Riwut. 1958. "*Kalimantan Memanggil*" Endang. Jakarta.

⁵ Cuplikan syair Hymne Kota Palangka Raya.

⁶ Anonim. 1957. "*Pembentukan Prop. Kal-Teng : Rp. 25 Djuta untuk Pendirian Ibukota Pahandut*" Artikel dalam SKH "Nasional" tanggal 23 April 1957.

⁷ WA. Gara. dinyatakan saat Seminar Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan Kota Palangka Raya tanggal 27 Nopember 2002. Pernyataan ini mengulang tulisan tangan sebelumnya tertanggal 17 Juli 2001.

⁸ Tjilik Riwut. 1963. *op. cit.* hal. 4.

⁹ Tjilik Riwut. 1963. *Loc. Cit.*

¹⁰ Endy (2003) komunikasi pribadi. Yang bersangkutan adalah PNS dari Bappeda Kota Palangka Raya yang sedang menempuh program S-2 Arsitektur di ITB Bandung dan sedang meneliti tahap-tahap pembangunan Kota Palangka Raya.

¹¹ WA. Gara. dinyatakan saat Seminar Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan Kota Palangka Raya tanggal 27 Nopember 2002.

¹² Tjilik Riwut. 1963. *op. cit.* Hal. 3.

¹³ Tjilik Riwut. 1963. *op. cit.* Hal. 4-5

¹⁴ Nyalun Menteng. dinyatakan saat Seminar Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan Kota Palangka Raya tanggal 27 Nopember 2002.

BAB IV

PALANGKA RAYA MENJADI KOTAPRAJA OTONOM

1. Pembentukan Kotapraja Administratif

Dengan berpindahnya kedudukan Perintah Daerah Kalimantan dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung 20 Desember 1959 dan secara berangsur-angsur mulai tanggal 1 Januari 1960 seluruh dinas/jawatan/Instansi dan Satuan Kerja serta badan-badan baik pemerintah maupun Swasta telah memindahkan kedudukannya di daerah sendiri yakni di Kota Palangka Raya. Selanjutnya Ibukota Kecamatan Kahayan Tengah yang pada waktu itu dipimpin oleh Asisten Wedana J.M. Nahan dipindahkan ke Bukit Rawi.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah (Gubernur Kepala Daerah dan DPRD) segera melakukan pembenahan Kota Palangka Raya, dimulai dari pemekaran wilayah administrasi, pembentukan kecamatan dan penataan kampung-kampung.

Perkembangan selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah melalui surat keputusan Nomor 3/Pem. 170-C-2-3 tanggal 24 April 1961 membentuk Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Administratif Palangka Raya terhitung 1 Mei 1961. Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Administratif Palangka Raya kemudian ditingkatkan menjadi Kotapraja Palangka Raya pada tanggal 19 Juni 1961 dengan Surat Keputusan Gubernur yang memperbaiki surat keputusan tanggal 24 April tersebut.

W. Coenraad ditunjuk sebagai Kepala Pemerintah Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan sebutan Walikota dan Sekretaris ditunjuk M.D. Pakiding, BA dengan tugas mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga kotapraja. Semua Dinas/Jawatan/instansi Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah juga diperintahkan untuk membentuk unit satuan kerja “Urusan Kotapraja Administratif Palangka Raya”. Pelaksanaan pembentukan unit satuan kerja tersebut dikoordinasikan dengan Kantor Persiapan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Kotapraja Administratif Palangka Raya meliputi 3-kecamatan, yakni (1) Kecamatan Palangka, dengan ibukota Pahandut, (2) Kecamatan Petuk Katimpun, dengan ibukota Marang Nganduruh Langit, dan (3) Kecamatan Bukit Batu, dengan ibukota Tangkiling. Pada bulan Pebruari 1964, Kecamatan Palangka dimekarkan menjadi 2-kecamatan : (1) Kecamatan Pahandut berkedudukan di Pahandut (2) Kecamatan Palangka berkedudukan di Palangka Raya.

Upaya pemekaran wilayah tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan menjadi Kotapraja otonom. WA. Gara yang pada waktu itu bertugas di Jawatan Penerangan menyebutkan bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, Gubernur Tjilik Riwut pergi ke calon ibukota Kecamatan Petuk Ketimpun, yang pada waktu itu masih hutan belantara tidak berpenghuni. Gubernur kemudian turun dari perahu sambil membawa mandau, kemudian menebang pohon sambil mengatakan “inilah ibukota Petuk Ketimpun”¹

Dengan adanya pemekaran dan penataan wilayah administratif di lingkup Kotapraja Administratif Palangka Raya tersebut, maka pada tahun 1964, Kotapraja Administratif Palangka Raya terdiri atas : 4 (empat) kecamatan dan 17 buah Kampung. Ini berarti ketentuan-ketentuan dan

persyaratan menuju terbentuknya Kotapraja Otonom telah dapat dipenuhi. DPRD-GR Tingkat I Kalimantan Tengah telah menyetujui Pembentukan Kotapraja Palangka Raya yang dituangkan dalam Surat Keputusan tanggal 8 April 1963 Nomor Perny. /005/DPRD-GR/KT/1963.

Perkembangan selanjutnya, maka Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Republik Indonesia (DPR-GR RI) pada tanggal 12 Desember 1964 menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul inisiatif tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya kepada Pimpinan DPR-GR RI. RUU Usul Inisiatif Komisi B tersebut ditanda tangani 20 orang, yaitu :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. I.S Handokowidjojo | 11. Sotopo Djojsubroto |
| 2. Nungtijik A.R | 12. R. Soemantri |
| 3. Ny. Lestari Surasno | 13. Nj. Maemunah Bachrok |
| 4. S. Hadikoesoemo | 14. Achmad Siala |
| 5. Soetjipto | 15. Brigjend TNI H. Sugandhi |
| 6. Ischak Moro | 16. M. Caley |
| 7. Ny. Kartini Gatot | 17. Kol. R. Muamil Efendi, SH |
| 8. S. Haryowisastro | 18. H. Zakaria Imban |
| 9. Ismangun Pudjowidagdo | 19. Rd. Poeger |
| 10. A. Nawawi Saleh | 20. Parenrengi Tan'I |

Setelah dilakukan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, maka RUU tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya

disetujui oleh DPR-GR RI untuk disyahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut akhirnya ditanda tangani Presiden RI pada 12 Juni 1965, yang secara lengkap berjudul : *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan*, Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 48 (TLN Nomor 2753) tanggal 12 Juni 1965.

2. Peresmian

Peresmian Palangka Raya menjadi Kotapraja Otonom dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. Mayjen TNI *Dr Soemarno Sosroatmodjo* di lapangan Bukit Ngalangkang, halaman Balai Kota, pada tanggal 17 Juni 1965. Upacara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi B DPR-GR RI *I.S. Handokowidjojo* (bersama dengan 11 Anggota DPR-GR yang lain), para pejabat Departemen Dalam Negeri, sejumlah pejabat Tinggi Pemerintah Pusat, Deputi Wilayah Komando Antar Daerah Kalimantan Brigjen TNI M. Panggabean, Deyangdak Kalimantan Brigjen Pol. Sukahar, Utusan-Utusan Pemerintah tingkat Kalimantan, Konsul RRC dan Konsul Uni Sovyet, serta para pejabat Sipil dan Militer.²

Catatan sejarah yang tak terlupakan terjadi pada hari itu. Menjelang upacara dimulai, para peserta upacara sangat “tertarik” perhatiannya tatkala 2-buah pesawat tempur MIG UTI-15 dan MIG-17 TNI-AU terbang melintasi dan memutar diatas tempat upacara, di udara diatas Kota Palangka Raya. Kedua pesawat tempur TNI-AU tersebut berangkat dari LANUD Syamsuddin Noor Banjarmasin. Terbang lintas/putar kedua pesawat tempur TNI-AU

tersebut dalam rangka ikut menyambut peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya disamping memperlihatkan kesiapan jajaran Komando Mandala DWIKORA.

Disamping itu juga ditandai dengan acara berupa demonstrasi penerjunan payung membawa Lambang Kota Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung tersebut dipelopori Wing Pendidikan II pangkalan TNI-AU Margahayu Bandung di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara *M. Dachlan*, eks paratroop TNI-AU yang terjun di Sambi, Kotawaringin, Kalimantan Tengah 17 Oktober 1947.



Gambar 4.1.

Terjun payung dalam rangka peresmian Kotapraja Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 1965 di lapangan Udara Panarung (sekarang Bandara Tjilik Riwut)

(Sumber : Musium Tjilik Riwut)

Demonstrasi terjun payung di lakukan dengan mempergunakan pesawat Garuda 011 (pesawat T-586) dimana peterjun payung 011 sebanyak 6-orang dipimpin Kapten pilot Lus Tit Arifin dan Co-Pilot Lusda Tit Rusli, dan sebanyak 10 orang peterjun payung Sukwati (Sukarelawati) dari Brigede Bantuan Tempur Jakarta serta peterjun Undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto yang juga adalah mantan paratroop/pasukan payung TNI-AU “ 17 Oktober 1947”. Selanjutnya, Lambang Kota Palangka Raya dibawa secara parade jalan kaki oleh para peterjun payung ke lapangan upacara.



Gambar 4.2.

Kantor Kotapraja Palangka Raya yang digunakan sebagai tempat upacara peresmian (sekarang kantor ini sementara digunakan untuk Kantor Camat Jekan Raya)



Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo melakukan upacara tradisional suku Dayak “Potong Pantan” satu hari menjelang saat peresmian Kotapraja Palangka Raya

(Sumber : Musium Tjilik Riwut dan Arsip TT. Suan)

Pada hari itu dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Tjilik Riwut ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri selaku Penguasa Kotapraja Palangka, dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan Lambang Kotapraja Palangka Raya kepada Penguasa Kotapraja Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu pula Penguasa Kotapraja Palangka Raya (Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah) menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) kepada Presiden R.I. kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja

Palangka Raya. Selanjutnya tanggal 17 Juni setiap tahun diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.

3. Palangka Raya Kota 3 - M

Menteri Dalam Negeri Dr Soemarmo Sosroatmodjo mengikuti semua acara yang dilaksanakan pada pagi, siang hingga petang hari antara lain menerima laporan dari Gubernur Kalimantan Tengah khususnya tentang perkembangan pembangunan Kota Palangka Raya mulai saat pemancangan tiang pertama sampai saat diresmikan sebagai Kotapraja otonom meliputi penyusunan tata-kota serta *site-site* peruntukan kawasan untuk berbagai kepentingan seperti pasar, pemukiman dan lain-lain. Menteri Dalam Negeri juga melakukan peninjauan ke lokasi akan dibangunnya Kantor Walikota.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah juga menyampaikan harapan agar Palangka Raya menjadi Kota *Modal* dan *Model*. Kota Modal, yang diperoleh dari perjuangan untuk meneruskan perjuangan. Kota modal, yang dengan penuh tenaga dan keringat dibangun, dari tidak ada sampai menjadi ada. Kota Palangka Raya tidak dibangun di atas tempat atau kota yang sudah ada, melainkan dibangun dalam suasana pedalaman yang suci, di atas kepribadian rakyat dan harga diri rakyat Kalimantan Tengah, jauh dari pengaruh faham dan aliran-aliran yang merusak serta bebas dari sisa-sisa jaman kolonial Belanda. Karena keuletan dan kerja keras tersebut serta karena perencanaannya yang matang, Kota Palangka Raya ingin menjadi Kota *Model*. Kota yang menjadi contoh dan suri tauladan dari kota-kota lain di Indonesia.

Pada malam hari (Kamis malam) Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo menghadiri malam resepsi dalam rangka peresmian Kotapraja Palangka Raya pukul 20.30 bertempat di *Balai Tunjung Nyaho*. Jalan Sukarno-Hatta (sekarang Jalan Yos Sudarso). Dalam sambutan serta

wejangannya, Menteri Soemarno Sosroatmodjo antara lain memuji dan sangat menghargai semangat dan keuletan (kiprah) para perintis dan pelopor pembangunan kota Palangka Raya yang dipimpin oleh Gubernur Tjilik Riwut. Semangat itu pantas dijadikan teladan. Salah satu ucapan beliau adalah : “kita membangun kota Palangka Raya sebagai Ibukota Kalimantan Tengah, dengan kiat kota Palangka Raya sebagai *kota modal* dan *kota model*, sangat dihargai”

Selanjutnya Mendagri mengatakan bahwa pembangunan harus terus dilanjutkan dengan tetap berdasarkan perencanaan tata-kota yang baik ke arah terwujudnya kota Palangka Raya yang *modern*. Dengan demikian lahirlah visi pembangunan Palangka Raya sebagai "Kota 3-M" yakni Palangka Raya sebagai Kota *Modal, Model dan Modern*.

Peresmian Kotapraja Administratif Palangka Raya menjadi Kotapraja Otonom, disambut meriah dan dengan rasa gembira serta semarak oleh warga Kota. Warga kota menghiasi jalan-jalan dalam kota dengan umbul-umbul, pengibaran Bendera Merah Putih serta spanduk-spanduk yang menyatakan kegembiraan mereka atas peresmian Kotapraja Palangka Raya. Secara spontan, warga masyarakat di setiap kampung, RT maupun RK menyelenggarakan berbagai pertunjukan kesenian/hiburan. Biaya bagi pelaksanaan kegiatan tersebut ditanggung oleh masyarakat sendiri secara gotong-royong.

Sumbangan-sumbangan dari berbagai kalangan dan golongan Masyarakat Kalimantan Tengah untuk upacara peresmian Kotapraja Palangka Raya juga disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah baik dalam bentuk dana maupun material/barang untuk menghiasi Kota Palangka Raya agar terlihat cantik, hidup dan semarak. Pada “muara jalan” dibangun pintu gerbang yang menarik. Secara singkat dinyatakan bahwa

4. Pembentukan Pemerintahan

Tahap pertama pembentukan pemerintahan Kotapraja Palangka Raya, dilakukan dengan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Kota Palangka Raya. Demikianlah, pada tanggal 23 Juli 1965, Pangdak Kalimantan Tengah SRIMARDJI selaku Anggota Pantja Tunggal Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah meresmikan dan melantik Keanggotaan DPRD-GR Kotapraja Palangka Raya di ruang DPRD-GR (masih dalam Lingkungan Kantor Walikota).

Semula Keanggotaan Kotapraja Palangka Raya sebanyak 17-orang kemudian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Anggota DPRD-GR Kotapraja Palangka Raya menjadi ditambah menjadi 25 orang. Kedudukan Ketua DPR-GR dipisahkan dari jabatan Kepala Daerah.

Pimpinan DPRD-GR Kotamadya Palangka Raya (istilah konstruksi yang digunakan dalam UU No. 18 Tahun 1965) sebanyak 3-orang, yaitu :

- Ketua : Mudji Adjam (dari partai politik IP-KI)
- Wakil Ketua I : Fachrul Dirun (partai politik N.U.)
- Wakil Ketua II : Ny. Bertha A. Koetin (Golkar Wanita)

DPRD-GR selanjutnya melaksanakan pemilihan Walikota Kepala Daerah dan terpilihlah JANTI SACKONK (mantan Sekretaris Kotapraja Administratif Palangka Raya) menjadi Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya. Pengangkatan tersebut selanjutnya diusulkan ke Departemen Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan Presiden R.I. yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden.

Akhirnya pada tanggal 18 September 1965, bertempat di Balai Tunjung Nyaho, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Tjilik Riwut atas nama Menteri Dalam Negeri, melantik Janti Saconk sebagai Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya yang pertama. Kemudian pada akhir bulan September 1965 itu pula, telah dapat ditunjuk/diangkat Anggota BPH Kotamadya sebanyak 3 orang. Dengan selesainya pembentukan DPRD-GR, pemilihan/pelantikan Walikotamadya serta Anggota BPH Kotamadya Palangka Raya itu, maka selesilah tugas Tjilik Riwut, Gubernur Kepala daerah Kalimantan Tengah selaku Penguasa Kotapraja Palangka Raya.



Gambar 4.3.

Suasana pelantikan Janti Saconk sebagai Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya. Tampak pada gambar di atas, Gubernur Tjilik Riwut yang juga Penguasa Kotapraja Palangka Raya sesaat sebelum melantik. Gambar bawah adalah pelantikan Janti Saconk di Gedung Tunjung Nyaho (sekarang terletak di Jalan Yos Sudarso)

(Sumber : dokumentasi keluarga Janti Saconk)

Pemerintahan Kotamadya Palangka Raya yang terdiri Walikota Kepala Daerah bersama DPRD-GR, kemudian membentuk dan melakukan penataan Dinas-Dinas Daerah Otonom Tingkat Kotamadya, berdasarkan “penyerahan” urusan dari Pemerintah Propinsi. Pembentukan dan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kotapraja Palangka Raya masih terus dilakukan dan disempurnakan sampai sekarang.

Sejak peresmiannya sampai sekarang, Kota Palangka Raya telah mengalami berbagai perubahan perundang-undangan yang merubah sebutannya. Sebutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 adalah Kotapraja Palangka Raya, dan sebutan untuk kepala daerahnya adalah Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya. Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 berlaku sebutannya adalah Kotamadya Palangka Raya, dan sebutan untuk kepala daerahnya adalah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya. Kemudian ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku, sebutannya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya, dan sebutan untuk kepala daerahnya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya. Sekarang setelah era reformasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebutannya adalah Kota Palangka Raya, dan dipimpin oleh Walikota Palangka Raya

CATATAN KAKI :

¹ WA. Gara, dinyatakan pada saat Seminar Buku Sejarah Pembentukan Kota Palangka Raya pada tanggal 27 Nopember 2002 di Palangka Raya.

² Anonim. 1971. *Brosur Kotamadya Palangka Raya*. Sekretariat Daerah Kotamadya Palangka Raya. Palangka Raya. Hal. 10-13.

BAB V

KRONIK KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI IBUKOTA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH (1957 – 1965)

Sampai Tahun 1957

Kampung Pahandut terdiri dari dukuh-dukuh (desa-desa) : Pahandut, Kereng, Petuk Ketimpun, Hampapak, Tumbang Rungan, Jekan, Marang dan Tahai. Di kampung Pahandut terdapat 20 (dua puluh) keluarga besar yaitu : H.S. Tundjan (Demang Kepala Adat), Ngabe Soekah, Manan Tuan, Inin Garang, Kosong (Bapak Umbuk), Alas (Bapak Suray), Dulrahman, W. Dean Masal, Abdul Inin (Kepala Kampung), Untung Tanduh, Stefanus Rasad, Timing Tarif, Bayau Ranju dan Buntit Soekah. Sementara 6 (enam) keluarga besar yang lain terdapat di Kampung Jekan, yaitu : Taur Angin, Mayor, Herber Rasad, Engkak Tingang, Julie Tuwe dan Marsui Taur.

Pada daerah kampung Jekan (sekarang Kantor DPRD Propinsi Kalimantan Tengah) dipergunakan sebagai *Training Camp* Tentara Revolusi dari kesatuan Angkatan Laut RI (ALRI) Divisi IV dalam rangka mempertahankan kemerdekaan

Tanggal 17 Juli 1957 jam 10.00 wib (ada yang menyebut Jam 10.17 wib) diresmikan dimulainya pembangunan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah oleh Presiden RI.

Tahun 1958-1959

Tanggal 28 November 1958, kunjungan PM. Ir. JUANDA beserta pejabat-pejabat tinggi negara yang lain ke Kota Palangka Raya dalam rangka menghadiri Konperensi Dinas Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Pada kesempatan tersebut dibacakan PIAGAM PALANGKA RAYA.

Tanggal 17 Agustus 1959, Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri Palangka Raya (sekarang SMU I Palangka Raya)

Tanggal 8 September 1959, kunjungan kedua Presiden Republik Indonesia di Palangka Raya.

Tanggal 22 Desember 1959, Pemindahan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52/12/2206

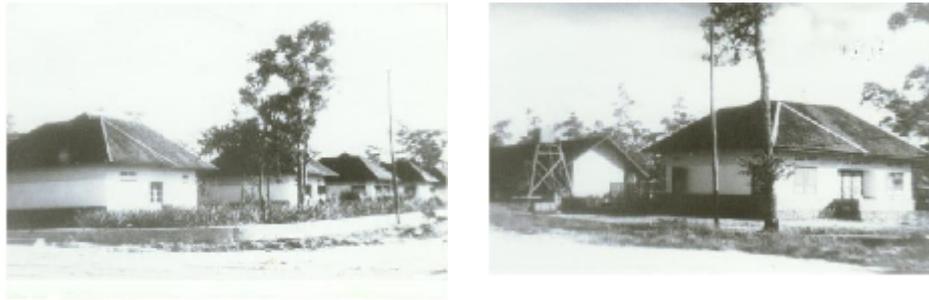
Tanggal 23 Desember 1959, Pelantikan Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri. Sebelum itu, Tjilik Riwut adalah Pejabat Gubernur menggantikan RTA. Milono yang pindah ke Jawa Timur.

Kantor PU seksi Pengairan dan Kantor Kecamatan Pahandut dibangun beserta perumahan pegawai sebanyak 20 (dua puluh buah).

Jalan setapak dari Pahandut ke tempat pemancangan tiang pertama (Jl. S. Parman) dirintis untuk dapat dilewati oleh kendaraan. Masyarakat juga mulai bergotong royong untuk membuka dan membangun lapangan terbang Panarung (sekarang Bandara Tjilik Riwut).

Kantor Gubernur mulai dibangun menghadap ke monumen pemancangan tiang pertama (sekarang kantor tersebut digunakan oleh DPRD Propinsi Kalimantan Tengah). Kantor-kantor yang lain juga mulai dikerjakan seperti Kantor PU (berdampingan dengan Kantor Gubernur), Kantor Kesehatan, Kantor Sosial, Kantor Agraria dan Kantor PPK.

Rumah pegawai dalam proyek PCPR di daerah perkantoran pemerintah sudah selesai yaitu perumahan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sutanegara dan Jalan Gadjah Mada di dalam kompleks Palangka Tengah.



Gambar 5.1.

Rumah-rumah pegawai yang siap ditempati yang terletak di komplek Palangka Tengah.
(Sumber : Musium Tjilik Riwut)

Lapangan terbang Panarung sudah dapat didarati pesawat Catalina (pesawat kecil yang bisa terbang dan mendarat di darat dan di air).

Tahun 1960

Sejak 1 Januari 1960, Kota Palangka Raya secara resmi telah berfungsi efektif sebagai Ibukota Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

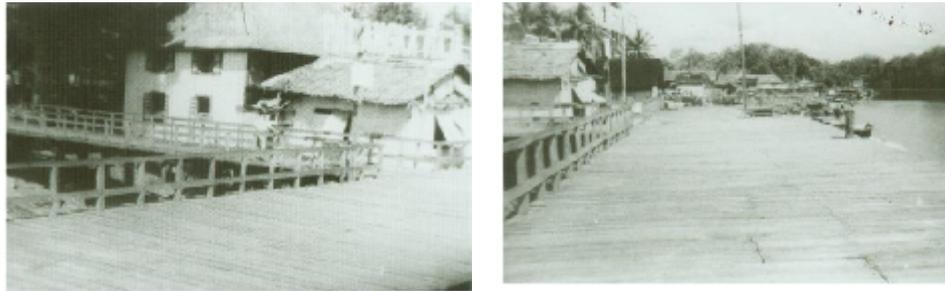
Upacara Adat MANYANGGAR KOTA PALANGKA RAYA dilaksanakan tanggal 11 Mei 1960. Upacara ritual tradisional suku Dayak ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya dapat terhindar dari malapetaka.

Tanggal 29 September 1960, dibuka secara resmi dan telah berfungsi hubungan komunikasi telepon, untuk memperlancar koordinasi antar instansi Pemerintah se Kota Palangka Raya.

Tahun 1961

Tanggal 1 Januari 1961, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah mengeluarkan Instruksi kepada seluruh Dinas/Jawatan/Instansi jajaran Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah agar segera pindah ke Kota Palangka Raya.

Tanggal 23 Januari 1961, Menteri Perhubungan Laut Ir Abdulmutalib meresmikan berfungsinya pelabuhan sungai yang diberi nama Pelabuhan RAMBANG di Kota Palangka Raya. Dengan demikian, lalu lintas keluar masuk Kota Palangka Raya semakin mudah karena sarana angkutan utama pada waktu itu melalui sungai.



Gambar 5.2.

Dermaga Rambang (1961) setelah diresmikan oleh Menteri Perhubungan Laut. Peresmian pelabuhan ini makin memperlancar arus transportasi keluar masuk Kota Palangka Raya

(Sumber : Musium Tjilik Riwut)

Tanggal 15 Pebruari 1961, Kepolisian Komisariat Kalimantan Tengah dinyatakan pindah dari Banjarmasin ke Palangka Raya.

Tanggal 16 Juni 1961 di Palangka Raya berlangsung pembicaraan antara Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dengan pihak Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam hal ini Jawatan Tata Kota dan Daerah untuk membahas Pembangunan Kota Palangka Raya lebih lanjut. Hasil pembicaraan tersebut menyimpulkan bahwa pembangunan Kota Palangka Raya beralih menjadi Proyek Aktif di bawah Jawatan

Tata Kota dan Daerah Departemen PUT, tetapi tetap melanjutkan “PCPR” (Proyek Khusus Palangka Raya). Sebelumnya Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah telah merampungkan Rencana Pendahuluan Pembangunan Kota Palangka Raya yang pelaksanaannya sampai akhir tahun 1960.

Tanggal 8 Agustus 1961 KODIM/Garnizoen Palangka Raya dibentuk

Konperensi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya dilangsungkan 6 Desember 1961.

Tahun 1962

Tanggal 22 Juli 1962, Pembukaan Kantor Kejaksaan Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya.

Akhir Bulan Nopember 1962, dilangsungkan Musyawarah Ekonomi dan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Musyawarah tersebut dihadiri oleh para pengusaha dan eksportir.



Gambar 5.3.

Jalan raya Palangka Raya-Tangkiling telah tembus. Hubungan darat semakin lancar

(Sumber : Musium Tjilik Riwut)

Tanggal 17 Desember 1962, Pembuatan Jalan Negara Palangka Raya – Tangkiling telah selesai dikerjakan. Pembangunan jalan tersebut dimulai dari dua arah yaitu dari

Palangka Raya dan dari Tangkiling. Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan adalah pembuatan saluran air (pengeringan), pembuatan jembatan dan pengaspalan.

Sampai akhir tahun 1962, berbagai bangunan, gedung-gedung kantor pemerintah, rumah-rumah peribadatan, asrama-asrama dan lain-lain telah selesai dibangun. Jumlah berbagai bangunan yang sudah dibangun tersebut sebanyak kurang-lebih 500-buah.

Tahun 1963

Pada tanggal 17 s/d 21 September 1963 di Palangka Raya dilangsungkan Musyawarah Kerja Pemerintahan Daerah se Kalimantan Tengah.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1963, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) mengeluarkan surat keputusan tentang pendirian Universitas Negeri di Palangka Raya yang diberi nama Universitas Palangka Raya (UNPAR)

Tanggal 11 Desember 1963, Universitas Negeri Palangka Raya (UNPAR) satu-satunya universitas negeri di Propinsi Kalimantan Tengah dibuka oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (Menteri PTIP) Prof Dr Ir Thoyib Hadiwidjaja. Universitas Palangka Raya meliputi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Salah seorang tokoh yang banyak berjasa bagi berdirinya universitas ini adalah Bapak Timang.

Pada tanggal 16 s/d 20 Desember 1963 di Palangka Raya diselenggarakan Musyawarah Sarjana Kalimantan Tengah yang pertama, dan diikuti oleh ± 200-orang peserta.

Tahun 1964

Pada bulan Pebruari 1964, Kedudukan dan Markas Komando Daerah Militer XI/Tambun Bungai (KODAM XI/TB) dipimpin Pangdam XI/TB Brigjen TNI Sabirin Muchtar dinyatakan pindah dari Sampit ke Palangka Raya.

Kantor Bendahara Negara tanggal 1 April 1964 di buka di Palangka Raya, kantor tersebut sementara menempati salah satu ruangan pada Gedung Induk Kantor Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah. Dengan dibukanya KBN Palangka Raya tersebut, pembayaran gaji PNS/ABRI, pembayaran biaya pembangunan dan sebagainya semakin lancar dan mudah.

Tanggal 17 Mei 1964, di Palangka Raya, dilangsungkan Penyerahan Wewenang Pemerintahan Umum Pusat kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri IPIK GANDAMANA sekaligus menyatakan Penghapusan Wilayah Kewedanaan di Kalimantan Tengah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1963 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3/MDN/1964.



Gambar 5.4.

Penyerahan wewenang Pemerintahan Umum Pusat oleh Mendagri IpiK Gandamana kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah yang diterima oleh Gubernur Tjilik Riwut

(Sumber : Musium Tjilik Riwut)

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kodam XI Tambun Bungai pada tanggal 17 Juli 1964, dilangsungkan upacara peletakan batu pertama pembangunan Markas Kodam XI Tambun Bungai yang terletak di Km 2,5 Jalan Palangka Raya-Tangkiling (sekarang Jalan Tjilik Riwut). Upacara tersebut kemudian dilanjutkan dengan adat pesta MANYANGGAR selama 3 hari 3 malam.

Dimulainya pembangunan dan pemasangan Studio RRI Palangka Raya pada tanggal 23 Juli 1964 dibawah pimpinan Ibrahim. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah mengintruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Tengah agar membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan/pemasangan Studio RRI Palangka Raya, agar pada tanggal 17 Agustus 1964 sudah dapat berkumandang diudara.

Siaran Percobaan Studio RRI Palangka Raya mulai dibuka tanggal 8 Agustus 1964 pada pukul 17.00 s/d 20.00 WITA

Pada tanggal 16 Agustus 1964, Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Tjilik Riwut bersama PANTJA TUNGGAL Kalimantan Tengah meresmikan pembukaan Studio RRI Palangka Raya sekaligus pembukaan Siaran Perdana RRI Palangka Raya pada pukul 17.00 WIT dengan “tune pembukaan siaran” suara LAHAP oleh Gubernur Tjilik Riwut.

Pada tanggal 11 September 1964, Menteri Penerangan Republik Indonesia di Jakarta meresmikan pembukaan siaran RRI Studio Palangka Raya bertepatan dengan Hari Radio ke XIX. Secara bersamaan juga diresmikan RRI Studio Malang.

Tahun 1965

Tanggal 6 Maret 1965, Rumah Sakit Umum Palangka Raya mendapat tenaga seorang dokter gigi dr Liem Ho King.

Tanggal 7 April 1965, masih dalam rangka lanjutan PCPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah Setyo Suparno, BRE melaporkan hasil melaksanakan tugas

ke Jakarta, Pemerintah Pusat cq Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga menyetujui untuk mengeluarkan otorisasi sebesar Rp. 93 juta untuk keperluan pembelian dan pemasangan tiang listrik di Palangka Raya, pembelian barang dan perkakas bagi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk 2 (dua) buah kendaraan roda empat jenis jeep, 2 (dua) buah kendaraan roda dua (sepeda motor), 2 (dua) buah mesin pompa air untuk instalasi Saluran Air Minum Palangka Raya dan 500 (lima ratus) zak semen serta alat untuk Saluran Air Minum Palangka Raya. Barang/alat-alat diangkut dengan kapal PT Labehu langsung ke Palangka Raya.

Tanggal 27 April 1965, dibentuk Panitia Peresmian Kotapraja Palangka Raya dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7/Pem.292-C-2-1.

Minngu pertama bulan Mei, mesin pemecah batu (“pengunyah” batu) Proyek Jalan Kalimantan (Projakal) di Tangkiling telah “bekerja” penuh, sehingga kegiatan pengaspalan Jalan Negara Palangka Raya – Tangkiling berjalan lebih lancar/cepat.



Gamabar 5.5.

Berbagai alat berat yang digunakan dalam proyek jalan kalimantan (projakal) beratnya medan membuat alat berat ini sangat penting untuk memperlancar pekerjaan

(Sumber : Musium Tjilik Riwut)

Bulan Mei. Lanjutan pekerjaan pembuatan lapangan basket dan pekerjaan pemagaran keliling Stadion Sanaman Mantikei terus dipercepat pelaksanaannya, antara lain sebagai persiapan menghadapi peresmian Kotapraja Palangka Raya.

Tanggal 27 Mei 1965, Rombongan Anggota DPA-RI dipimpin oleh Ibu Emma Puradiredja tiba di Palangka Raya. Selain Palangka Raya, Tim DPA-RI juga mengunjungi Kuala Kurun dan Tewah, Kabupaten Administratif Gunung Mas serta Kuala Kapuas ibukota Kabupaten Kapuas. Dalam rombongan itu disertai Wartawan/Reporter RRI Pusat Jakarta, Wartawan LKBN ANTARA dan 6-orang Seniman/Artis Ibukota diantaranya Lilis Suryani dan Adi Mulya.

Pada bulan Juni, baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kotapraja Administratif Palangka Raya melakukan berbagai persiapan menyambut peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya. Diantaranya adalah pembangunan berbagai fasilitas yang akan dipergunakan menjelang dan pada saat peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya pada tanggal 17 Juni 1965.

Tanggal 17 Juni 1965, peresmian Kotapraja Palangka Raya oleh Menteri Dalam Negeri R.I. Dr. Soemarno Sosroatmodjo yang dilanjutkan dengan Pawai keliling kota dan Pasar Malam selama 5 malam berturut-turut.

DPRD-GR Kotapraja Palangka Raya diresmikan pada tanggal 23 Juli 1965 dan mulai proses penjaringan calon Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

Tanggal 7 Agustus 1965, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Mayjen TNI D. Soeprayogi, meletakkan batu pertama Pembangunan Gedung Induk Kesenian BALAI ANTANG berlokasi disebelah barat Bundaran Besar/Muara Jalan Sukarno-Hatta. Lokasi pembangunan tersebut sekarang terletak di Komplek Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Kalimantan Tengah. Namun rencana pembangunan gedung kesenian tersebut tidak dilanjutkan sampai sekarang.

Tanggal 12 September 1965, pukul 10.00 WITA Menteri Urusan Veteran Mayjen TNI M. Sarbini meletakkan batu pertama pembangunan Gedung LVRI Kalimantan Tengah,

lokasi pinggir Selatan Jalan Sukarno-Hatta (sekarang Jalan Yos Sudarso). Kini lokasi itu ditempati/areal kompleks Stasiun Relay TV-RI Palangka Raya.

Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI A. Yani memimpin Rombongan Komando Tertinggi (KOTI G.V) berkunjung ke Palangka Raya, pada tanggal 14 September 1965.

Tanggal 18 September 1965, Janti Saconk dilantik sebagai Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya yang pertama, oleh Gubernur Tjilik Riwut atas nama Menteri Dalam Negeri R.I.

CATATAN KAKI :

Kronik ini disusun berdasarkan bahan-bahan tertulis yang disampaikan TT. Suan; Anonim. 1971. *Brosur Kotamadya Palangka Raya*. Sekretariat Daerah Kotamadya Palangka Raya; dan Endy. 2003. *Time Line Story. Sejarah Pembangunan Kota Palangka Raya berdasarkan urutan tahun*. Manuskrip tidak diterbitkan.

BAB VI

WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 1965-1975

1. JANTI SACONK¹

(Walikota Periode 18 September 1965 s/d 18 Oktober 1965)

Janti Saconk adalah Walikota Palangka Raya yang pertama. Pada waktu itu sebutannya adalah Walikota Kepala daerah Kotapraja Palangka Raya dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965) sebutannya berubah menjadi Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya. Beliau dilantik oleh Gubernur Tjilik Riwut atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 September 1965 atau lebih kurang 3 bulan setelah Kotapraja Palangka Raya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI. Dr. Soemarno Sosroatmodjo. Janti Saconk merupakan Walikota Palangka Raya yang termuda, karena pada waktu menjabat baru berusia 36 tahun. Sebelum menjabat sebagai Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya, Janti Saconk adalah Sekretaris Kotapraja (administratif) Palangka Raya.

Janti Saconk dilahirkan di Penda Ketapi masuk dalam wilayah Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Desa Penda Ketapi lebih kurang berjarak ½ jam perjalanan dengan perahu motor dari Kelurahan Mandomai, Ibukota Kecamatan Kapuas Barat. Tidak ada yang tahu tanggal yang tepat kapan beliau dilahirkan, tetapi diperkirakan beliau lahir pada Bulan Juni 1929. Hal ini didasarkan pada keterangan S. Mutar (saudara sepupu Janti Saconk) bahwa Janti Saconk lahir 3 bulan lebih muda dari S. Mutar. S. Mutar sendiri lahir pada Bulan Maret 1929. Janti

Saconk lahir sebagai anak kedua dari 3 orang bersaudara, anak pasangan Tiki Gatar Kunom dan Ramintan Lawak. Kakak sulungnya laki-laki bernama Sinar Saconk adalah pendiri PT. Saconk, distributor minyak tanah terbesar di Kalimantan Tengah, sedang adik perempuannya Erna Saconk menikah dengan S. Mutar tetap tinggal di Penda Ketapi.



Gambar 6.1. Janti Saconk, Walikota Palangka Raya pertama beserta keluarga

Janti Saconk muda memperoleh pendidikan formal “ala” Belanda. Dia pernah mengenyam pendidikan di *Standart School* kemudian disambung ke *Schakel School* di Kuala Kapuas. Keterangan ini sebenarnya agak membingungkan karena *Standart School* dan *Schakel School* mempunyai jenjang yang sama, mungkin saja *Standart School* yang ditempuhnya tidak sampai kelas lima sehingga masih harus disambung ke sekolah peralihan (*Schakel School*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal yang diperoleh Janti Saconk sampai pada tingkat *Schakel School*. Janti Saconk juga pernah mengikuti pendidikan di bidang

kesehatan (semacam mantri kesehatan) di Banjarmasin dan sudah magang menjadi petugas kesehatan (paramedis) di RS Ulin di Banjarmasin. Namun rupanya menjadi petugas kesehatan (paramedis) bukan lah panggilan jiwanya, karena sebelum menyelesaikan pendidikannya di bidang kesehatan Janti Saconk merantau ke Jakarta pada tahun 1949. Tidak jelas apa pekerjaan tetap Janti Saconk selama di Jakarta, tetapi yang pasti di Jakarta, Janti Saconk memperoleh kematangannya dalam kehidupan politik melalui aktivitas organisasi yang digelutinya.

Selama masa pendidikan sebagai paramedis di Banjarmasin, Janti Saconk berkenalan dengan Husiana S Lamon, temannya sesama pelajar di pendidikan kesehatan. Husiana S Lamon adalah seorang siswi yang pandai, dan karena prestasinya yang menonjol dia memperoleh beasiswa untuk memperdalam keahliannya di Jakarta. Di Jakarta, dia bertemu lagi dengan Janti Saconk, dan keduanya akhirnya menikah di Jakarta pada tahun 1950. Pasangan Janti Saconk – Husiana S Lamon dikaruniai 10 orang anak yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.

Pada saat Propinsi Kalimantan Tengah telah berdiri sendiri pada tahun 1957, Tjilik Riwut memanggil seluruh putra Kalimantan Tengah yang ada di perantauan untuk kembali dan membangun Propinsi Kalimantan Tengah yang baru lahir itu. Ajakan tersebut tertuang dalam bukunya yang berjudul “Kalimantan Memanggil” yang diterbitkan pada tahun 1958. Janti Saconk sebagai salah seorang putra Kalimantan, terpanggil dengan ajakan Tjilik Riwut tersebut, sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kalimantan Tengah pada tahun 1959.

Karier Janti Saconk di Propinsi Kalimantan Tengah dimulai di Kapuas dengan menjabat sebagai Kepala Kantor Pengerahan Tenaga Rakyat (PETRA) tahun 1959. Tahun 1960, Janti Saconk pindah ke Kota Palangka Raya dan bekerja di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada bagian yang menangani urusan politik (semacam Badan Keselamatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sekarang), kemudian pindah lagi ke Kotapraja Palangka Raya pada tahun 1963, dengan jabatan Sekretaris Kotapraja Palangka Raya dibawah W. Coenraad sebagai Walikota (administratif) Kotapraja Palangka Raya pada waktu itu. Pada saat beliau menjabat sebagai Sekretaris Kotapraja ini telah dimulai rintisan jalan darat ke Kelurahan Marang (lama) dan Kelurahan Bereng Bangkirai.

Pada tahun 1965, Janti Saconk dipilih oleh DPRD–GR Kotapraja Palangka Raya sebagai Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya dan dilantik pada tanggal 10 September 1965. Namun demikian, Janti Saconk juga menjadi Walikota yang terpendek dalam melaksanakan tugasnya karena pada tanggal 18 Oktober 1965 beliau harus mengakhiri jabatannya. (hanya 1 bulan bertugas dan belum sempat menerima gaji).

Dikalangan keluarga, rekan dan sejawatnya, Janti Saconk dikenal sebagai pribadi yang keras, tegas dan berani serta tidak pernah ragu-ragu. Di samping itu, beliau juga mempunyai semangat membangun dan jiwa sosial yang tinggi. Keputusannya untuk merantau ke Jakarta meskipun dilarang oleh ibundanya sendiri serta keputusannya untuk kembali ke Kalimantan Tengah pada tahun 1959 telah membuktikan sifat-sifatnya tersebut. Diceritakan juga bahwa selama di Jakarta,

Janti Saconk juga menampung saudara-saudaranya untuk meneruskan pendidikan dan sering membantu pelajar/mahasiswa asal Kalimantan Tengah yang sedang menuntut ilmu di Jakarta.

Kalau tanggal kelahirannya tidak diketahui, proses berakhirnya jabatan Janti Saconk juga diliputi misteri. Janti Saconk ditangkap oleh Tentara pada tanggal 18 Oktober 1965 di rumahnya (sekarang terletak di belakang Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah) pada jam 22.00 WIB. Tidak jelas, alasan kenapa Janti Saconk ditangkap, berbagai kemungkinan telah diajukan oleh orang-orang yang mengenalnya misalnya karena keterlibatannya dengan orang-orang kiri (Janti Saconk sendiri adalah Ketua Pertindo Palangka Raya), karena mendirikan Dewan Revolusi, karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno dan sebagainya. Janti Saconk sendiri menyatakan kepada istrinya bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan G 30 S / PKI dan ini semua hanya fitnah dari orang-orang yang tidak senang.

Berbagai dugaan tersebut tidak memperoleh jawaban yang pasti karena Janti Saconk tidak pernah diadili. Kejatuhan Janti Saconk adalah taruhan dari satu pertarungan politik yang memang telah dijalani dan digelutinya sejak masa mudanya.

2. M. AGOES IBRAHIM²
(Walikota Periode 19 Oktober 1965 s/d Januari 1967)

M. Agoes Ibrahim merupakan salah satu dari tiga Walikota Palangka Raya yang tidak terlalu diketahui latar belakangnya. M. Agoes Ibrahim ditunjuk sebagai

walikota menggantikan Janti Saconk, dan pada saat ditunjuk sebagai Walikota Palangka Raya berpangkat *bupati*, sehingga dalam berbagai catatan sering disebutkan bahwa pengganti Janti Saconk sebagai Walikota Palangka Raya adalah Bupati M. Agoes Ibrahim. Perlu diketahui bahwa *Bupati* (sebagaimana halnya *Gubernur* dan *Residen*) pada waktu itu merupakan pangkat dalam kepegawaian, bukan merupakan jabatan. Penunjukkan M. Agoes Ibrahim sebagai Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya mendapat persetujuan dari DPRD-GR Kotamadya Palangka Raya.



Gambar 6.2 Walikota M. Agoes Ibrahim (tengah, di depan tiang bendera) bergambar bersama anak buahnya di depan Kantor Walikota

Sumber : Arsip Keluarga W. Sandy

Masa lalu beliau tidak terlalu diketahui. Menurut keterangan berbagai sumber, M. Agoes Ibrahim datang ke Propinsi Kalimantan (pada waktu itu) karena dibawa oleh Gubernur Kalimantan Dr. Moerdjani sebagai ajudan gubernur. Pada

waktu, Gubernur RTA. Milono menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, beliau masih bertugas sebagai ajudan, dan pada waktu Propinsi Kalimantan Tengah terbentuk dan masih berkedudukan di Banjarmasin, M Agoes Ibrahim bertugas pada Kepala Bagian Umum. Ketika Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sudah pindah ke Kota Palangka Raya, M. Agoes Ibrahim ditunjuk sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, dan pada waktu itu beliau sudah berpangkat *bupati*. Seperti dikemukakan di atas, setelah Janti Saconk ditangkap, M. Agoes Ibrahim ditunjuk sebagai Walikota Palangka Raya.

M. Agoes Ibrahim hanya bertugas sebagai Walikota Palangka Raya lebih kurang 15 (lima belas) bulan, Namun demikian para saksi sejarah menceritakan bahwa masa pemerintahan M. Agoes Ibrahim adalah masa-masa yang menentukan bagi kemajuan Kota Palangka Raya. Hal ini disebabkan karena situasi yang berkembang Pasca Gerakan G 30 S/PKI adalah situasi yang mencekam dimana masyarakat diliputi oleh keragu-raguan akibat peristiwa tersebut. Peranan Walikota M. Agoes Ibrahim sangat penting dalam mempertahankan semangat untuk membangun Kota Palangka Raya yang baru lahir tersebut. M. Agoes Ibrahim adalah pejabat yang sangat merakyat dan sering disebut sebagai “orang lapangan” karena hubungannya yang sangat baik dengan tokoh-tokoh masyarakat di setiap tempat di Kota Palangka Raya. Bukan hal yang aneh jika Walikota M. Agoes Ibrahim keluar masuk pasar untuk menemui para pedagang. Hubungan yang baik itu berperan dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak penguasa militer, sehingga perpecahan lebih jauh dapat dihindarkan.

Pada bulan Desember 1966, diresmikan jalan tembus Palangka Raya-Tangkiling. Dan kegiatan itu merupakan kegiatan terakhir beliau sebagai Walikota Palangka Raya. Pada bulan Januari 1967 M. Agoes Ibrahim melakukan serah terima jabatan dengan Letkol Inf. W. Sandy. Letkol Inf. W. Sandy menjabat sebagai Pejabat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya sebelum

akhirnya dipilih secara resmi. Setelah menjabat sebagai Walikota Palangka Raya, M. Agoes Ibrahim ditugaskan di Barito dan Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat).



Gambar 6.3.

M. Agoes Ibrahim (menandatangani dokumen) menyerahkan jabatan kepada Letkol Inf. W. Sandy

(Sumber : Arsip keluarga W. Sandy)

3. LETNAN KOLONEL INFANTERI W. SANDY³ (Walikota Periode Januari 1967 s/d 6 September 1975)

Letkol Inf. W. Sandy adalah Walikota Palangka Raya periode 31 Agustus 1967 sampai dengan 6 September 1975, dan sampai saat ini W. Sandy merupakan Walikota Palangka Raya yang terpanjang masa jabatannya (8 tahun, 6 hari). Sebelum dilantik secara definitif, W. Sandy sudah menjadi Pejabat Walikota Palangka Raya sejak bulan Januari 1967 menggantikan M. Agoes Ibrahim, sehingga secara keseluruhan masa jabatannya adalah 8 tahun 8 bulan. Beliau dilantik oleh Gubernur R. Sylvanus pada tanggal 31 Agustus 1967 dengan sebutan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya. Ada dokumen yang menyebutkan bahwa W. Sandy adalah Walikota yang kedua karena M. Agoes

Ibrahim hanya pejabat sementara bukan Walikota yang dipilih oleh DPR – GR Kota Praja Palangka Raya.



Gambar 6.4. Letnan Kolonel Inf. Waldus Sandy, Walikota Palangka Raya ketiga
Letkol W. Sandy dalam pakaian dinas Walikota (kiri atas); Letkol W. Sandy beserta istri (kanan bawah); Saat pelantikan sebagai Pejabat Walikota pada Bulan Januari 1967 (kanan atas); Saat pelantikan sebagai Walikota Palangka Raya (kanan bawah).

(Sumber : Arsip Keluarga W. Sandy)

W. Sandy dilahirkan di Kuala Kapuas (Ibukota Kabupaten Kapuas) pada tanggal 3 September 1928 sebagai anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan suami istri Cornelis Sandy dengan Adriana. Saudara-saudara W. Sandy tersebar di Kota Kuala Kapuas dan Palangka Raya. W. Sandy mengenyam pendidikan Belanda yang terkotak-kotak, beliau menempuh Sekolah Rakyat (SR) selama 2 tahun (1933 sampai dengan 1934) di Luwuk Kanan (sekarang Kabupaten Katingan), kemudian disambung HDS (Holland Dayak School – Sekolah setingkat Holland Inlandsche School/HIS yang didirikan oleh Organisasi Pakat Dayak) di Kuala Kapuas dan selesai tahun 1936. Selanjutnya beliau menamatkan pendidikan di Christelieke Holland Inlandsche School (Chr. HIS) di Banjarmasin pada tahun 1942. Informasi ini menunjukkan bahwa W. Sandy memperoleh pendidikan setingkat HIS namun dilakukan pada sekolah yang berbeda-beda. Waktu studi yang dihabiskan adalah 9 (sembilan) tahun dari tahun 1933 sampai dengan 1941 untuk tamat sampai kelas 7 sebagai akibat perpindahan sekolah tersebut. Pendidikan W. Sandy disambung di Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO) yang diselesaikannya pada tahun 1945. Pada tahun 1946, W. Sandy belajar di SMT (Sekolah Menengah Tinggi) di Banjarmasin, namun tidak sampai satu tahun karena beliau segera masuk ke Akademi Militer Angkatan II di Yogyakarta.

Selama menjadi Cadet (sekarang Taruna) W. Sandy menjalani pendidikan di Malang (Jawa Timur) mulai tahun 1946 sampai dengan 1948, lalu disambung di Yogyakarta sampai tahun 1950. Pada tanggal 25 Januari 1950, W. Sandy menyelesaikan pendidikan militernya dan memperoleh pangkat Letnan Dua (Letda). Dan dari sinilah karier militernya dimulai. Berbagai jabatan militer pernah diduduki W. Sandy baik di lapangan maupun dalam markas komando, dan tempat tugasnya pun berganti-ganti. W. Sandy pernah menjabat sebagai Kasi II STM II Co TTK (1951), Komando Detasemen Brigade “ B “ STM II TTK (1950), Komandan Kompi B Bn 6001 TTK (1950 – 1952), Pa Panjata ALBAD (1952) di Bandung, Pa DPDAD KMKB di Bandung (1954 – 1956), Kep. Bin III DPDAD Yonif III/

Siliwangi di Bandung (1957 – 1958), Pa DPDAD/Jasdam Kalteng di Banjarmasin (1958), Wakil Interpa Kodam Kalteng di Banjarmasin / Sampit (1959 – 1962) Ps Dandim Palangka Raya (1962), Dandim 1104/Kotawaringin Barat (1963 – 1965) dan Ass. 6 Kaskodam XI / Tambun Bungai (1965). Pada bulan Januari 1967, W Sandy dilantik sebagai Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya. Pada saat menjabat sebagai Walikota Palangka Raya, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1972, W. Sandy memperoleh kenaikan pangkat menjadi Kolonel.

W. Sandy juga punya pengalaman terlibat dalam berbagai pertempuran mulai dari clash I (1947), pemberontakan Madiun (1948), clash II (1949), pemberontakan Ibnu Hajar (1950), DI/TII (1954), Simbar (1958) dan G 30 S PKI (1965). Dalam buku Sejarah Kalimantan Tengah, W. Sandy juga terlibat dalam perang gerilya melawan Belanda di pedalaman Kalimantan Tengah. W. Sandy menikah dengan Rusie A. Kiting pada tanggal 17 Oktober 1954 dan dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang putra dan 9 (sembilan) orang putri.

Dalam masa jabatan yang begitu lama, ada beberapa hal yang sangat menarik dalam masa pemerintahan W. Sandy. Hal yang paling menonjol adalah peristiwa yang dalam buku ini disebut “ Gugatan W. Sandy “. Peristiwa ini muncul ketika W. Sandy sebagai Walikota merasakan adanya kemunduran pembangunan sarana dan prasarana Kota Palangka Raya setelah peristiwa G 30 S PKI. Pasca peristiwa tersebut perhatian masyarakat dan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah serta para pejabat baik pejabat sipil maupun militer terhadap pembangunan Kota Palangka Raya sangat jauh berkurang. Hal ini tentu tidak lepas dari kedudukan Kota Palangka Raya pada masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana Palangka Raya adalah sebuah kota yang pembangunannya dicanangkan oleh Presiden Soekarno (lebih jauh dapat diperiksa Pidato Mendagri Dr. Soemarno Sostroatmodjo pada saat peresmian Kotapraja pada lampiran 4). Dalam kedudukan sebagai

Walikota, W. Sandy tidak bisa tinggal diam melihat keadaan ini karena itu beliau mengirimkan surat kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah (Gubernur dan Ketua DPRD – GR) untuk “meninjau ulang kedudukan Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah” (lihat kotak 7)

Kotak 7 : Surat W. Sandy kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah

<u>WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA PALANGKA RAYA</u>	
No : Pem.74/H-II/68	Palangka Raya, 12 Pebruari 1968
Lampiran : 1 (satu) expl.	Kepada
Pokok : Agar diadakan Tinjauan tentang Kedudukan PALANGKA RAYA Sebagai Ibukota Prop. Kalimantan Tengah.	Yth. 1. Gubernur KDH Prop. KalTeng. 2. Ketua DPRD-GR Prop. KalTeng Di - <u>PALANGKA RAYA</u>
Dengan hormat,	
I.	Mengingat suatu manifestasi dari kepercayaan yang dilimpahkan oleh Negara, Bangsa dan Pemerintah ke atas pundak kami selaku Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya, merupakan suatu kehormatan yang tinggi, disamping meminta tanggung jawab yang besar untuk dapat menciptakan serta memelihara suasana stabil yang dinamis, aktif, positif dan produktif.
II.	Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk selalu mengutamakan kepentingan umum diatas segala-galanya, disertai penuh iktikad dan tekad menciptakan Palangka Raya dan membinanya serta ingin merubah dan mentransformirnya untuk diarah luruskan kepada prasarana-prasarana, baik ideologis, politis, ekonomis, kulturil dan militer.
III.	Tugas tersebut merupakan tantangan yang maha berat terutama dalam masa transisi yang penuh dengan proses beradunya keadaan-keadaan yang positif dan negatif.
IV.	Dalam situasi dan kondisi demikianlah, maka tiada pilihan lain bagi kami selain meminta:
a.	Agar diadakan tinjauan tentang kedudukan Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.
b.	Penciptaan suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis dari para cerdas pandai yang merupakan suatu wahana kristalisasi yang penting.
V.	Demikianlah pengharapan kami semoga mendapat perhatian dan pelaksanaan dalam waktu dekat.
WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA PALANGKA RAYA, d.t.t.	
W. S A N D Y Letkol. Inf. Nrp. 15166	
Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada :	
1.	Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2.	Yth. Panglima Kodam XI / TB di Palangka Raya.
3.	Yth. Panglima Daerah Angkatan Kepolisian XII Kalimantan Tengah.
4.	Yth. DPRD – GR Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya

Sumber : Brosur Kotamadya Palangka Raya (halaman 18)

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam surat, banyak pihak menyebutkan bahwa W. Sandy ingin memindahkan Ibukota Propinsi Kalimantan

Tengah ke Pulang Pisau. Tidak jelas apakah gugatan tersebut hanyalah gertakan atau ancaman yang sungguh-sungguh.

Namun demikian berdasarkan analisa dari berbagai bukti yang ada dan para narasumber yang ditemui, kesimpulan yang dapat diambil dari “Gugatan W. Sandy“ tersebut adalah wujud dari keprihatinan seorang Walikota terhadap perkembangan pembangunan di wilayahnya. W. Sandy menyadari bahwa tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat/Propinsi Kalimantan Tengah, pembangunan Kota Palangka Raya tidak akan mengalami kemajuan yang nyata sementara perhatian yang diharapkan tidak muncul. Di samping itu, pada saat yang sama masyarakat yang semula sangat antusias membantu pelaksanaan pembangunan Kota Palangka Raya merasa takut dan “ragu-ragu“ semenjak meletusnya peristiwa G 30 S PKI.

Rencana pemindahan Ibukota ke Pulang Pisau adalah cara W. Sandy untuk menarik perhatian dari semua elemen agar memikirkan kembali pembangunan Kota Palangka Raya. W. Sandy tentu menyadari bahwa pemindahan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah tentu bukan menjadi wewenangnya bahkan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah pun tidak dapat memutuskan sendiri. Di samping itu, sangat tidak masuk akal seorang Walikota dari sebuah Ibukota Propinsi ingin melepaskan kebanggaan tersebut sementara sebelumnya telah begitu banyak kota atau daerah lain yang ingin menjadi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan fakta-fakta itu, dapat disimpulkan bahwa semua itu merupakan kiat dari W. Sandy untuk memajukan Kota Palangka Raya.

Gugatan W. Sandy tersebut terbukti cukup berhasil karena Surat Walikota tersebut segera dijawab dengan naskah bersama yang intinya meneguhkan kembali tekad untuk membangun Kota Palangka Raya bersama-sama (Kotak 8).

Kotak 8 : Naskah Bersama Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

NASKAH BERSAMA MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 (L.N. Nomor 53) tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah. 1. Piagam Palangka Raya tanggal 30 Nopember 1968. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotamadya Palangka Raya. 3. Ketetapan Sidang Umum MPRS – RI ke – V Nomor XLI/MPRS/68 tanggal 27 Maret 1968 tentang tugas pokok Kabinet Pembangunan.
Memperhatikan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Intruksi Presiden RI Nomor 23 tahun 1968 yang menetapkan tema pokok perayaan 17 Agustus 1968 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Mempersiapkan pengerahan dana dan tenaga, guna melaksanakan pembangunan (Nasional dan Daerah). b. Memupuk persatuan dan kesatuan Indonesia. c. Membina kehidupan masyarakat yang tertib dan dinamis. 2. Pidato Radio para Anggota Muspida Propinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke – 23 tanggal 17 Agustus 1968. 3. Tekad bersama yang merupakan kesatuan pendapat Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang bersumberkan pada rasa tanggung jawab untuk membangun dan membina daerah Kalimantan Tengah, khususnya Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.
Menimbang	: Perlu menyatakan NASKAH BERSAMA sebagai pegangan dasar daripada tekad Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan konsekuensi dan kesetiaan terhadap Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Menimbang	: Dengan penuh rasa tanggung jawab untuk meneruskan pembangunan pembinaan dan pengembangan Palangka Raya sebagai IBUKOTA Propinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan pusat dan sumber segala kegiatan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan (sprituil dan materil) dan pertahanan.
Dinyatakan : di Palangka Raya Pada Tanggal : 17 Agustus 1968 Pada Jam : 08.00	
1. PANGDAM XI/TAMBUN BUNGAI Ketua	2. Gub. Kep. Daerah Ppropinsi Kalteng Wakil Ketua
<u>HADISOEJATNO</u> Brigjen TNI	<u>Ir. R. SYLVANUS</u>
3. PANG DAK XII KALIMANTAN TENGAH Anggota	4. JAKSA TINGGI KALIMANTAN TENGAH Anggota
<u>Drs. MOERJONO</u> Kombes Pol.	<u>SUHERMAN, SH.</u>

Sumber : Arsip T.T. Suan

Perhatian Pemerintah Pusat dan Propinsi Kalimantan Tengah terhadap pembangunan Kota Palangka Raya semakin tebal, apalagi setelah kedatangan Presiden Soeharto beserta 6 (enam) Menteri Kabinet Pembangunan, pada tanggal 18 Oktober 1968. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan adalah bantuan dana untuk membangun Kantor Balaikota yang terletak di Jalan Diponegoro (sekarang lokasi tersebut dibangun Kantor Bank Indonesia Cabang Palangka Raya). Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud pada tanggal 16 Juni 1970 berkenan meresmikan kantor tersebut, dan Kantor Balaikota pindah dari Jalan Darmosugondo ke Jalan Diponegoro.



Gambar 6.5. Presiden Soeharto saat berkunjung ke Kota Palangka Raya
Saat kedatangan Presiden beserta Ibu Tien (kiri) dan Presiden ditengah-tengah
pejabat Kalimantan Tengah
(Sumber : Arsip Keluarga W. Sandy)



Gambar 6.6. Kantor Walikota Palangka Raya di Jalan Diponegoro
(Sumber : Arsip Keluarga W. Sandy)

Kebijakan W. Sandy yang lain yang sangat bersejarah adalah “penggantian lambang daerah“. W. Sandy berusaha menelusuri dan meneliti proses lambang Kotapraja Palangka Raya yang dibawa terjun dengan payung pada saat peresmian Kotapraja otonom (17 Juni 1965). Namun menemui jalan buntu sehingga pada tanggal 13 Agustus 1969 dikeluarkan pengumuman Nomor : 339/H-II/1969 tentang “Sayembara Pembuatan Lambang Daerah Kotamadya Palangka Raya”. Namun demikian, dari 30 calon lambang yang diterima, dari para kontestan tidak satupun yang memuaskan sehingga akhirnya dibuat lambang daerah yang baru sebagai hasil sintesa dari 30 calon lambang yang masuk tadi.

Setelah lambang tersebut diberi penjelasan oleh Handjung Sahai, kemudian diajukan kepada DPRD – GR Kotamadya Palangka Raya untuk memperoleh persetujuan. Akhirnya lambang daerah tersebut disetujui oleh DPRD – GR Kotamadya Palangka Raya dan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor : 2 / DPRD – GR / 1970 tanggal 17 Juni 1970. Lambang daerah inilah yang sampai sekarang dipakai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.



Gambar 6.7.

Peresmian Jembatan Ulin di kompleks Flamboyan sepanjang 323 meter.

(Sumber : Arsip Keluarga W.Sandy)

Meskipun demikian, W. Sandy juga tidak lepas dari kontroversi. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada awal masa pemerintahan Orde Baru tidak mampu diimbangi dengan penyediaan prasarana yang memadai khususnya

pasar, akibatnya para pedagang meluber sampai ke jalan dan muncullah Pasar Blauran yang tetap bertahan sampai sekarang. W. Sandy juga membangun jalan titian di Komplek Flamboyan sepanjang 323 m dengan lebar 4 meter pada Tahun Anggaran 1972/1973. Langkah ini dinilai sebagai penyebab munculnya kawasan kumuh di Kota Palangka Raya yang tidak pernah dapat diatasi sampai sekarang. Benar dan tidaknya kontraversi ini perlu dijawab dengan satu penelitian yang mendalam.

4. LETNAN KOLONEL CIN MADNOCH⁴
(Walikota Periode 6 September 1975 s/d 27 Januari 1978)

Setelah Kolonel W. Sandy, maka Walikota Palangka Raya yang berikutnya adalah Letnan Kolonel Corp Intendant (CIN) Madnoch yang dilantik menjadi Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palangka Raya oleh Gubernur R. Sylvanus pada tanggal 6 September 1975. Ketika menjabat sebagai Walikota Palangka Raya, beliau merangkap jabatan sebagai Perwira Intendent DAM 10 LM (PAINTDAM). Sama halnya dengan M. Agoes Ibrahim, tidak terlalu banyak informasi yang diperoleh tentang beliau.



Gambar 6.8.

Letkol CIN Madnoch (Walikota Palangka Raya Periode 6 September 1975 s/d 27 Januari 1978)

(Sumber : Arsip Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya)

Madnoch dilahirkan di Cirebon (Jawa Barat) dan sebelumnya pernah bertugas di Kodam XI/Tambun Bungai. Setelah Kodam XI/Tambun Bungai dibubarkan, beliau dipindahkan ke Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, dan ketika masih bertugas di Banjarmasin ini beliau dipilih menjadi Walikota Palangka Raya. Letkol CIN Madnoch diperkirakan memperoleh ketrampilan dibidang militer dari Tentara Jepang, dan bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) pada awal Proklamasi Kemerdekaan RI. Beliau juga pernah terlibat dalam pertempuran melawan DI/TII (pada waktu itu sudah berpangkat Sersan II) dan pernah juga bertugas di Wonosobo (Jawa Tengah). Menurut beberapa informasi, keluarga Madnoch tidak dikarunia anak, tetapi mereka mempunyai anak angkat.

Letkol CIN Madnoch selama menjabat sebagai Walikota Palangka Raya mempunyai hubungan yang dekat dengan tokoh-tokoh agama. Di samping itu, beliau sangat memperhatikan dunia pendidikan serta seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para kepala desa. Letkol CIN Madnoch adalah seorang yang menyukai kesenian terutama kesenian Sunda. Di rumah beliau, terdapat seperangkat peralatan kesenian Sunda, dan seringkali dimainkan oleh beliau sendiri bersama kawana-kawan beliau yang mempunyai kegemaran yang sama. Diceritakan juga bahwa beliau seorang yang terbuka, berpenampilan rapi dan cermat dalam bekerja.

Kota Palangka Raya pada waktu itu masih terbilang kecil, jumlah penduduknya lebih kurang hanya 20.000 jiwa dan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota hanya 150-an orang. Namun Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memiliki 2 (dua) dinas, yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kesehatan. Guna memperluas pengembangan kota, beliau membebaskan lokasi di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 (sekarang lokasi Pasar Kahayan), dan

penduduknya diberikan tanah di lokasi HPH PT. Kayon (Jl. Tingang dan sekitarnya). Pembangunan lokasi tersebut dilakukan oleh Walikota penggantinya. Letkol CIN Madnoch juga membangun Asrama Putri Nyai Balau (dibelakang rumah jabatan Walikota – terletak di Jalan Nyai Balau). Dana pembangunan asrama tersebut berasal dari bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Kodam/Korem dan Bupati Barito Utara.

Masa jabatan Letkol CIN Madnoch hanya 3 tahun 4 bulan, setelah itu beliau diganti akibat sering sakit karena sudah berusia lanjut. Kedekatannya dengan masyarakat menimbulkan hubungan yang mendalam. Dan pada saat beliau akan meninggalkan Kota Palangka Raya, banyak tokoh dan anggota masyarakat yang mengantarkan kepergian beliau. Penggantinya adalah Letnan Kolonel CZI Kadijoto.

CATATAN KAKI :

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendeta Demie HS Lamon (putra Janti Saconk) dan S. Sutar (saudara sepupu/saudara ipar Janti Saconk) pada tanggal 29 Maret 2003 serta informasi para peserta seminar pada tanggal 27 Nopember 2002.

² Berdasarkan hasil Wawancara dengan Endardono tanggal 3 April 2003; Wawancara dengan TT Suan pada tanggal 7 April 2003;

³ Berdasarkan wawancara dengan Endardono tanggal 3 April 2003; Keterangan para peserta seminar pada tanggal 27 Nopember 2003; Brosur Kotamadya Palangka Raya (diterbitkan pada tahun 1971); Arsip TT Suan; Wawancara dengan Putri W. Sandy. pada tanggal 9 Maret 2003.

⁴ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Endardono tanggal 3 April 2003; Wawancara dengan Drs. Sudaryanto tanggal 3 Juni 2003.

BAB VII

WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 1975 SAMPAI SEKARANG

1. LETNAN KOLONEL CZI KADIJOTO¹ (Walikota Periode 27 Januari 1978 s/d 16 September 1983)

Letnan Kolonel CZI Kadijoto menjadi Walikota Palangka Raya yang kelima menggantikan Letnan Kolonel CIN Madnoch, dan pada saat itu telah berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sehingga sebutannya berubah menjadi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya. Letkol CZI Kadijoto dilantik oleh Gubernur WA. Gara pada tanggal 27 Januari 1978.



Gambar 7.1.

Letkol CZI Kadijoto (Walikota Palangka Raya Periode 27 Januari 1978 s/d 16 September 1983)

(Sumber : Arsip Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya)

Riwayat hidupnya tidak terlalu banyak diketahui karena keterbatasan akses informasi yang diperoleh. Kadijoto dilahirkan di Ngawi (Jawa Timur) dan sebelum

bertugas di Kota Palangka Raya, beliau bekerja di Rindam dan Balikpapan Beliau juga pernah memperoleh pendidikan di Akademi Teknik AP di Bandung dan memperoleh pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Keluarga Letkol CZI. Kadijoto mempunyai 3 (tiga) orang anak, terdiri dari 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.

Letkol CZI Kadijoto dikenal sebagai orang yang keras, tegas dan sangat disiplin, disamping itu beliau juga pintar dalam mencari terobosan-terobosan guna kemajuan Kota Palangka Raya. Pada masa jabatan Letkol CZI Kadijoto mulai dikenal secara luas Program Inpres, dan salah satu bangunan yang dibangun pada masa itu adalah Pasar Kahayan yang terletak di Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya. Kedua bangunan tersebut (atas dan bawah) di bangun dengan dana Inpres sehingga sering disebut Pasar Inpres. Lokasi bangunan pasar Kahayan atas diperoleh dari sumbangan tanah oleh TNI Angkatan Darat. Namun hibah tanah ini tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen tanah yang kuat sehingga kepemilikannya menjadi tidak jelas. Letkol CZI Kadijoto juga memperkenalkan genteng asbes sebagai pengganti atap sirap dari kayu ulin yang harganya semakin mahal.

Langkah lain yang dilakukan beliau adalah melakukan (untuk pertama kalinya) intensifikasi pajak dan retribusi daerah, misalnya retribusi pasar dan Pajak Pembangunan I (sekarang Pajak Hotel dan Restoran). Pada masa sekarang langkah tersebut tentu dipandang sebagai langkah standar, tetapi pada jamannya merupakan satu terobosan.

Dengan persetujuan DPRD Kota Palangka Raya (waktu itu sebutannya adalah DPRD Kotamadya Dati II Palangka Raya), Letkol CZI Kadijoto juga melakukan perubahan nama beberapa ruas jalan di Kota Palangka Raya. Nama-nama jalan di Kota Palangka Raya sebelumnya ditentukan dengan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5/Pem.326-C.2-3 tanggal 8 Mei 1962 (secara terperinci disajikan di kotak 9)

Kotak 9 : Nama-nama jalan sesuai Surat Keputusan Gubernur KDH Kalimantan Tengah Nomor 5/Pem.326-C.2-3 tanggal 8 Mei 1962 dan beberapa perubahan yang dilakukan.

1. Jalan Barut Ules	43. Jalan Pulau Kantan
2. Jalan Lewu Pulu	44. Jalan Tumbang Panjangei
3. Jalan Sanaman Mantikei	45. Jalan Krangkang
4. Jalan Tantaulang Bulau	46. Jalan Letnan Udara Iskandar
5. Jalan Darung Bawan	47. Jalan Haji Ikap
6. Jalan Pangeran Ratu Iamanudin (diubah menjadi Jalan Bridjen Katamso)	48. Jalan Kuala Kurun
7. Jalan Ratu Sukma Alamsyah (diubah menjadi Jalan Kapten Piere Tandaen)	49. Jalan Bukit Ngalangkang
8. Jalan Patih Tarongkah	50. Jalan Tamanggung Surapati
9. Jalan Bukit Raja	51. Jalan Tamanggung Silam
10. Jalan Batu Suli	52. Jalan Suta Omo
11. Jalan Pulau Malan	53. Jalan Patianom
12. Jalan Miri (diubah menjadi Jalan Hausmann Baboe)	54. Jalan Jayakarti
13. Jalan Hamputung	55. Jalan Mangkusari
14. Jalan Kahayan	56. Jalan Nansarunai
15. Jalan Barito	57. Jalan Manguntur
16. Jalan Kapuas	58. Jalan Pangunraun
17. Jalan Katingan	59. Jalan Amonrahu
18. Jalan Karau	60. Jalan Suta Negara
19. Jalan Sebangau	61. Jalan Panglima Batur
20. Jalan Arut	62. Jalan Pangeran Antasari
21. Jalan Seruyan	63. Jalan Putir Majang (diubah menjadi Jalan Letjen Suprato)
22. Jalan Lemandau	64. Jalan Kuster (diubah menjadi Jalan Walter Monginsidi)
23. Jalan Bukit Kaminting	65. Jalan Nyaru Menteng
24. Jalan Bukit Tandu	66. Jalan Pangeran Diponegoro
25. Jalan Gunung Bundang	67. Jalan Iman Bonjol
26. Jalan Liang Mangan	68. Jalan Peyan Tarahan
27. Jalan Datah Tangkasiang	69. Jalan Ajuh
28. Jalan Bukit Batu	70. Jalan Montalat
29. Jalan Tumbang Sanamang	71. Jalan Laung
30. Jalan Katunen	72. Jalan Tuhup
31. Jalan Nyai Undang	73. Jalan Bakanon
32. Jalan Kameluh	74. Jalan Saripoi
33. Jalan Putir Busu	75. Jalan Pasar Panas
34. Jalan Bandar	76. Jalan Tamban
35. Jalan Mangkikit	77. Jalan Anjir Sarapat
36. Jalan Kumai (diubah menjadi Jalan Gajah Mada)	78. Jalan Anjir Kalampan
37. Jalan Jelai	79. Jalan Tiang Gomba
38. Jalan Kalanaman	80. Jalan Merdeka
39. Jalan Manuhing	81. Jalan Pahlawan
40. Jalan Hausman Babu	82. Jalan Patrice Lumamba (diubah menjadi Jalan Ir. PM. Noor)
41. Jalan Tamanggung A Nikodemos	83. Jalan Darnosugondo
42. Jalan Kota Bataguh	84. Jalan Bungai

Kotak 9 (lanjutan)

85. Jalan Rambang	96. Jalan Adonis Samat
86. Jalan Gubernur Dr. Murjani	97. Jalan Damang Brahim
87. Jalan Pangram	98. Jalan A.M. Sangadji
88. Jalan Dandan Kahayan	100. Jalan Tamanggung Gatan
89. Jalan Damang Bahandang Balau (diubah menjadi Jalan Sulawesi)	101. Jalan Sulang
90. Jalan Pemuda (diubah menjadi Jalan Tambun Bungai)	102. Jalan Damang Sindi
91. Jalan Antang Bajela Bulau (diubah menjadi Jalan Arut, S. Parman dan A. Yani)	103. Jalan Riwut Dahiang
92. Jalan Kambe Hai	104. Jalan Tanguhan
93. Jalan Handjaliwan	105. I.A. Muring
94. Jalan Panganen	
95. Jalan Sumbu Kurung	

Nama – Nama Jembatan

1. Gubernur Dr. Murjani	Jalan Gubernur Dr. Murjani Sampai Muara PM. Noor.
2. Adonis Samat	Dimuka Kantor Telkom (yang dilintasi Toko Barata)
3. Husin Hamzah	Dekat Pasanggrahan Negara (menghubungi Jl. S. Parman – A.Yani)
4. A.M. Sangadji	Km. 1 Jalan Tangkiling (ujung Pasar Kahayan)
5. Iskandar	Km. 3 Jalan Tangkiling

Sumber : Arsip TT Suan

Catatan :

1. Jl. Asia Afrika (diganti menjadi Jalan Yos Sudarso)
2. Jl. Bahutai Dereh (diganti menjadi Jalan Dr. Soetomo)
3. Jl. Patahu (diganti menjadi Jalan Urip Soemarharjo)
4. Pada saat pemberian nama jalan ini (tahun 1962), ada beberapa ruas jalan yang baru punya nama sementara fisik jalannya sendiri belum ada.

Sesuai dengan UU Nomor 5/1974, masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun dan akhirnya pada tanggal 16 September 1983, Letkol CZI Kadijoto mengakhiri masa tugasnya sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya.

2. Drs. LUKAS TINGKES²
(Walikota Periode 16 September 1983 s/d 16 September 1988)

Setelah Letkol CZI Kadijoto, maka Walikota Palangka Raya yang berikutnya adalah Drs. Lukas Tingkes, dengan sebutan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya. Drs. Lukas Tingkes dilantik sebagai Walikota Palangka Raya pada tanggal 16 September 1983 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah W.A. GARA, pada saat itu beliau berusia 41 tahun. Dengan demikian, Drs. Lukas Tingkes merupakan Walikota termuda kedua setelah Janti Saconk yang menjadi Walikota Palangka Raya Pertama pada usia 36 tahun.



Gambar 7.2 :

Drs. Lukas Tingkes (Walikota Palangka Raya Periode 16 September 1983 s/d 16 September 1988)

(Sumber : Arsip Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya)

Drs. Lukas Tingkes lahir di desa Buntut Bali Kabupaten Katingan pada tanggal 19 Mei 1941 dari pasangan Ruda Tingkes dan Temei Talawang. Pendidikan dasar beliau ditempuh di Sekolah Rakyat 6 tahun di Kasongan yang ditamatkan pada tahun 1953, setelah itu diteruskan di Sekolah Guru Bagian B Negeri (SGB-N) di Sampit dan selesai pada tahun 1958. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1961, beliau menyelesaikan pendidikan di Sekolah Guru Bagian A Negeri (SGA-N) di Kuala Kapuas. Dari latar belakang pendidikan guru (SGB dan SGA), beliau menempuh Kursus Dinas Bagian C (KDC) Departemen Dalam Negeri di Palangka Raya pada tahun 1963.

Karir Drs. Lukas Tingkes di dunia pemerintahan dimulai pada tahun 1963 (setelah beliau tamat dari SGA) dengan pangkat Pembimbing Tata Praja (DD/I) terhitung mulai tanggal 1 Juli 1963. Beliau pernah menjadi ajudan Gubernur Tjilik Riwut pada tanggal 14 Agustus 1964, dan pada tanggal 7 Juli 1965 beliau memperoleh surat pengangkatan sebagai Perwira Titular AURI/Letnan Udara II diperbantukan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Tengah di Palangka Raya. Pada tahun 1967 sampai 1972, Lukas Tingkes memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Ketatanegaraan. Pada kesempatan tersebut, beliau pernah memperoleh predikat sebagai mahasiswa teladan (tahun 1970) dari Senat Mahasiswa FKK Universitas Brawijaya dan menjadi asisten dosen pada Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) Universitas Brawijaya (1970-1972) serta asisten dosen pada Fakultas Sosial Politik Universitas Merdeka Pusat Malang (1970-1972). Pada tanggal 12 Agustus 1972, Drs Lukas Tingkes telah menyelesaikan pendidikan doktoral-nya dan memperoleh gelar “doktorandus (Drs)”.

Setelah kembali ke Palangka Raya berbagai jabatan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah pernah di embannya diantaranya Kepala Sub Dit Pembinaan Masyarakat pada Direktorat Khusus Propinsi Kalimantan Tengah (1974-1982) dan Kepala Sub Dit. Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat pada Direktorat Sosial Politik Propinsi Kalimantan Tengah (1982-1983). Pada tahun 1982, Drs. Lukas Tingkes diangkat Presiden RI menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dari Fraksi Utusan Daerah (F-UD) dan oleh Pimpinan MPR-RI ditugaskan sebagai Penghubung Pimpinan F-UD MPR-RI di Propinsi Kalimantan Tengah. Drs. Lukas Tingkes juga pernah diangkat sebagai calon Bupati Kotawaringin Timur (tanggal 13 Januari 1981) dan calon Bupati Kotawaringin Barat (tanggal 21 Juli 1981).

Akhirnya pada tanggal 16 September 1983, Drs Lukas Tingkes diangkat sebagai Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya.

Selama menjalani studi di Universitas Brawijaya, Malang. Lukas Tingkes berkenalan dengan Theresia Pudjiastuti yang kemudian lebih dikenal dengan nama Nyonya Theresia Lukas setelah mereka menikah pada tanggal 25 Juli 1970. Nyonya Theresia Lukas sendiri dilahirkan di Trenggalek (Jawa Timur) pada tanggal 1 Juni 1949. Pasangan Lukas Tingkes – Theresia Pudjiastuti dikarunia 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki. Putra bungsu mereka yang lahir di Banjarmasin meninggal pada saat dilahirkan pada tanggal 18 September 1978.

Pribadi Drs. Lukas Tingkes dikenal sebagai walikota yang sangat disiplin, teliti, ulet dalam bekerja dan berwawasan luas. Ketaatan jam kerja para pegawai serta atribut-atribut kepegawaian yang melekat pada pakaian pegawai sangat beliau perhatikan, misalnya lencana korpri, ikat pinggang, kartu identitas dan kerapian berpakaian. Dengan kombinasi pribadi yang demikian serta dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Drs. Lukas Tingkes berhasil meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya. Komplek Pertokoan Flamboyant atas dibangun pada masa beliau sebagai Walikota. Berbagai hambatan mampu diatasi sehingga pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan dengan pembangunan tersebut sebagian aktivitas perdagangan dapat dipindahkan dari Pasar Palangka Sari (Pasar Besar). Komplek pertokoan tersebut sekarang menjadi salah satu *icon* Kota Palangka Raya (sebagian bangunan toko pernah terbakar pada tahun 1999, namun sudah dibangun kembali).

Bundaran Besar dalam bentuknya yang sekarang juga dibangun pada masa Drs. Lukas Tingkes sebagai Walikota, Lokasi tersebut sekarang diakui sebagai salah satu *Land Mark* terpenting Kota Palangka Raya. Disamping itu, Drs. Lukas

Tingkes juga melakukan perbaikan jalan-jalan dalam Kota Palangka Raya untuk mempercantik Kota Palangka Raya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Wajah Kota Palangka Raya dalam bentuknya yang sekarang mulai di gambar pada masa itu. Lampu penerangan jalan yang sekarang masih ada, sebagian besar dipasang pada masa itu. Berbagai usaha tersebut telah membuat Kota Palangka Raya semakin diakui keberadaannya oleh kota-kota lain di Indonesia terbukti dengan diangkatnya Drs. Lukas Tingkes sebagai salah satu anggota Dewan Pimpinan Badan Kerjasama Antar Kota Seluruh Indonesia (DP BKS AKSI) pada tahun 1985-1988.



Gambar 7.3.

Komplek Pertokoan Flamboyan Atas dan Bundaran Besar Kota Palangka Raya yang diambil gambarnya tahun 2003, pembangunan awalnya dimulai pada periode 1983-1988

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Pada tanggal 16 September 1988, Drs. Lukas Tingkes selesai menjalankan tugas sebagai Walikota Palangka Raya dan beliau digantikan oleh Drs. DN. Singaraca. Namun demikian, pengabdiannya untuk Propinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangka Raya tidak terputus. Selepas menjabat sebagai Walikota Palangka Raya, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah (1989-1993), Asisten Ketataprajaan Setwilda Propinsi Dati I Kalimantan Tengah (1993-1995) dan Ketua Bappeda

Propinsi Dati I Kalimantan Tengah (1995-2000). Bahkan pengabdianya terus berlanjut setelah beliau pensiun sampai sekarang.

3. Drs. DONNIS NIXONI SINGARACA³
(Walikota Periode 16 September 1988 s/d 16 September 1993)

Walikota Palangka Raya yang ketujuh adalah Drs. Donnis Nixon Singaraca yang dilantik oleh Gubernur Gatot Amrih, SH pada tanggal 16 September 1988 dengan sebutan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya (sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974). Drs. Donnis Nixon Singaraca dilantik menggantikan Drs. Lukas Tingkes yang telah habis masa jabatannya, beliau dilantik sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya dalam usia 46 tahun.



Gambar 7.4.

Drs. DN. Singaraca (Walikota Palangka Raya Periode 16 September 1988 s/d 16 September 1993) dan suasana pelantikan Drs. DN. Singaraca sebagai Walikota Palangka Raya pada tanggal 16 September 1988.

(Sumber : Arsip keluarga Drs. DN. Singaraca)

Drs. Donnis Nixon Singaraca (biasa disingkat Drs. DN. Singaraca) lahir di Pendahara, masuk dalam wilayah Kabupaten Katingan pada tanggal 6 Desember 1942. Beliau merupakan sulung dari 7 bersaudara, 6 saudaranya tersebar di Kota Palangka Raya dan di Kabupaten Katingan. Ayahnya, Lukas Marang adalah seorang guru / kepala sekolah sedangkan ibunya Annae adalah seorang ibu rumah tangga.

DN. Singaraca menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Rakyat (SR) Negeri 6 tahun di 3 tempat, yaitu Kuala Pembuang, Sampit dan akhirnya tamat pada tahun 1954 di Pendahara. Demikian juga pada waktu pendidikan menengah juga berpindah-pindah tempat. Pertama di SMP PGRI Kasongan selama satu tahun kemudian pindah ke SMP Kristen Sampit sampai selesai tahun 1959, setelah itu disambung di SMA / C PGRI Sampit selama satu tahun dan pindah ke SMA / C Muhamadiyah III di Yogyakarta sampai dengan selesai pada tahun 1962.

Selepas menjalani pendidikan menengah, DN. Singaraca melanjutkan pendidikan Jurusan Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Gelar Bacheloriat di bidang Sosiatri diraihinya pada tahun 1966 dan gelar doktoral (Drs) diperoleh pada tahun 1967. Ini berarti, jenjang pendidikan tinggi dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) tahun saja. Hal ini termasuk luar biasa pada waktu itu, mengingat sistem tingkatan yang berlaku di perguruan tinggi pada waktu berbeda dengan sekarang (menggunakan sistem kenaikan tingkat bukan sistem kredit semester/SKS).

Ketika DN. Singaraca sedang menempuh program doktoralnya di Universitas Gadjah Mada, kedua orang tuanya telah mengadakan pembicaraan dengan saudara sepupunya (*ije tatu*) Th. Galam Sindhi untuk mempererat tali persaudaraan. Putri Th. Galam Sindhi yang bernama Katharina Sindhi waktu itu sedang menempuh pendidikan keperawatan di Surabaya. Pertemuan keduanya terjadi ketika DN. Singaraca berkunjung ke Surabaya untuk menemui Katharina yang pada waktu itu sedang bertugas di rumah sakit. Pertemuan yang berlangsung

singkat tersebut kemudian disambung keesokan harinya di gereja. Komunikasi selanjutnya hanya dilakukan lewat surat-menyurat, baik ketika DN. Singaraca masih di Yogyakarta maupun setelah kembali ke Palangka Raya seusai menyelesaikan studinya di Universitas Gadjah Mada. Pasangan ini akhirnya menikah pada tanggal 21 Mei 1969 di Tumbang Lahang (Kabupaten Katingan) yang merupakan kediaman orang tua Katharina Sindhi. Dari perkawinan tersebut pasangan DN. Singaraca-Katharina Sindhi dikaruniai 5 (lima) orang anak, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Sesudah menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Drs. DN. Singaraca segera mengabdikan dirinya kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, mulai tanggal 1 Desember 1967 dengan pangkat Ahli Tata Praja (F/II). Jabatan yang diembannya pertama kali adalah Kepala Bagian Pembinaan Otonomi Daerah (terhitung mulai tanggal 1 Desember 1967) dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.144,- . Setelah itu berbagai jabatan silih berganti dipercayakan kepadanya, dan sampai tahun 1988 tidak kurang 19 jabatan / kedudukan penting di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, diantaranya adalah pejabat sementara (*caretaker*) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur (selama 5 bulan) dan pejabat sementara (*caretaker*) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat (selama 3 bulan). Akhirnya pada tahun 1988, Drs. DN. Singaraca terpilih sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya periode tahun 1988 – 1993.

Dalam pandangan keluarga, rekan dan stafnya , Drs. DN. Singaraca adalah pribadi yang pendiam, sabar dan penyayang. Di sela kesibukannya sebagai Walikota sebuah ibukota Propinsi, beliau selalu menyempatkan waktunya bersama-sama keluarga. Namun demikian, dalam pekerjaan, beliau adalah seorang yang sangat disiplin dan teliti. Bukan hal yang asing jika beliau berdiri di teras Balai Kota sebelum jam 07.00 pagi untuk menunggu staf-stafnya masuk kantor. Semua itu dilakukan dengan senyum dan sikap kebabakan yang khas. Sikap yang sabar dan tidak pernah marah inilah yang justru sangat berkesan di mata anak buahnya.

Di samping itu, Drs. DN. Singaraca adalah pribadi yang sangat teguh pendirian serta taat dalam menjalankan aturan/prosedur yang disepakati. Sikap teguh pendirian ini bahkan tetap diperlihatkan meskipun harus berhadapan dengan siapa pun termasuk seandainya harus berbeda pendapat dengan institusi yang lebih tinggi. Sebagai manajer Kota Palangka Raya, beliau melihat bahwa perlu dilakukan segera penataan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dibuat sebelumnya dan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut dibuat Program Jangka Menengah Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (PJM – P3KT).

Dalam rangka pembenahan wajah Kota Palangka Raya, Drs. DN. Singaraca mencanangkan slogan Palangka Raya Kota CANTIK. CANTIK merupakan akronim dari Perencanaan, Aman, Nyaman, Tertib, Indah dan Keterbukaan. Slogan Palangka Raya Kota CANTIK masih terus bergaung sampai sekarang.



Gambar 7.5

Balaikota Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya (sebelum terbakar pada tanggal 2 Oktober 1999).

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Langkah lain yang tergolong cukup berani namun inovatif adalah pemindahan Kantor Balai Kota ke Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 dari lokasi semula di Jalan Diponegoro (sekarang lokasi tersebut digunakan oleh Kantor Cabang Bank Indonesia). Langkah ini banyak mengundang pro dan kontra baik dari kalangan intern (para PNS) maupun ekstern (para tokoh masyarakat). Dasar pengambilan langkah ini sebenarnya didasari perhitungan matang bagi perkembangan pembangunan Kota Palangka Raya pada masa mendatang. Pada waktu itu, lokasi Balai Kota sekarang (Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5) adalah lokasi yang masih sepi dan belum berkembang, karena itu untuk mengembangkan lokasi tersebut perlu dilakukan terobosan dengan memindahkan salah satu kantor Pemerintah Daerah terpenting ke kawasan tersebut. Meskipun pada tahap awal sangat berat, tetapi diyakini sangat bermanfaat untuk memacu pertumbuhan wilayah-wilayah sekitarnya.

Sekarang, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun sejak kebijakan tersebut dilaksanakan, kawasan Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 dan sekitarnya telah berkembang menjadi kawasan yang ramai dengan lokasi permukiman dan kawasan perdagangan. Jalan Rajawali yang 10 (sepuluh) tahun yang lalu masih sepi dan sering tergenang sekarang menjelma menjadi jalur transportasi paling sibuk di Kota Palangka Raya. Bahkan 2 kantor instansi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah juga dibangun di dekat Kantor Balai Kota Palangka, disamping itu juga dibangun Komplek Olah Raga (Stadion Tjilik Riwut) di Km. 5.

Keberhasilan ini memang tidak memuaskan semua kritik yang ditujukan kepadanya, tetapi setidaknya sangat berguna dalam memberikan dasar untuk pembangunan Kota Palangka Raya yang tetap harus berjalan, tidak boleh berhenti.

4. Drs. NAHSON TAWAY⁴
(Walikota Periode 16 September 1993 s/d 22 September 1998)

Walikota Palangka Raya yang ke delapan adalah Drs. Nahson Taway yang menjabat Walikota Palangka Raya terhitung mulai tanggal 16 September

1993 s/d 22 September 1998. Drs. Nahson Taway dilantik menjadi Walikota dengan sebutan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya oleh Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Tengah Drs. Suparmanto pada tanggal 16 September 1993 menggantikan Drs. DN. Singaraca yang telah habis masa jabatannya.



Gambar 7.6

Drs. Nahson Taway (Walikota Palangka Raya Periode 16 September 1993 s/d 22 September 1998) beserta istri.

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Drs. Nahson Taway dilahirkan di Desa Sei Buluh (Kabupaten Kotawaringin Barat) pada tanggal 12 Desember 1942 sebagai anak pertama dari pasangan C.T Taway dan E. Umi Tahan yang tinggal di Sei Buluh. Drs. Nahson Taway mengenyam pendidikan era Indonesia merdeka dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Bayat yang diselesaikan pada tahun 1955 dalam usia 13 tahun, kemudian diteruskan SMP Bagian B di Pangkalan Bun dan ditamatkan pada tahun 1958 dan disambung di SMA Bagian C (Sastra Sosial) di Kuala Kapuas. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 1962. Nahson Taway masuk di dunia kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1964 dengan gaji awal Rp. 592,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Pada tahun 1965, Nahson Taway ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Palangka Raya sampai selesai pada tahun 1968. Setelah tamat, diperbantukan pada Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Irian Barat selama 6 bulan dan pada tanggal 21 Maret 1970, Nahson Taway kembali bekerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972, Nahson Taway kembali ditugaskan untuk belajar di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) di Jakarta. Nahson Taway menyelesaikan pendidikannya di IIP pada tahun 1974 dan memperoleh gelar doktorandus (Drs) dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

Sekembalinya dari tugas belajar di IIP, Nahson Taway diangkat sebagai Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Setwilda Tingkat I Kalimantan Tengah. Pada waktu itu pangkatnya masih Pengatur Tingkat I (II/d) . Setelah itu berbagai jabatan telah diembannya baik di lingkup Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah (1974 – 1983), Pemerintah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur (Pejabat Pembantu Kotawaringin Timur Wilayah Katingan, tahun 1983 s/d 1986) maupun di Pemerintah Kabupaten Dati II Barito Utara (Kepala BP 7, pernah juga merangkap sebagai Kepala Kantor Sosial Politik dan Sekretaris Wilayah/Daerah). Akhirnya pada tanggal 16 September 1993, Drs. Nahson Taway dilantik sebagai Walikotaamadya KDH Tingkat II Palangka Raya.

Drs. Nahson Taway menikah dengan Linda Nisida Moesa, BA putri dari E. Moesa–CH. Padjji pada tanggal 9 Maret 1974. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.

Dalam masa baktinya sebagai Walikota Palangka Raya, Drs. Nahson Taway melanjutkan, mengembangkan dan meningkatkan dan memperdalam program-program pembangunan kota yang telah dibuat para pendahulunya. Program Jangka Menengah Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (PJM – P3KT) terus dilanjutkan dengan didukung pendanaannya oleh *International Bank for*

Reconstruction and Development (IBRD). Pada tahun 1995, Drs. Nahson Taway bertolak ke Washington DC sebagai salah satu anggota Tim Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka negosiasi pelaksanaan Kalimantan *Urban Development Program* (KUDP) dengan pihak IBRD. Program ini menjadi program pertama Pemerintah Kota Palangka Raya yang dibiayai dengan dana pinjaman sekaligus proses pembelajaran seluruh aparat Pemerintah Kota Palangka Raya tentang pengelolaan dana pinjaman. Di bidang kelembagaan, Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan dan Pertamanan Kota yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kebersihan dan keindahan Kota Palangka Raya. Lembaga ini menjadi embrio dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dibentuk pada tahun 1997.

Kota Palangka Raya juga semakin aktif dalam kerja sama dengan kota-kota lain di Indonesia dan dunia. Kota Palangka Raya terlibat secara aktif dalam organisasi Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS – AKSI), bahkan pada tahun 1994, Kota Palangka Raya menjadi tuan rumah Musyawarah Komisariat Wilayah V BKS–AKSI yang mencakup kota-kota di Pulau Kalimantan. Kota Palangka Raya juga tergabung dalam organisasi IULA.

Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Palangka Raya mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak dalam bentuk penghargaan. Kota Palangka Raya memperoleh Piala Adipura untuk kategori kota sedang sebanyak 3 kali berturut-turut (1995, 1996, 1997). Dan sebagai wujud kebanggaan dibangun Tugu Adipura di Jalan Ahmad Yani (depan pertokoan Flamboyan). Pada tahun 1994 juga telah diperoleh Piala Wahana Tata Nugraha, kemudian Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi oleh Presiden RI (1996), Plakat Penghargaan Anugrah Aksara (1996) dan Penghargaan di Bidang Pembinaan Keluarga Sejahtera (1997).



Gambar 7.7.

Tugu Adipura yang terletak di Jl. A. Yani merupakan peringatan atas keberhasilan Kota Palangka Raya meraih Adipura selama 3 tahun berturut-turut

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Drs. Nahson Taway juga mempopulerkan motto Kota Palangka Raya “CANTIK“ yang telah diformulasikan oleh pendahulunya, Drs. DN. Singaraca. Pada masa itu juga dikumandangkan untuk pertama kali Mars Kota Palangka Raya yang diciptakan oleh Gerhart Daman (pada waktu itu adalah salah seorang PNS pada Dinas PU). Drs. Nahson Taway menyebut semua keberhasilan tersebut sebagai “ karya bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha “.

Ada kegembiraan, ada kesedihan, ada keberhasilan, ada pula kegagalan. Beberapa tugas yang menurut Drs. Nahson Taway sendiri belum dapat diselesaikan sampai akhir masa jabatannya adalah pembangunan kembali Komplek Panala (sampai sekarang belum jelas kelanjutannya), pembangunan Pasar Kameloh, upaya

pembangunan Pantai Sabaru serta permukiman kembali masyarakat korban kebakaran Flamboyan Bawah. Pada bulan Maret 1997, Komplek Flamboyan Bawah mengalami kebakaran besar yang menghabiskan seluruh kawasan tersebut. Pemerintah Kota Palangka Raya dengan didukung oleh Departemen Sosial dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah berusaha membangun kembali komplek perumahan baru sebagai ganti rugi di Jalan G. Obos. Berbagai rencana telah disiapkan namun rencana tersebut tidak berhasil diwujudkan sampai sekarang.

Kegembiraan dan kesedihan adalah warna kehidupan seseorang, demikian halnya dengan masa pemerintahan Drs. Nahson Taway selama menjadi Walikota Palangka Raya juga mengalami hal-hal tersebut.

5. KOLONEL INFANTERI SALUNDIK GOHONG⁵
(Walikota Periode 22 September 1998 sampai sekarang)

Walikota Palangka Raya selanjutnya adalah Kolonel Inf. Salundik Gohong yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah Drs. Warsito Rasman, MA dengan sebutan Walikota Palangka Raya. Dan sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka sebutan Kepala Daerah ini telah mengalami (tiga) kali perubahan. Kolonel Infanteri Salundik Gohong menggantikan Drs. Nahson Taway yang telah habis masa jabatannya.

Kol. Inf. Salundik Gohong dilahirkan di Bawan (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau) pada tanggal 8 Agustus 1946 dari pasangan Hermen Gohong dan Fransinae. Saudaranya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Pendidikan dasar beliau ditempuh di Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun di Sungai Hanyu (Kabupaten Kapuas) yang ditamatkan pada tahun 1958. Setelah itu beliau meneruskan pendidikan jenjang SMP di Kuala Kurun yang diselesaikan pada tahun 1962, kemudian pendidikan SMA di Palangka Raya. Beliau lulus tahun 1966. Kemudian Salundik Gohong meneruskan pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (AKABRI) Umum sampai tahun 1968 dan AKABRI Darat sampai tahun 1970 lalu diteruskan di Kecabangan Infantri yang diselesaikan pada tahun 1971.



Gambar 7.8.

Kolonel Infantri Salundik Gohong (Walikota Palangka Raya periode 22 September 1998 s/d sekarang) beserta ibu.

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Karier militer Kolonel Infantri Salundik Gohong dimulai pada tahun 1972 sebagai Danton Pengawal di Palangka Raya, tahun 1974 menjabat sebagai Danki Pengawal, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Kodim di Buntok (1975 – 1979), Dansat Lapangan Intelijen di Banjarmasin (1980 – 1982), Kepala Biro Penyelidikan Kopur Lintas Udara Kostrad di Cilodong Kabupaten Bogor (1982 – 1985), Kepala Seksi Penyelidikan Divisi If-1 di Cilodong (1985 – 1988), Kasi Intel Korem di Cirebon (1988 – 1992), Perwira Pembantu Madya PAM Sintel DAM Kodam III/Siliwangi (1992 – 1993) dan Danden Intelijen Kodam III/Siliwangi (1993 – 1996). Kolonel Infantri Salundik Gohong juga pernah ditugaskan sebagai Kepala Biro Pengamanan Sintel Koopskam Timor Timur di Dili Timor Timur pada tahun 1984 – 1989 dan anggota Kelompok Ahli Golongan IV Bakorstranasda Kalimantan di Kodam VI/Tanjungpura (1996). Sesudah itu beliau

dipilih oleh DPRD Kota Palangka Raya sebagai Walikota Palangka Raya sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Berbagai penghargaan pernah diperoleh oleh Kolonel Infantri Salundik Gohong diantaranya Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dari Menhankam / Pangab (tahun 1981), Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun dari Menhankam (tahun 1990), Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun dari Panglima ABRI (1996), Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dari Presiden RI (tahun 1997), Satya Lencana Seroja dari Menhankam (tahun 1985) dan Satya Lencana Seroja dari Menhankam / Pangab (tahun 1986).

Kolonel Infantri Salundik Gohong menikah dengan Cahaya Asi putri dari pasangan Conrad Ngantung – Magdalena Ngantung pada tanggal 17 Mei 1973. Pasangan ini dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki.

Tantangan yang dihadapi Kolonel Infantri Salundik Gohong sebagai Walikota Palangka Raya tidak ringan. Paling tidak ada 3 (tiga) peristiwa yang tidak mudah dilupakan. Pertama, belum sampai satu tahun beliau menjabat, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1999 Kantor Balaikota Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 (yang dibangun semasa Walikota Palangka Raya Drs. DN. Singaraca) habis terbakar. Kedua, sejak tanggal 1 Januari 2001 telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Dan ketiga, adalah kerusuhan etnis yang meletus di Kota Palangka Raya pada bulan Pebruari 2001.

Namun dengan filosofi Huma Betang (kebersamaan dan kekeluargaan) dan semangat Isen Mulang, maju terus pantang mundur dan tidak kenal menyerah (ungkapan yang selalu dikatakan setiap kali beliau berpidato) Kolonel Infantri Salundik Gohong terbukti mampu menyelesaikan semua tantangan tersebut dengan tuntas. Pembangunan kembali kantor Walikota Palangka Raya yang terbakar perlahan-lahan dapat diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2003.



Gambar 7.9.

Kantor Walikota Palangka Raya yang baru dibangun setelah terbakar pada tanggal 2 Oktober 1999. Peresmian Kantor ini dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Drs. Asmawi Agani pada tanggal 17 Juni 2001

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Proses peralihan otonomi daerah di Kota Palangka Raya relatif berjalan lancar tanpa suatu goncangan yang berarti. Tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menggaji guru-guru yang jumlahnya 3.000-an yang pada tahun 2001 mengalami kenaikan gaji dapat diselesaikan tanpa ada kegiatan demonstrasi yang mengganggu proses belajar mengajar. Meskipun untuk itu Pemerintah Kota Palangka Raya harus menunda beberapa proyek pembangunan dan bahkan meminjam dana kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, kerusuhan etnis juga tidak berdampak terlalu parah bagi masyarakat Kota Palangka Raya dan situasi keamanan (pada waktu itu) juga relatif masih terkendali meskipun ada korban jiwa pada waktu demonstrasi massa menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Namun demikian, sampai sekarang masyarakat Kota Palangka Raya masih belum siap menerima kedatangan kembali etnis Madura.

Kunci sukses itu semua barangkali adalah kedekatan Kolonel Infantri Salundik Gohong sebagai Walikota Palangka Raya dengan masyarakat dari berbagai lapisan, baik tokoh masyarakat maupun masyarakat awan. Kolonel Infantri Salundik Gohong sangat mudah bergaul dan berbaur dengan masyarakat

serta sangat mudah mengingat nama seseorang meskipun baru sekali atau dua kali bertemu. Mungkin hal ini disebabkan latar belakang beliau sebagai Perwira Intelijen pada waktu masih bertugas di ABRI (sekarang TNI). Satu hal yang pantas dicatat, bahwa semasa Kol. Inf Salundik Gohong menjabat sebagai Walikota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia sampai 3 (tiga) kali. Pertama, Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan Pebruari 2001; Kedua kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 13 Januari 2002 dalam rangka meresmikan jembatan Kahayan dan menghadiri Peringatan HUT PDI-P wilayah Kalimantan; Dan ketiga, kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 2 Juli 2003 dalam rangka mencanangkan Program Social Forestry di Kelurahan Petuk Bukit serta Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke XX. Sejarah ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan mudah terulang pada masa mendatang.



Gambar 7.10.

Jembatan Kahayan yang diresmikan Presiden RI tanggal 13 Januari 2002 (kiri) dan Presiden RI ketika mencanangkan program *Social Forestry* secara nasional di Kelurahan Petuk Bukit dengan menanam pohon ulin (kanan)

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Kolonel Infantri Salundik Gohong dikenal sebagai Walikota Palangka Raya yang punya hobi menyanyi dan olah raga golf. Dalam berbagai kesempatan baik resmi maupun setengah resmi, beliau sering memperdengarkan kemampuan dalam menyanyi. Lagu favorit beliau adalah “ Tidak Semua Laki-Laki “. Lagu

tersebut pertama kali dinyanyikan oleh Basofi Sudirman (pada waktu itu adalah Wakil Gubernur DKI Jaya), namun di tangan Kolonel Infantri Salundik Gohong, lagu itu tidak hanya berirama dangdut tetapi juga bisa berirama disco pop atau poco-poco sehingga tidak hanya enak untuk berjoget tetapi juga enak untuk berdansa.

Pada masa Kolonel Infantri Salundik Gohong sebagai Walikota Palangka Raya, wilayah Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan (setelah sebelumnya pernah diciutkan menjadi 2 kecamatan) yaitu Pahandut, Jekan Raya, Sebangau, Bukit Batu dan Rakumpit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya untuk pertama kalinya menembus angka Rp. 8 milyar pada tahun 2002 dan mungkin akan melewati angka Rp. 10 milyar pada tahun 2003. Kota Palangka Raya juga memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha pada tahun 2002. Penghargaan ini diberikan untuk daerah / kota yang menunjukkan tingkat ketertiban lalu lintas yang baik. Buah dari prestasi ini Pemerintah Kota Palangka Raya diberikan (tiga) unit bus oleh Departemen Perhubungan RI. Disamping itu, juga mendapat Manggala Keluarga Berencana serta penghargaan dari WHO karena keberhasilan dalam meningkatkan konsumsi Garam Beryodium oleh masyarakat.

Kolonel Infantri Salundik Gohong juga mempopulerkan lagu mars Kota Palangka Raya dan menambah lagi dengan lagu Hymne Kota Palangka Raya. Para PNS Kota Palangka Raya kini tidak malu-malu lagi menyanyikan kedua lagu tersebut pada setiap acara-acara resmi Pemerintah Kota Palangka Raya. Beliau juga menginginkan agar semua aparat hapal Panca Prasetya Korpri serta Visi dan Misi Kota Palangka Raya karena itulah inti dari pelaksanaan tugas para aparatur pemerintah Kota Palangka Raya. Tidak henti-hentinya beliau selalu mengajak masyarakat untuk membangun Kota Palangka Raya dan ungkapan beliau setiap akhir pidato adalah : dengan filosofi Huma Betang dan semangat Isen Mulang, maju terus pantang mundur dan tidak kenal menyerah, mari Kota Cantik Palangka Raya ini kita tata, kita bangun dan kita jaga “.



Gambar 7.11.

Pusat Pertokoan Barata di Jl. A. Yani (kiri) dan Pusat Pertokoan Citra Raya di Jl. Halmahera (kanan) yang pembukaannya diresmikan oleh Walikota Palangka Raya Salundik Gohong. Sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat besar.

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Palangka Raya)

Permasalahan ketertiban dan kebersihan sebagai tuntutan dan kebutuhan sebuah kota selalu menjadi perhatian khusus. “Tiada hari tanpa tertib dan bersih” merupakan slogan harian. Berkat keuletan, kebersamaan dan disiplin tugas, berhasil menata serta menertibkan Pasar Subuh, Pasar Penampungan di Jalan KS. Tubun, Pasar Buah di Jalan Cempaka dan Pedagang Sayur di Jalan Mendawai.

Era reformasi sering disebut era keterbukaan dimana setiap orang mendapat kebebasan untuk terbiasa dan menyampaikan kritik sehingga meskipun telah banyak yang dicapai kritik-kritik terbuka terhadap Pemerintahan Kolonel Infantri Salundik Gohong sebagai Walikota Palangka Raya tetap ada. Terlepas dari subyektifitas dapat disimpulkan bahwa meskipun masih banyak kritik dan masih ada kekurangan namun Kolonel Infantri Salundik Gohong memiliki kebesaran jiwa dan siap dikritik, lebih-lebih lagi apabila bersifat membangun, dan disamping itu telah meletakkan dasar-dasar otonomi di Kota Palangka Raya dengan baik.

CATATAN :

¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Endardono tanggal 3 April 2003; Wawancara dengan Drs. Sudaryanto tanggal 3 Juni 2003.

² Berdasarkan bahan-bahan/arsip di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Katharina S. Singaraca pada tanggal 18 Maret 2003

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Nahson Taway pada tanggal 10 Maret 2003

⁵ Berdasarkan bahan-bahan/arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN 2 :

KUTIPAN PIDATO GUBERNUR KDH/PEMBENTUK KALIMANTAN TENGAH RTA. MILONO PADA PENGUMUMAN NAMA PALANGKA RAYA DI BUKIT NGALANGKANG TANGGAL 18 MEI 1957
(dikutip dari Tjilik Riwut. 1958. Kalimantan Memanggil. Penerbit Endang. Jakarta. Hal. 131-132).

Dalam Pidato Bapa Gubernur Milono pada tanggal 18 Mei 1957 berkenaan dengan peresmian dan upacara adat dari anggota GMTPS (Gerakan Mandau Telawang Pancasila Sakti) beliau berpidato, antara lain sebagai berikut :

Dikatakan bahwa Pahandut telah dipilih untuk menjadi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Apakah pilihan itu baik, terserah kepada Saudara-saudara karena itu adalah pilihan saudara-saudara. Tiap-tiap tempat ingin jadi ibukota Propinsi, tiap-tiap kampung juga ingin.

Selanjutnya beliau berkata bahwa tugasnya disini ialah membangun Kalimantan Tengah agar dapat melebihi dari propinsi-propinsi lain. Maka kalau usaha ini kandas adalah bukan salahnya Pemerintah, kemajuan daerah letaknya adalah ditangan saudara-saudara. Lahirnya Propinsi Kalimantan Tengah adalah di dalam keadaan yang suram, terutama negara sekarang menghadapi kesulitan keuangan. Soal keuangan bukanlah merupakan pokok yang besar, akan tetapi sedianya (ketersediaan – *editor*) tenaga inilah yang paling penting. Setiap rumah tangga harus dapat hidup sendiri, belanja sendiri, mengatur diri sendiri, sedangkan pusat hanya memberikan sekadar bantuan saja.

Dengan lahirnya bayi Kalimantan Tengah ini hendaklah bayi ini dipupuk dan dipelihara, karena pada kebiasaannya bayi-bayi mudah sekali dihinggapinya penyakit. Untuk mengatasi semua itu diminta kebesaran jiwa. Dalam pada itu beliau menyerukan persatuan dari rakyat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalimantan Tengah dilahirkan bukan buat rakyat Pahandut saja, bukan buat satu daerah, bukan buat satu agama, bukan buat satu suku, akan tetapi buat seluruh bangsa Indonesia.

Beliau mengharap agar rakyat dalam daerah ini memeliharanya, sedangkan saya hanya membantu buat melaksanakannya. Untuk ini beliau mengucapkan terima kasih.

Gubernur Milono berdo'a mudah-mudahan beliau dapat melihat lahirnya ibukota ini, yang mana lahirnya adalah dalam keadaan kosong.

Selanjutnya dikatakan, mungkin kita tak mengalami akan lahirnya di tempat-tempat ini gedung-gedung yang indah, rumah-rumah yang mentereng, tetapi anak cucu kita lah nanti yang akan mengalaminya.

Kalau saudara-saudara menunjukkan kesungguhan dan kegiatan (kerajinan – *editor*), maka cita-cita ini pasti berhasil. Gubernur mengatakan selanjutnya bahwa beliau ada mempunyai cita-cita untuk memberi nama kepada Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa dan tujuan yang suci.

Nama yang diberikan ini telah dipilih ialah : “PALANGKA RAYA”

Palangka Raya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Maka kalau usaha nanti tidak sesuai lebih baik jangan diberi nama Palangka Raya.

Oleh karena itu, sesuaikanlah nama ini dengan cita-cita dilahirkannya Kalimantan Tengah, dan semoga dapat memberi contoh yang baik bagi lain-lain daerah.

Gubernur Milono mengharap janganlah Palangka Raya diulangi jangan sampai menjadi Palangka Kacau. Selanjutnya oleh Gubernur Milono dinyatakan bahwa lahirnya Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai keistimewaan atas angka 17, Propinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan propinsi yang ke-17, dilahirkan oleh Kabinet Karya, kabinet yang ke-17, dan Pahandut adalah kampung ke-17 dari Kuala Kapuas, ibukota Kabupaten Kapuas, dan kampung yang ke-17 dari muara Sungai Kahayan.

Gubernur Milono mengharapkan agar semua orang memelihara dengan baik kelahiran Propinsi Kalimantan Tengah, yang dilahirkan dalam bulan suci Hari Raya Idhul Fitri dan Hari Paskah dan tetap memelihara kesucian dan kemuliaan tersebut jangan sampai menjadi tempat “*perebutan Pangkat dan Kursi*”.

Catatan : dikutip secara utuh, namun untuk memudahkan pembaca dilakukan perubahan ejaan mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan (EYD). Beberapa kata yang sudah jarang digunakan diberikan sinonimnya.

Lampiran 3 :

**AMANAT Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah pada peringatan Hari
Palangka-Raya ke-VI tgl. 17 Juli 1963 di Palangka-Raya.-**

Para Pembesar Militer, Kepolisian, Kejaksaan dan Sipil,

Saudara-saudara sekalian,

MERDEKA !!!!!!!

17 Juli Hari Bersejarah bagi rakyat Kalimantan Tengah. Bersejarah, karena mengandung beberapa peristiwa penting. Semuanya peristiwa penting milik rakyat Kalimantan Tengah, termasuk milik bangsa Indonesia.

Pertama ialah, lahirnya ibukota Palangka Raya, pusat pemerintahan daerah Kalimantan Tengah, pusat rumah tangga keduanya ialah, lahirnya Komando Daerah Militer, pelambang kekuatan rakyat, salah satu ruas yang merupakan susunan tulang punggung kekuatan bangsa Tentara Nasional nan perwira, Komando Tambun Bungai, pahlawan kusuma-kusuma pejuang, pembela rakyat dan penegak keadilan

Ketiganya yaitu, lahirnya Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah pada tanggal 17 Juli 1943 20 tahun yang lalu, ialah detik penemuan kembali kepribadian rakyat, saat kebangunan kembali jiwa seni budaya dan rasa peri keindahan murni, bagian mutlak daripada milik bangsa Indonesia.....

Ketiga-tiganya peristiwa ini, saling isi mengisi, yang satu tidak boleh dipisahkan dari yang lain. Palangka Raya sebagai Pusat Kodam XI Tambun Bungai sebagai tulang-punggung kekuatan, dan selaku perisai pembelaan dan pertahanan kampung-halaman...., Bakeda sebagai penggali kembali sumber cinta rasa dan kepribadian, satu

cabang asal usul diantara pelbagai cabang-cabang dan jenis-jenis asal-usul lainnya daripada bangsa kesatuan Indonesia.

Nama “Tambun Bungai” adalah nama khas dalam sejarah asal usul daerah dan rakyat Kalimantan Tengah

Nama “Palangka Raya” merupakan sebutan yang khas pula dalam sejarah pandangan hidup rakyat, dalam sejarah asal usul iklim kepribadian rakyat

Saudara-saudara sekalian,

Soal mengenai asal usul ini penting sekali, diakui pentingnya menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 tentang pembagian daerah-daerah di Indonesia. Sungguh tidak tepat, bila ada seseorang menyangka, pembagian Kalimantan Tengah adalah dilakukan, asal dibagi saja. Itu keliru sekali. Kalimantan Tengah dibentuk, karena daerah ini memiliki kepribadian rakyat, memiliki asal usul, memiliki dasar hidup menurut susila dan tata masyarakatnya sendiri Lebih dari itu, seluruh seluruh daerah Kalimantan Tengah merupakan satu kesatuan ekonomi, dengan sumber-sumber ekonominya, yang diharapkan dapat dibikin menjadi alat untuk mempercepat usaha memajukan daerah dan mempertinggi taraf kehidupan rakyat kehendak perkembangan revolusi. Tentu sekali ibukotanya Palangka Raya lahir sebagai hasil revolusi

Berlainan sekali dengan lahirnya kota-kota yang besar lainnya. Betapa kota di lain daerah telah mengerjakan peringatan usianya ada yang sudah beberapa abad ulang tahunnya.

Kita sebagai bangsa, bangga memiliki kota revolusi Jogja, kota pahlawan Surabaya, kota indoktrinasi Jakarta, kota komando Mandala Makasar kota kota semuanya milik rakyat Indonesia. Juga Palangka Raya, kota ini juga milik rakyat Indonesia. Hasrat keinginan kita yang setinggi tingginya, ialah supaya Palangka Raya juga mempunyai corak dan sifat yang khas. Harapan yang semurni-murninya, supaya Palangka Raya menjadi kota modal dan model.

Saudara-saudara sekalian

Sebagai modal apakah ?

..... Modal, diperoleh dari perjuangan, untuk meneruskan perjuangan
.....

Kota modal, yang dengan penuh tenaga dan keringat dibangun Dari titik
ada sampai menjadi ada Apakah modal permulaannya ? Hanyalah tekad dan
semangat nyala Api Proklamasi 45.

“Modal permulaan” ini ternyata subur. Bukan modal milik seberapa gelintir
orang saja. Tapi modal, yang diakui milik bersama seluruh rakyat Kalimantan Tengah
..... Pengakuan ini penting sekali. Palangka Raya, yang diletakkan dihariban
tepi Sungai Kahayan, di desa Pahandut lama, yang sekarang masih tetap dihormati
sebutan nama lama ini. Masih segar ingatan kami, ditahun 1956 utusan Bapak Gubernur
Milono dikirim pada kami waktu itu di Sampit sebagai Bupati Manusia
memikirkan, Tuhan memutuskan Syukur Tuhan, akhirnya rakyat Kalimantan
Tengah mengakui letaknya Palangka Raya ini. Memang ada sengaja sementara anasir-
anasir yang mengadu domba.....memecah belah, supaya tidak setuju letaknya ibukota
ini. Tapi kesadaran rakyat untuk mengurus hidup rumah tangganya sendiri
menghapuskan aliran-aliran reaksioner tadi. Kesadaran nasional dari rakyat
melenyapkan aliran-aliran sempit kedaerahan tadi. Rakyat Kalimantan Tengah
menganggap pembangunan ibukota Palangka Raya sebagai soal kehormatan nasional,
ingin menyumbangkan bakti nasional.

“Modal permulaan” dari Rakyat tadi, mendapat karunia Tuhan. Yaitu, karunia
“modal kehormatan” yang tidak ada bandingan nilainya. Modal kehormatan ini tidak
dapat diukur dengan nilai rupiah atau benda berharga.

Apakah Modal kehormatan ini ?

Modal kehormatan ini, adalah Komando Presiden Republik Indonesia, yang sekarang kita akui sebagai Pemimpin Besar Revolusi..... Komando Revolusi berkumandang : Menyatakan perang melawan hutan”, bersamaan dengan doa restu beliau dengan menancapkan tiang pertama pembangunan ibukota Palangka Raya

Modal kehormatan, Komando kehormatan, dengan inti-inti amanat penting, tak boleh dipisahkan satu sama yang lain. “Perang melawan Hutan” diartikan oleh beliau, yaitu melenyapkan sisa-sisa penjajahan, merombak semua ketidakadilan, menghilangkan keadaan yang tidak seimbang “Menancapkan tiang pertama” diartikan memulai membangun ibukota Palangka Raya, sebagai lambang pembangunan daerah Kalimantan Tengah.....

Membangun daerah Kalimantan Tengah merupakan Revolusi Pembangunan. Oleh karena itu, membangun Palangka Raya, juga merupakan Revolusi Pembangunan. Karena itu juga, membangun Palangka Raya tidak didasarkan pada membangun di atas tempat atau kota yang sudah ada, seperti di Kuala Kapuas, di Sampit, di Muara Teweh atau tempat lain. Kota Palangka Raya harus bebas dari sisa-sisa asal zaman pembangunan oleh penjajah. Palangka Raya ingin menghirup udara segar, menurut iklim hidup masyarakatnya. Suasana pedalaman yang lebih suci daripada kemungkinan-kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh faham atau aliran yang merusak. Dengan Palangka Raya ingin dibangun kembali pribadi rakyat, ingin diletakkan kembali harga diri rakyat Dalam rangka pribadi nasional bangsa Indonesia, perasaan harga bangsa Indonesia.

Saudara-saudara sekalian,

Itulah yang kami sebutkan Palangka Raya, supaya menjadi kota modal yang juga tersimpul didalam arti namanya, yaitu wadah suci.

Saudara-saudara sekalian,

Palangka Raya diharapkan menjadi “Kota Model”, itu bukan karena kehendak kita sendiri saja. Tentu sekali, dari rakyat dan dari pihak kami sendiri, sangatlah bangga dapat menyaksikan pertumbuhan kota ini menjadi model, menjadi contoh tauladan. Pasti, kita semua, para Catur Tunggal dan semua alat-alat kekuasaan dan alat-alat Negara yang mengasuh dan membina daerah kita ini, merasa bangga kota ini menjadi yang sebaik-baiknya.

Tapi itu semua bukanlah hanya diserahkan pada kemauan kita sendiri saja. Peranan kita untuk mengolah kota ini, hanyalah sebahagian saja. Kita di daerah ini hanyalah terikat pada suatu rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan khusus. Kita tidak boleh semau-maunya saja membangun, mendirikan, merencanakan ini atau itu.

Pertama, garis penentuan rencana diletakkan oleh P.Y.M. Presiden Bung Karno sendiri. Rencana bangunan-bangunan penting, rumah gubernuran, komplek perkampungan pelajar, penentuan blok-blok terpenting, disetujui oleh Kepala Negara..... Keduanya, penentuan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Yang Mulia Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga. Rencana pembagian-pembagian pembangunan, seperti bahagian pemerintahan, bahagian perumahan/kediaman pegawai, bahagian pusat dagang niaga. Bahagian seni budaya, bahagian pendidikan, bahagian industri sekitarnya, dan bahagian lainnya, semuanya ditentukan oleh tingkatan Menteri. Bahkan, gambar-gambarnya dibikin oleh Departemen, oleh Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah. Hal ini ketentuan-ketentuan dilakukan bersama, yaitu dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan juga dari kami selaku Gubernur, yang oleh Pusat juga dianggap perlu untuk keselarasan dengan kepribadian daerah.

Seperti contoh, gambar semula daripada gedung rumah kediaman Gubernur dirubah, yaitu dengan memperhatikan usul-usul perubahan yang kami berikan pada pusat

Saudara-saudara sekalian,

Maka, barulah apa yang tidak termasuk rencana Presiden dan rencana Menteri, itulah yang termasuk wewenang kami, untuk mengolah dan menggaris pembangunan kota ini.

Disini perlu kami terangkan khusus hal itu, supaya jangan sampai ada salah faham, seakan-akan semuanya terbit dari fikiran kami sendiri saja. Bahkan untuk lebih dimengerti, bahwa pembangunan Palangka Raya adalah perpaduan rencana nasional, dari otak nasional, dari Presidennya dan Menterinya serta pemikir-pemikir lainnya.

Apalagi mengenai perencanaan-perencanaan yang termasuk wewenang dari Gubernur sendiri Tidaklah benar, jika mutlak atau kehendak kami sendiri. Gubernur untuk itu tetap menghormati corak musyawarah ... Dan untuk itu, dengan surat putusan menetapkan terbentuknya Panitia Pembangunan Khusus Palangka Raya, dengan tugas mengurus segala sesuatu yang mengenai perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Palangka Raya Sekali lagi, Palangka Raya adalah milik nasional, milik kita semua Palangka Raya tidak mengenal golongan, tapi merupakan persatuan dan perpaduan dari segenap kekuatan-kekuatan revolusi, dari semua suku-suku, agama dan keyakinan, lapisan masyarakat, kesemuanya menegakkan lambang “Bhineka Tunggal Ika”

.....

.....

6 tahun berdirinya Palangka Raya, sejak peristiwa bersejarah P.Y.M Presiden mendengungkan komando tadi, pada jaam 10 pagi tanggal 17 Juli tahun 1957

Termasuklah Palangka Raya dalam hitungan, dan sekaligus Kalimantan Tengah terhadap dunia luar

Sejak tertancapnya tiang pertama, termasuklah Palangka Raya dalam Peta Indonesia, dalam peta dunia internasional Maka secara teratur dan tersusun,

dimulai pengisian kota ini. Nama-nama pembangunan, pengisi jiwa Bapak Ir. Pangeran Moh. Noor waktu itu Menteri P.U.T. dan pencinta utama Kalimantan Tengah. Bapak Gubernur Milono, badan pembina dan pemimpin Kalimantan dan peminat utama Kalimantan Tengah Kolonel Soenitjoso, Panglima yang dicinta oleh rakyat,Overste Darmosoegondo, tokoh pembangunan yang memberikan jiwanya bagi kemajuan daerah dan rakyat

Rangkaian nama-nama, Saudara-saudara Moenasir Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sdr, Van Der Pijl Kepala Bagian Gedung-Gedung.....

Sdr. E.Mahar sewaktu itu sebagai Kepala Bagian Desa Kantor Gubernur dengan pegawai-pegawainya, sebagai kelompok pertama yang pindah ke Palangka Raya

Sdr. L.S. Binti Sekretaris Gubernur, yang memimpin pemindahan Kantor Gubernur sejak permulaanya

Saudara-saudara sekalian,

Barisan-barisan pahlawan pelopor, perintis pembangunan yang tidak mau menonjolkan diri, tapi pada tempatnya kami berikan tempat kehormatan Yaitu Saudara-saudara warga veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Mereka ini benar-benar menjunjung tinggi nama kehormatan Pejuang. Mereka membuktikan jasa sebagai pejuang pembangunan menebas, menebang, meratakan lapangan pembangunan Palangka RayaMereka ini membangun lapangan terbang “Panarung”,mendirikan “Gedung Pertemuan” bersahaja dari kayu beratapkan daun rumbia.....

Tempat penginapan pegawai-pegawai di rumah-rumah yang masih serba “setengah selesai”, tanpa pintu jendela.....

Tempat berteduh di sementara kapal-kapal, gubuk-gubuk ditepi sungai Suka duka para pegawainya, lebih banyak derita lahirnya, tapi juga kaya dengan suka

bathinnya Banyak kesukaran-kesukaran dan kekurangan-kekurangan dialaminya, tapi banyak pengalaman-pengalaman kemenangan jiwa diperolehnya

Ceitera-cerita dan dongeng-dongeng tentang hidup merintis sesuatu kota yang baru bukan lagi dibaca dari buku, tapi menjadi kenyataan. Apalagi bagi para penghuni-penghuni Palangka Raya yang pertama. Apalagi bagi para Kepala-Kepala Pemerintahannya Setempat yang pertama..... kita berikan tempat terhormat bagi nama-nama C.Rupock, C.Unjung, J.Manahan, W.Embang, P.K Sawung, J.A. Sandan, Ibung Bangas, J.Timbang, C.U.Ringkin dll..... Jasa, sekali lagi jasa, bagi mereka.....

Palangka Raya, kota jasa, kota pewujud bakti.....kota penguji kekuatan jiwa. Memang, hanya bagi mereka yang memiliki kekuatan jiwa, keuletan semangat, dapat hidup di kota Palangka Raya. Mereka yang cinta karya, mencapai kesenangan bekerja di Palangka Raja. Mereka akan menemukan lapangan karya yang luas sekali, akan menemukan lapangan bakti yang mulia sekali.

Saudara-saudara sekalian,

Sesudah dasar-dasar pertama pembangunan diwujudkan, maka sejalan dengan itu dimulailah pemindahan Kantor GubernurPerlu diberi tempat kehormatan pada para karyawan-karyawan dari seksi Pekerjaan Umum, yang sejak permulaan pembangunan gedung-gedung yang pertama sudah berkedudukan di Palangka Raya

Kantor Gubernur pindah kedudukan resmi di Palangka Raya memenuhi ketentuan Undang-Undang Darurat No.10 tahun 1957, memenuhi Undang-Undang No.21 tahun 1958 yang mensahkan Undang-Undang Darurat tadi, memenuhi Undang-Undang No.27 tahun 1959 Bahwa tempat berpijak pemerintahan daerah yang resmi adalah Palangka Raya....., bahwa ibukota ada didalam daerah wewenang sendiri.

Karena itu, penting sekali jiwa daripada instruksi Gubernur supaya terhitung tanggal 1 Januari 1961 semua dinas-dinas dan instansi-instansi berpindah kedudukan di Palangka Raya Memang banyak sekali kesulitan-kesulitan, apalagi dipandang dari segi kesejahteraan pegawai. Ini terasa sekali bagi para pegawai, apalagi bagi yang sudah berkeluarga.....

Juga dari sudut kedinasan, karena tidak mudahnya perhubungan.... Apalagi, kebanyakan instansi-instansi masih bersifat dirangkap satu, tingkat Selatan dan Tengah.

Saudara-saudara sekalian,

Tiada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan Bahkan kita hendaknya meninjau segala sesuatunya dari rangkaian yang lebih besar, dari hubungan yang lebih luas.

Maka tanggal 1 September 1961 merupakan saat penentuan. Penentuan, siapakah yang berjiwa kerakyatan Kalimantan Tengah. 1 September 1961 merupakan tanggal terakhir bagi semua dinas, jawatan, lembaga kemasyarakatan, partai-partai, organisasi-ornagisasi, untuk berpindah kedudukan resmi ke Palangka Raya. Atau setidaknya-pindahnya pindah kelain tempat, asalkan termasuk daerah wewenang sendiri. Disinilah akan terbukti kemampuan dan kepemimpinan tiap-tiap Kepala, Pemimpin, sebagai pemuka dan pembina daripada anak-buahnya.....Juga dalam kecakapan memimpin pekerjaannya, dengan menghadapi segala kekurangan-kekurangan dan kesukarannya Semua kendaraan-kendaraan mobil, kapal dan alat-alat kendaaran lainnya diwajibkan dipindahkan ke Palangka Raya

Disini, pada tempatnya kami menyampaikan perasaan hormat dan penghargaan kami, juga penghargaan atas nama Catur Tunggal, kepada segenap instansi yang sudah memenuhi kegotong royongan pindah ke Palangka Raya

.....

Pengisian Palangka Raya berangsur-angsur lebih menghebat Dari pembukaan Kantor Pos, Stasiun Radio dengan hubungan radio telefoni ke semua ibukota kabupaten dan ke Jakarta/Bandung, hubungan telepon.....

Perlengkapan pindahnya instansi-instansi tingkat I terus susul-menyusul, dipelopori oleh Catur Tunggal, Kantor Gubernur, Perwakilan Kodam, Kantor Polisi Komisariat, Kejaksaan.....

Lembaga-lembaga pendidikan susul menyusul, dari Sekolah Taman Kanak-Kanak, sampai pada Sekolah Tingkat Menengah Atas, sampai pada pembukaan K.D.C.

Rumah-rumah peribadatan, masjid, dengan pengajian-pengajian ajaran agama, gereja-gereja Protestan dan Katolik dengan kebaktian-kebaktian suci, usaha pendirian Balai Kaharingan dengan acara-acara adat nan murni, semuanya hidup subur saling hormat menghormati dan harga menghargai.

Memang, sesuai dengan kepribadian rakyat, demikian pula ingin dicerminkan kepribadian Kota Palangka Raya. Ingin sekali Kota Palangka Raya menjadi kota contoh tauladan, kota yang lahir dalam revolusi, dibangun oleh jiwa dan otak bebas dari pengaruh kolonial. Kita ingin pula mengolah Palangka Raya menjadi kota revolusi pembangunan, kota indoktrinasi, kota pelahir watak dan pembentuk pribadi.

Saudara-saudara sekalian,

Terserahlah pada kita semua, untuk memelihara jiwa revolusi, meresapkan jiwa indoktrinasi, setia mendirikan dan taat pada kepribadian Indonesia.

Pembangunan Palangka Raya penuh dengan keringat dan tetesan air mata..... Tak sedikit jiwa yang sudah mengorbankan diri, dan sekarang mendahului kita menghadap Tuhan. Mereka ini pegawai, warga angkatan Bersenjata, sanak keluarga yang dicintai, yang tadinya ikut pindah ke Palangka Raya, disertai penuh cita-cita dan harapan-harapan suci Jiwa pikiran kami tujukan pada arwah mereka, dengan doa, semoga tetap mendapat tempat layak disisi Tuhan.

Kami serukan, marilah kita perteguh persatuan, perkuat keyakinan bahwa pekerjaan kita pasti berhasil. Dengan kesucian jiwa dan kebulatan tekad ini, kami tidak sangsi akan karunia kebesaran Tuhan, yang selalu berkenan memberi lindungan.

Juga pada Palangka Raya diharapkan restu Saudara2-saudara sekalian, supaya selalu benar-benar menjadi wadah suci, sungguh berjiwakan persatuan, kekuatan dan keselarasan watak pribadi, yang didalam hubungan tanah air merupakan persatuan nasional, kekuatan nasional dan kebangunan persatuan kepribadian nasioanl pula.

Jagalah Palangka Raya melangkah kedepan !

Tetaplah Piagam Palangka Raya menjiwai kita semua !

Hidup Palangka Raya ! Hidup Kalimantan Tengah ! Hidup Indonesia !

Merdeka !!!!!!!!

Palangka-Raya, 17 Juli 1963

Gubernur Kepala Daerah

Kalimantan Tengah,

Dtt

TJILIK RIWUT

Catatan : Pidato ini dikutip dari salinan Inek Kamis yang diperoleh dari arsip/dokumen Bapak TT Suan. Agar memudahkan membacanya, ejaannya diubah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

Lampiran 4 :

PIDATO :

**PERESMIAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA OLEH
YANG MULIA MENTERI DALAM NEGERI DR.
SOEWARNO SOSROATMODJO MAYOR JENDRAL TNI
PADA UPACARA PERESMIAN KOTAPRAJA
PALANGKA RAYA PADA TANGGAL 17 JUNI 1965.**

Saudara Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah,

Saudara Ketua Komisi "B" Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,

Saudara para anggota Panca Tunggal Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Saudara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Komisi "B".

Saudara pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta para anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Para hadirin sekalian dan segenap Undangan yang saya muliakan.

PENDAHULUAN

Sungguh saya, merasa berbahagia dan mengucapkan syukur kehadirat Illahi, karena pada hari ini tanggal 17 Juni 1965 saya dapat bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian turut serta menyaksikan upacara bersejarah, upacara peresmian Kotapraja Palangka Raya, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang No.5 tahun 1965, Lembaran Negara tahun 1965 No. 48 tentang pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan mengubah Undang-undang No.27 tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Oleh karena itu, perkenankanlah saya atas nama Pemerintah dengan gembira mengucapkan “Selamat” khususnya saya tujukan kepada segenap warga dan rakyat disini, warga dan rakyat disini, warga dan rakyat Kalimantan Tengah, berhubung telah ditetapkannya wilayah kota Palangka Raya sebagai daerah Tingkat II Kotapraja yang ke 48.

Dengan demikian, apabila kita sebelumnya telah mengenal pembagian wilayah Tanah Air kita dalam 25 Daerah Tingkat I dan 257 Daerah tingkat II termasuk 47 daerah Tingkat II kotapraja, maka sejak berlakunya Undang-undang tersebut, wilayah Indonesia telah terbagi dalam 25 Daerah Tingkat I dan 258 Daerah Tingkat II.

**MANIFESTASI
HASRAT RAKYAT
YANG REVOLUSIO-
NER DAN SE-JALAN
DENGAN
KEINGINAN SERTA
USAHA
PEMERINTAH**

Pembentukan Kotapraja Palangka Raja yang bersama-sama pada tanggal 17 Juni ini kita saksikan, adalah merupakan manifestasi dari cetusan hasrat yang Revolusioner, hasrat yang lama telah dikandung oleh Rakyat Palangka Raya dan Rakyat Kalimantan Tengah, yang sejalan pula dengan keinginan serta usaha Pemerintah untuk memberikan lebih banyak dan lebih intensif pimpinan pada seluruh Bangsa Indonesia, agar tujuan Revolusi lebih cepat lagi dapat tercapai.

Hasrat Rakyat yang Revolusioner untuk membentuk Daerah baru, yang didorong oleh keinginannya untuk membangun sangat dihargai oleh Pemerintah karena sesuai dengan tingkat Revolusi pada dewasa ini, dimana kita telah mulai memasuki tahap Revolusi ke-II, yaitu tahap sosialisme Indonesia, dimana terutama daerah harus memegang peranan penting, sebagai ditandakan dalam RESOPIM, bahwa pelaksanaan tulang-punggung, darah-daging Sosialisme

Indonesia, harus dimulai dan dasarnya didorong dari daerah.

Disanalah harus bertumbuh percobaan Sosialisme Indonesia, disanalah harus berkembang pengalaman Sosialisme Indonesia.

Tetapi oleh karena hasrat Rakyat Kalimantan yang Revolusioner itu, hanya dapat dimengerti dan ditanggapi oleh pemerintah yang revolusioner, maka harapan kami ialah bahwa pemerintah daerah Kotapraja Palangka Raya yang akan dibentuk ini nanti, ialah tidak lain harus Revolusioner pula.

**SEBAB-SEBAB
KEGAGALAN
JALANNYA
REVOLUSI**

Sebab-sebab kegagalan-kegagalan jalannya Revolusi kita selama kurang lebih 14 tahun, adalah antara lain karena usaha dan cara kita mencapai tujuan Revolusi tidak cukup Revolusioner ; adanya dualisme antara pemerintah dan pimpinan revolusi masa itu, sehingga pemerintah tidak mungkin dapat merealisasikan dan menanggapi hasrat Rakyat Indonesia yang Revolusioner secara teratur dan secara cepat.

**SATUNYA
PEMERINTAH
DENGAN PIMPINAN
REVOLUSI DAN
RAKYAT**

Tetapi kita putar haluan pada tanggal 5 Juli 1959, dan sejak itu, yaitu sejak kita kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan setelah kita dapat memiliki Manifesto Politik sebagai haluan negara yang menjadi pegangan resmi bagi tiap-tiap orang Indonesia, maka sejak itu kita memiliki Pemerintah yang satu dengan Pimpinan Revolusi dan Pemerintah yang satu dengan rakyat. Karena satunya Pemerintah dengan Pimpinan Revolusi dan satunya pemerintah dengan rakyat itu, bukannya kita tenggelam sebagaimana diucapkan oleh pihak NEKOLIM, tetapi kita menjadi makin kuat, makin membaja, sehingga kita dapat mencapai kemenangan-kemenangan yang gemilang, baik dibidang Nasional maupun dibidang International.

**KEMENANGAN-
KEMENANGAN
TRIKORA**

TRIKORA telah mencatat kemenangan-kemenangan, antara lain ialah dengan makin bersatunya segala macam aliran dan golongan masyarakat di Indonesia dan antara segala aliran yang progresif di Dunia, sehingga tercapai pembebasan Irian Barat dan GANEFO yang menggemparkan seluruh Dunia; kita catat selanjutnya penumpasan-penumpasan golongan kontra revolusi bersenjata, lebih menghebatnya pengalaman persatuan kekuatan-kekuatan nasional yang progresif revolusioner berporoskan NASAKOM, lahirnya DEKON, pembangunan Angkatan Bersenjata yang bukan main hebatnya dan yang kemudian disusul dengan pembangunan yang menghebat dari kekuatan kesadaran rakyat, mental maupun fisik yaitu dengan adanya Gerakan Sukarelawan.

Terakhir kini dengan lebih nyata tampak tumbuhnya kekuatan ekonomi desa kita yang tegak “berdiri diatas kaki sendiri”, sehingga disusul oleh dasar-dasar rencana yang lebih konkrit dalam bidang ekonomi.

Dibidang Internasional kita mencatat lagi sukses penyelenggaraan Asian Games ke-IV, konfrontasi selanjutnya terhadap IOC, sehingga terlaksana dengan gemilang GANEFO I tersebut tadi.

Lebih hebat pemupukan setiakawan A-A serta penggalangan kekuatan NEFO, sehingga dengan sukses dapat menggelorakan peringkatan Dasawarsa AA-I, serta Front Internasional yang meluas anti “Malaysia” serta menggelornya Dwikora, dan sebentar lagi menuju Konferensi AA ke-II di Aljazair dan CONEFO di Indonesia.

**MAHKOTA
KEMERDEKAAN
BUKAN
KEANGGOTAAN
PBB**

Satu hal yang sangat prinsipil dan yang sekaligus mematahkan pendapat yang salah yang lebih berakar di Dunia, ialah seolah-olah Mahkota Kemerdekaan suatu Bangsa itu ialah keanggotaan PBB dari Bangsa tadi.

Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, sebagai realisasi perintah P.Y.M. PRESIDEN yang pertama dalam bidang politik Luar Negeri pada tahun 1965, maka Indonesia menunjukkan benarnya dan tepatnya bahwa bukan keanggotaan dari PBB yang usang sekaran inilah merupakan Mahkota Kemerdekaan suatu Bangsa, tetapi Mahkota Kemerdekaan suatu Bangsa ialah kemampuannya : "berdiri diatas kaki sendiri" – disampingnya berdaulat dalam bidang politik.

Bagi kemerdekaan yang bebas sempurna, ternyata ialah berlaku Trisakti Bung Karno, yang menyatakan :

1. Berdaulat dalam bidang Politik,
2. Berdikari dalam bidang Ekonomi, dan
3. Berkepribadian dalm bidang Kebudayaan ;

Trisakti yang tumbuh dari Dasar Negara yang merupakan sublimasi daripada Manifesto Komunis dan *Declaration of Independence* dari U.S.A ialah PANCA SILA.

Dengan tindakan, keluar dari PBB, Indonesia memelopori semua Negara-negara di Dunia yang banyak, terutama Negara-negara baru di Asia dan Afrika, yang dirugikan justru dengan adanya P.B.B; Keluar dari P.B.B. justru akan mempercepat tumbuhnya Negara-negara tadi, oleh karena tiada lagi menari-nari tawaran NEKOLIM anggota P.B.B, tawaran yang berupa ikatan-ikatan NEKOLIM. Ikatan-ikatan gaya baru yang ingin meneruskan hisapan dan tidasan Kolonialisme dan

Imperialisme dalam bentuk pinjaman-pinjaman, serta akal-akal lain yang halus tetapi juga mengikat dan sangat membahayakan Negara-negara yang baru merdeka tadi.

Dengan tindakan yang berani dari Indonesia ini, keluar dari P.B.B, dengan terus terang menghadapi Negara-negara imperialis dan kapitalis, nama Indonesia di Dunia Internasional meroket tinggi di Angkasa.

**KEMENANGAN-
KEMENANGAN DI
BIDANG
PEMERINTAHAN
DAERAH**

Apa kemenangan-kemenangan di bidang Pemerintahan Daerah ?

Dibidang Pemerintahan Daerah pun kita telah memperoleh kemenangan-kemenangan, kita mencatat lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Lampung dan Daerah Tingkat II, dan sekarang ini kita lihat dihadapan kita lahirnya Daerah Tingkat II Kotapraja Palangka Raya.

PANCA TUNGGAL

Diakuinya dalam Pidato Politik Presiden yang baru lalu, bahwa kemenangan-kemenangan lain dalam lapangan Pemerintahan Daerah, ialah adanya Badan Kebijakan Panca Tunggal, yang dengan Keputusan Presiden No. 71 tahun 1963 mendapat pengesahan.

Saya katakan mendapat pengesahan, oleh karena Badan Kebijakan Daerah, badan musyawarah eksekutif Daerah ini, merupakan badan kebijakan yang pada permulaannya dibentuk oleh Kepala Daerah, oleh para Gubernur Kepala Daerah dimanapun di Indonesia ini. Dan kemudian Gubernur Kepala Daerah menyampaikan keinginannya agar di setiap Daerah Tingkat II ada badan kebijakan, ada badan musyawarah eksekutif yang sama.

Tiap-tiap Daerah mengeluarkan keputusannya, tentang hal Tri Tunggal atau Catur Tunggal yang dipergunakan sebagai pedoman bekerja selanjutnya.

Didalam surat-surat keputusan atau surat apapun yang terbentuk pengaturan tentang tugas-tugas dan prosedur Tri Tunggal cq. Catur Tunggal tadi, diteliti benar-benar agar Tri Tunggal cq. Catur Tunggal tidak merupakan badan staf seseorang pejabat; jangan sampai mengaburkan arti bantuan militer yang telah diatur oleh Peraturan-peraturan Pemerintahan lain.

BANTUAN MILITER

Dalam bantuan militer ini, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1958, juga diminta bantuannya oleh Pemerintah Sipil Daerah dari Panglima, tetapi bantuan militer untuk bertindak atas dasar kenyataan bahwa alat-alat Pemerintah Sipil yang bertugas dan berwenang dalam Pemerintahan Sipil, dus yang berwenang dalam keadaan tertib sipil tidak mampu lagi merawat keamanan dan tidak mampu lagi mencegah kekacauan keamanan.

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah berhak meminta bantuan militer yang harus diberikan oleh Panglima, jika dimintanya secara tertulis. Dalam keadaan bantuan militer, Kepala Daerah tetap bertanggung jawab atas keamanan di Daerahnya dan pelaksanaan pengembalian ke keadaan aman, dilaksanakan dengan bantuan militer, untuk Kepala Daerah.

Tri tunggal cq. Catur Tunggal badan musyawarah yang tidak disebutnya di peraturan manapun dari Pemerintah Pusat, bagaimana pentingnya, bagaimana baiknya pun, ternyata Badan

Musyawarah ini, memang benar-benar merupakan urusan Daerah.

Kemudian sesudah pada tahun 1964 diadakan rapat Catur Tunggal di Jakarta, baru ada ketentuan yang dikeluarkan mengenai Panca Tunggal, yang bersama-sama harus menjamin agar jalannya Swasembada dan Swadaya dapat berlangsung dengan baik.

Tri Tunggal untuk pertama kali dibentuk pada tahun 1963 sesudah 1 Mei, pada waktu Indonesia tidak lagi dalam keadaan S.O.B, tetapi pada waktu mulai berlakunya Tertib Sipil.

Pemerintah Daerah cq. Kepala Daerah yang bersama-sama dengan Polisi bertanggung-jawab tentang keamanan di Daerahnya merasa perlu untuk memberitahukan tentang tindakan-tindakannya dalam keadaan tertib sipil ini kepada Panglima Daerah Militer, yang hingga pada tanggal 1 Mei 1963 memegang Pimpinan Tertinggi dari Daerah, dan selama 6 bulan sesudah tanggal 1 Mei 1963 banyak peraturan PEPERDA yang masih berlaku.

PANCA TUNGGAL

Agar Rakyatnya tidak mendapat kesukaran berhubung dengan kemungkinan adanya simpang-siur akibat peraturan-peraturan dari Penguasa Tertib Sipil, oleh karena itulah badan musyawarah Tri Tunggal dan Panca Tunggal itu diadakan oleh Pemerintah daerah.

Setiap anggota tetap bertanggung jawab dan berhak dalam bidangnya masing-masing. Tiap-tiap anggota Panca Tunggal mempunyai saluran tanggung jawab tertentu dalam bidangnya masing-masing. Rapat-rapat Panca Tunggal tidak untuk meminta tanggung jawab dari anggota satunya oleh

anggota yang lain. Kepala Daerah tetap Ketua Panca Tunggal yang memimpin rapat-rapat Panca Tunggal dalam suasana apapun dalam Tertib Sipil ini.

Ketua PEPELRADA baru mengetahui musyawarah, yang terdiri dari anggota-anggota Panca Tunggal, termasuk Kepala Derahnya, jika diperlukan musyawarah menurut ketentuan yang berlaku.

Badan-badan tadi, Panca Tunggal dan Peperada merupakan kemenangan-kemenagan dari pemerintah daerah, justru oleh karena badan-badan ini dimaksudkan untuk mempertinggi efisiensi.

Saya sebagai bekas Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya, mengalami bagaimana lambatnya pada waktu-waktu yang darurat, pelaksanaan bantuan militer. Tidak oleh karena militernya terlambat dan tidak siap sedia ; tidak, sekali-kali tidak, tetapi oleh karena prosedur permintaan bantuan militer perlu memakan waktu dengan minimum yang buat Jakarta pada waktu dan keadaan itu, masih sangat terlambat sesudah kedutaan kita di Kuala Lumpur dirusak-rusak oleh Tengku Abdurakhman.

Kebakaran Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan kedutaan Besar Malaya yang menyebut dirinya Malaysia, terjadi sehari sesudah kedutaan Besar Indonesia dibakar oleh Tengku Abdurakhman, jongs Imperialisme Inggris.

PEPERADA

Bantuan militer pada waktu itu, diperlukan untuk mencegah perluasan kemarahan Rakyat terhadap Imperialisme Inggris dan antek-anteknya.

Adanya Peperada, antara lain harus menjamin adanya tindakan yang lebih cepat dari pada prosedur dari permintaan

Bantuan Militer. Oleh karena itulah maka institut Peperada merupakan kemenangan pula dalam lapangan Pemerintahan Daerah yang menggemparkan dan menggetarkan Nekolim.

Kemenangan yang baru diucapkan oleh Kepala Negara di dalam Amanat Politiknya pada sidang Umum MPRS ke III tanggal 11 April 1965, yang menyatakan dalam halaman 24 para Gubernur Kepala Daerah didudukkan dalam MPRS dan MUPPENAS untuk melaksanakan integrasi dan koordinasi itu (ialah pelaksanaan pembangunan di daerah) dengan nyata.

Sesudah kita menyaksikan sendiri apa yang dicapai oleh Rakyat Palangka Raya khususnya dan Rakyat Kalimantan Tengah, Kalimantan serta Indonesia pada umumnya dalam membangun kota di tengah-tengah Rimba Raya ini, maka juga Palangka Raya merupakan kemenangan Nasional yang hebat dan yang merupakan pula kemenangan Pemerintah Daerah yang sangat berharga, yang bernilai tinggi, oleh karena merupakan pendorong bagi semua Pemerintahan Daerah Lainnya.

Salut Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah dan pada Rakyat di Kalimantan pada umumnya dan Palangka Raya khususnya patut saya ucapkan. Dan salut serta hormat yang setinggi-tingginya kepada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, yang dalam hal ini juga membuktikan keberaniannya, serta kepemimpinnya, menengok jauh kemas depan, Bung Karnolah yang mengambil keputusan membangun di Rimba Raya ini.

Kita bangga mempunyai Pemimpin Besar Revolusi Sukarno yang dihormati dan disegani oleh seluruh Dunia, kadang-kadang ditakuti oleh Nekolim dan sudah terang diikuti

oleh banyak bangsa-bangsa yang baru merdeka di Afrika Asia.

Inilah yang perlu saya ucapkan. Palangka Raya dapat mematahkan rintangan-rintangan yang hebat. Alat-alat Besar pertama sampai juga ditengah-tengah Rimba dengan tidak pakai alat-alat Besar.

Satu kejadian yang memaksa kita semua menghormatinya; salut saya kepada Pak Tjilik Riwut serta seluruh staf dan Rakyatnya, salut saya kepada Panglima Daerah Militer Brigadir Jendral Sabirin Mukhtar, yang percaya kepada Pemerintah Daerah dan menyokong sepenuhnya.

Tindakan staf Kodam berarti dorongan yang hebat bagi pemerintah sipil. Sebaliknya prestasi Pemerintah Sipil yang mendorong pemindahan Kodam ini. Saya kira Panglima mengakui ucapan saya ini.

**PERKEMBANGAN
DAERAH OTONOM
DI KALIMANTAN**

Dalam pada itu, ingin saya kemukakan disini, bahwa mengenai perkembangan daerah otonom di Kalimantan, sebagaimana diketahui pertama-tama kita mulai dengan Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1948 yang telah membentuk daerah otonom Propinsi Kalimantan yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terletak dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948, dengan pusat pemerintahan yang berkedudukan di Banjarmasin.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1956, daerah otonom Propinsi Kalimantan telah dibagi dalam tiga daerah Swantantra, yaitu Daerah Swantantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dimana didalam penjelasan atas Undang-undang itu ditentukan,

bahwa pembentukan daerah Swatantra Propinsi yang keempat di Kalimantan yaitu Propinsi Kalimantan Tengah akan dilakukan selambat-lambatnya tiga tahun sesudah berlakunya Undang-undang No. 25 tahun 1956.

Berhubung dengan itu, dengan Undang-undang darurat No. 10 tahun 1957 karena dianggap telah tiba saatnya, maka lahirlah pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Daerah-daerah Swatantra Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin dari pemisahan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1959 maka Kalimantan Tengah ditetapkan terdiri dari lima daerah tingkat II, yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Barito Selatan dan Kapuas.

Maka dengan ditetapkannya Palangka Raya sebagai Kotapraja, sekarang ini terdapat di Kalimantan lima Kotapraja, yaitu Kotapaja Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda dan Palangka Raya.

**PEMBENTUKAN
KOTAPRAJA
PALANGKA RAYA**

Saudara-Saudara sekalian

Adapun Undang-undang No. 5 tahun 1965 yang telah menetapkan pembentukan Kotapraja Palangka Raya itu, telah mengubah Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang semula terdiri dari 5 (lima) Daerah Tingkat II, kini menjadi 6 (enam) Daerah Tingkat II termasuk 1 (satu) kotapraja, dengan jalan yang ditempuh ialah memisahkan sebagian wilayah Daerah Tingkat II Kapuas untuk selanjutnya dibentuk menjadi Kotapraja baru yang batas wilayahnya akan diatur kemudian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pada penetapan wilayah dari masing-masing Daerah Tingkat II Kapuas dan Kotapraja Palangka Raya itu sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-undang itu, akan diikuti sejauh mungkin batas-batas wilayah Kecamatan yang mencakupnya yang karena pembentukan Kotapraja Palangka Raya perlu dipisahkan dari lingkungan wilayah daerah Tingkat II Kapuas.

**PERLENGKAPAN
KOTAPRADJA
PALANGKA RAYA**

Untuk Kotapraja Palangka Raya yang baru dibentuk ini, dengan sendirinya sangat memerlukan alat perlengkapan yang baru. Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedur yang biasa, maka Menteri Dalam Negeri akan menunjuk seorang penguasa, yang menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal yang memerlukan perhatian pula disini, ialah perusahaan pembiayaan untuk perlengkapan pertama organisasi daerah yang baru dibentuk. Diharapkan oleh pemerintah pusat bahwa dalam waktu tiga tahun pertama dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biaya, biarpun Pemerintah mengetahui adanya kemampuan berdikari dari setiap daerah.

Akan tetapi sudah barang tentu, bahwa keperluan itu tidak saja hanya meliputi organisasi Daerah Tingkat II dan Kotapraja yang baru dibentuk, melainkan juga tiap organisasi dinas atau jawatan vertikal, yang sebagai akibat pembentukan daerah, dipecah menjadi dua atau lebih organisasi yang harus dibangun secara memadai.

**DAERAH TINGKAT
II KAPUAS LAMA**

Perlu saja dijelaskan disini, bahwa kepala Daerah Kapuas

lama dengan pembentukan Kotapraja Palangka Raya ini tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kapuas, demikian juga dengan para anggota

**KEDUDUKAN
ANGGOTA DPRD-
GR**

DPRD-GR Daerah Tingkat II Kapuas Lama, tetap sebagai anggota DPRD-GR Daerah Tingkat II Kapuas, kecuali apabila para anggota itu tidak memenuhi syarat tersebut dalam penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) masing-masing atas usul Kepala Daerah Tingkat II Kapuas diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

**KEDUDUKAN
ANGGOTA BPH**

Dalam pada ini, demikian juga dengan anggota BPH Daerah Tingkat II Kapuas lama tetap sebagai anggota BPH Daerah Tingkat II Kapuas dengan ketentuan bahwa :

- a. Anggota Badan Pemerintah Daerah Harian Daerah Tingkat II Kapuas Lama, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengikat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi Kotapraja Palangka Raya, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Kapuas, diperhentikan sebagai anggota ; untuk selanjutnya diangkat sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Kotapraja Palangka Raya :
- b. Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Kapuas yang tidak memenuhi syarat dimasukkan pada pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) serta syarat sebagaimana berlaku bagi keanggotaan DPRD-GR dimaksud pada pasal 7, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Kapuas setelah mendengar pertimbangan DPRD-GR yang bersangkutan diperhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Saudara-saudara sekalian .

Saya menaruh kepercayaan yang besar, bahwa dengan terbentuknya Kotapraja Palangka-Raya, pasti akan lebih mendorong maju bagi pelaksanaan pembangunan disini, khususnya dalam menghadapi tantangan alam yang maha hebat ini, tetapi yang penuh dengan sumber kekayaan yang melimpah-limpah yang membutuhkan tenaga untuk menggalinya, tenaga yang tangkas dan dinamis.

**JADIKANLAH
KOTA INDUSTRI
YANG MAJU**

Jadikan Palangka Raya kota penampung hasil pertanian dan hasil kehutanan sambil kota pendorong berkembangnya industri yang maju. Palangka Raya aman bersih, sehat dan cantik serta berkebudayaan berdasarkan kepribadian Indonesia, dengan wajah yang menampakkan ciri khas kebudayaan daerah, tetapi yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan yang dalam ekonomi dapat tegak berdiri ditas kaki sendiri sesuai dengan Tri Sakti TAVIP dan amanat Politik Presiden “Berdikari” yang harus dijadikan senjata ampuh bagi segenap pemerintah daerah.

**PEMERINTAH
DAERAH YANG
REVOLUSIONER**

Untuk melaksanakan kesemuanya itu, memang dibutuhkan Pemerintah Daerah yang revolusioner, bukan Pemerintah daerah yang alon-alon asal kelakon, tetapi Pemerintah Daerah yang sanggup berkorban, yang memberikan pengabdianya yang penuh kepada revolusi dengan tidak memperhitungkan untung rugi, pemerintah yang sanggup merangkul semua golongan yang revolusioner yang berporoskan NASAKOM, pemerintah yang tidak phobi-phobian dan yang tidak mengabdikan kepada satu golongan, tetapi pemerintah daerah kesatria yang berpihak kepada kaum yang lemah, terutama kepada kaum buruh dan tani biarpun merupakan pemerintah

yang menyeluruh pemerintah yang benar-benar menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Dasar Revolusi diatas mana negara kita didirikan.

Hanya dengan Pemerintah yang demikian itulah, kita dapat mewujudkan Pemerintah Daerah yang stabil dan berkewibawaan mencerminkan kehendak rakyat, Revolusioner dan gotong-royong.

Saudara-saudara sekalian.

Demikianlah pokok-pokok sambutan saya, sekali saya ucapkan “Selamat”, tanah air kita telah bertambah cantik dengan terbentuknya Kotapraja Palangka-Raya, binalah dengan sebaik-baiknya dengan kerja yang sekeras-kerasnya.

Hanya dengan kerja keras Revolusi kita akan terus menggelora dengan hebatnya, oleh karena itu marilah kerja mati-matian.

Dengan ini saya resmikan Kotapraja Palangka Raya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa memberkahinya.

Sekian, terimakasih

PALANGKA RAYA, 17 JUNI 1965

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

DR. SOENARDJO SOSROATMODJO

MAYOR DJENDRAL TNI

Catatan : Pidato dikutip dari arsip Bapak TT. Suan. Agar memudahkan para pembaca dilakukan perubahan ejaan dengan mempergunakan ejaan yang disempurnakan (EYD).